



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2023

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jakarta, Oktober 2024

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2023

Penyusun & Penyunting:
Pokja Data dan Informasi
Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain sampul & layout:
Dhany Ramdhany, S.Si., M.Hum.
Emma Yusrina Wulandari, S.Hut.
Muthiyah Mahmud, SE.
Hardi Kurnia Putra, ST.

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program dan Evaluasi
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 5730289/ (021) 5734632
Email: datainformasi.planologi@gmail.com

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 ini merupakan penerbitan lanjutan dari Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi data dari Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) sampai dengan 31 Desember 2023. Adapun acuan dalam penyusunan buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK /SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam Buku Statistik ini masih banyak kekurangan, namun harapan kami semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat terutama bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Oktober 2024

Plt. DIREKTUR JENDERAL



**Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN	
TABEL I.1 REKALKULASI PENUTUPAN LAHAN INDONESIA TAHUN 2022.....	1
TABEL I.2 ANGKA DEFORESTASI NETTO DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)	9
TABEL I.3 POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA	21
II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	
TABEL II.1 PERKEMBANGAN PENYUSUNAN/REVISI/REVIEW RKTP S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2023.....	29
TABEL II.2 PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP S.D. DESEMBER 2023	34
III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN	
TABEL III.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	39
TABEL III.2 PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S/D DESEMBER 2023.....	41
TABEL III.3 PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN S.D DESEMBER 2023.....	43
TABEL III.4 PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) S/D DESEMBER 2023	44
IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN	
TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI	47
TABEL IV.2 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN/PENEGASAN APL KAWASAN HUTAN)	48
TABEL IV.3 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PERTANIAN.....	50
V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	
TABEL V.1 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)	51
TABEL V.2 PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL	54
TABEL V.3 PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI.....	58
TABEL V.4 DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI.....	62
TABEL V.5 PENETAPAN FASILITASI KPH	70
VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	
TABEL VI.1 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2023.....	77
TABEL VI.2 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG).....	78

TABEL VI.3	PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG).....	79
TABEL VI.4	PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S/D DESEMBER 2023	80
TABEL VI.5	PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima).....	81

VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT DAN DOKUMEN LINGKUNGAN

TABEL VII.1	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN (UKL-UPL) TAHUN 2013-2023	83
TABEL VII.2	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN (AMDAL) TAHUN 2013-2023	85
TABEL VII.3	PERKEMBANGAN PENERAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP.....	87
TABEL VII.4	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN.....	87
TABEL VII.5	DAFTAR JUMLAH KOMISI PENILAI AMDAL DI INDONESIA	87

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.1	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW	89
TABEL VIII.2	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJPD.....	90
TABEL VIII.3	STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD	91
TABEL VIII.4	DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI.....	92
TABEL VIII.5	DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA.....	95

IX. DUKUNGAN MANAJEMEN

TABEL X.1	REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	109
TABEL X.2	SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	111
TABEL X.3	PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH.....	113
TABEL X.4	PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.....	115
TABEL X.5	PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	117
TABEL X.6	REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	129
TABEL X.7	PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	130

**PENYEDIAAN DATA
DAN INFORMASI
SUMBER DAYA HUTAN**



TABEL I.1. REKALKULASI PENUTUPAN LAHAN INDONESIA TAHUN 2022

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	JUMLAH	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ACEH													
	A. Hutan	776,6	1.638,9	113,3	372,9	2.901,7	2,0	2.903,8	241,1	3.144,9	55,6			
	- Hutan Primer	631,9	1.269,3	54,7	147,8	2.103,6	0,0	2.103,6	27,4	2.131,0	37,7			
	- Hutan Sekunder	136,9	362,2	49,0	174,4	722,5	1,3	723,8	161,9	885,7	15,7			
	- Hutan Tanaman *	7,8	7,5	9,7	50,8	75,7	0,7	76,4	51,8	128,1	2,3			
	B. Non Hutan	80,2	153,0	29,4	178,7	441,3	11,7	453,0	2.054,7	2.507,8	44,4			
	Total	856,8	1.791,9	142,7	551,6	3.343,0	13,8	3.356,8	2.295,9	5.652,7	100,0			
2	SUMUT													
	A. Hutan	375,1	715,7	318,4	325,4	1.734,5	8,8	1.743,3	167,4	1.910,7	27,0			
	- Hutan Primer	284,9	259,0	34,0	2,4	580,4	0,9	581,3	3,1	584,4	8,3			
	- Hutan Sekunder	90,0	432,8	282,1	190,7	995,5	7,0	1.002,5	149,5	1.152,0	16,3			
	- Hutan Tanaman *	0,2	23,9	2,3	132,3	158,6	0,9	159,5	14,9	174,4	2,5			
	B. Non Hutan	44,1	473,3	308,2	349,4	1.175,0	82,7	1.257,6	3.902,4	5.160,0	73,0			
	Total	419,2	1.188,9	626,6	674,8	2.909,5	91,4	3.000,9	4.069,8	7.070,7	100,0			
3	SUMBAR													
	A. Hutan	669,9	575,9	152,1	261,6	1.659,5	69,3	1.728,8	178,5	1.907,3	45,9			
	- Hutan Primer	373,7	196,8	4,5	8,9	583,9	2,6	586,5	13,5	600,0	14,4			
	- Hutan Sekunder	296,2	378,5	137,2	230,9	1.042,9	62,0	1.104,9	155,0	1.259,8	30,3			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,6	10,4	21,8	32,7	4,7	37,5	10,0	47,5	1,1			
	B. Non Hutan	95,6	195,3	76,1	94,6	461,6	90,6	552,2	1.697,0	2.249,2	54,1			
	Total	765,6	771,2	228,2	356,2	2.121,1	159,9	2.281,0	1.875,5	4.156,5	100,0			
4	RIAU													
	A. Hutan	469,4	86,2	330,1	1.545,1	2.430,7	62,3	2.493,0	83,9	2.577,0	29,1			
	- Hutan Primer	114,9	19,3	39,7	7,5	181,4	0,6	182,0	2,8	184,8	2,1			
	- Hutan Sekunder	351,3	66,8	258,7	669,2	1.346,1	56,1	1.402,2	66,5	1.468,7	16,6			
	- Hutan Tanaman *	3,1	0,0	31,7	868,4	903,2	5,7	908,9	14,6	923,5	10,4			
	B. Non Hutan	156,4	142,2	676,7	779,7	1.755,0	1.080,9	2.835,9	3.428,5	6.264,4	70,9			
	Total	625,8	228,4	1.006,8	2.324,8	4.185,7	1.143,2	5.328,9	3.512,4	8.841,3	100,0			
5	JAMBI													
	A. Hutan	558,6	134,5	125,6	463,9	1.282,6	0,1	1.282,6	77,5	1.360,1	28,1			
	- Hutan Primer	451,8	90,5	38,7	64,6	645,6	0,0	645,6	23,7	669,4	13,8			
	- Hutan Sekunder	106,8	43,7	77,5	112,4	340,3	0,0	340,4	39,3	379,6	7,8			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,3	9,4	286,9	296,6	0,1	296,7	14,5	311,2	6,4			
	B. Non Hutan	151,8	46,0	138,8	488,5	825,1	11,0	836,1	2.650,9	3.487,0	71,9			
	Total	710,4	180,6	264,4	952,3	2.107,7	11,1	2.118,8	2.728,4	4.847,1	100,0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	JUMLAH	%				
		HK 3	HL 4	HPT 5	HP 6	Jumlah 7								
1	2								10	11				
6	SUMSEL													
	A. Hutan	389,5	229,9	71,3	785,3	1.475,9	0,0	1.475,9	64,4	1.540,3	17,9			
	- Hutan Primer	291,0	82,2	10,6	6,6	390,4	0,0	390,4	1,7	392,2	4,6			
	- Hutan Sekunder	97,6	147,1	47,3	67,3	359,4	0,0	359,4	44,2	403,6	4,7			
	- Hutan Tanaman *	0,8	0,6	13,4	711,3	726,0	0,0	726,1	18,5	744,5	8,7			
	B. Non Hutan	326,2	337,4	142,9	909,1	1.715,6	144,1	1.859,7	5.206,9	7.066,6	82,1			
	Total	715,7	567,3	214,2	1.694,4	3.191,5	144,1	3.335,6	5.271,3	8.606,9	100,0			
7	KEP. BANGKA BELITUNG													
	A. Hutan	10,2	78,4	0,0	77,3	165,9	0,0	165,9	43,2	209,1	12,6			
	- Hutan Primer	2,7	19,3	0,0	3,9	25,9	0,0	25,9	2,7	28,6	1,7			
	- Hutan Sekunder	7,5	59,1	0,0	73,4	140,0	0,0	140,0	40,6	180,6	10,8			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	B. Non Hutan	26,0	107,2	0,0	357,4	490,6	0,7	491,3	965,7	1.457,0	87,4			
	Total	36,2	185,6	0,0	434,7	656,5	0,7	657,2	1.009,0	1.666,1	100,0			
8	BENGKULU													
	A. Hutan	391,6	167,0	56,6	11,9	627,1	0,0	627,1	24,2	651,3	32,4			
	- Hutan Primer	340,3	116,4	15,4	2,9	474,9	0,0	474,9	0,4	475,4	23,6			
	- Hutan Sekunder	51,2	50,6	41,2	9,0	152,0	0,0	152,0	23,7	175,8	8,7			
	- Hutan Tanaman *	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0			
	B. Non Hutan	68,2	91,9	115,7	13,9	289,6	11,7	301,3	1.057,6	1.358,9	67,6			
	Total	459,8	258,9	172,3	25,8	916,7	11,7	928,4	1.081,8	2.010,2	100,0			
9	LAMPUNG													
	A. Hutan	238,3	54,5	10,0	11,9	314,7	0,0	314,7	15,7	330,4	9,8			
	- Hutan Primer	127,5	2,8	0,9	0,0	131,2	0,0	131,2	0,6	131,8	3,9			
	- Hutan Sekunder	110,8	51,7	9,1	0,1	171,7	0,0	171,7	15,1	186,8	5,6			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	0,0	11,8	0,4			
	B. Non Hutan	173,1	268,2	19,2	157,3	617,8	0,0	617,8	2.412,8	3.030,6	90,2			
	Total	411,3	322,8	29,2	169,3	932,5	0,0	932,5	2.428,5	3.361,0	100,0			
10	KEPRI													
	A. Hutan	1,2	55,2	73,6	47,5	177,4	43,7	221,1	101,5	322,6	39,7			
	- Hutan Primer	0,0	7,3	2,9	3,3	13,5	2,4	15,9	1,1	17,0	2,1			
	- Hutan Sekunder	1,2	47,9	70,7	44,1	163,9	41,3	205,2	100,4	305,6	37,6			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	B. Non Hutan	3,4	39,9	42,3	27,1	112,6	38,1	150,7	338,8	489,5	60,3			
	Total	4,6	95,1	115,8	74,5	290,1	81,8	371,8	440,3	812,1	100,0			
	PULAU SUMATERA													
	A. Hutan	3.880,3	3.736,1	1.250,8	3.902,7	12.770,0	186,3	12.956,3	997,5	13.953,7	29,7			
	- Hutan Primer	2.618,8	2.062,8	201,3	247,8	5.130,8	6,5	5.137,3	77,1	5.214,4	11,1			
	- Hutan Sekunder	1.249,5	1.640,5	972,7	1.571,6	5.434,3	167,7	5.602,1	796,1	6.398,2	13,6			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	JUMLAH	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	- Hutan Tanaman *	12,0	32,8	76,8	2.083,2	2.204,9	12,0	2.216,9	124,2	2.341,1	5,0			
	B. Non Hutan	1.125,0	1.854,4	1.549,2	3.355,6	7.884,2	1.471,4	9.355,7	23.715,3	33.071,0	70,3			
	Total	5.005,3	5.590,6	2.800,1	7.258,3	20.654,3	1.657,7	22.311,9	24.712,8	47.024,7	100,0			
11	BANTEN													
	A. Hutan	72,6	7,5	42,2	17,3	139,6	0,0	139,6	27,0	166,6	17,6			
	- Hutan Primer	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,8			
	- Hutan Sekunder	59,0	4,5	8,3	1,3	73,1	0,0	73,1	4,4	77,5	8,2			
	- Hutan Tanaman *	6,3	3,0	33,9	15,9	59,1	0,0	59,1	22,6	81,8	8,7			
	B. Non Hutan	29,6	2,6	16,5	10,0	58,7	0,0	58,7	718,8	777,5	82,4			
	Total	102,2	10,2	58,7	27,3	198,3	0,0	198,3	745,9	944,2	100,0			
12	DKI JAKARTA													
	A. Hutan	0,4	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,6	1,1	1,7			
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	- Hutan Sekunder	0,4	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,6	1,1	1,7			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	B. Non Hutan	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	65,0	65,1	98,3			
	Total	0,4	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	0,6	65,7	66,3	100,0			
13	JABAR													
	A. Hutan	153,0	159,1	114,6	132,7	559,5	0,0	559,5	121,3	680,8	18,3			
	- Hutan Primer	9,1	1,1	0,0	1,3	11,5	0,0	11,5	0,0	11,6	0,3			
	- Hutan Sekunder	109,7	69,4	14,9	20,2	214,3	0,0	214,3	14,7	228,9	6,2			
	- Hutan Tanaman *	34,1	88,6	99,7	111,3	333,7	0,0	333,7	106,6	440,3	11,8			
	B. Non Hutan	21,2	73,5	66,8	81,2	242,7	0,0	242,7	2.795,4	3.038,2	81,7			
	Total	174,2	232,6	181,4	214,0	802,2	0,0	802,2	2.916,7	3.718,9	100,0			
14	JATENG													
	A. Hutan	10,6	73,4	163,5	316,5	564,0	0,0	564,0	92,2	656,2	19,0			
	- Hutan Primer	0,0	7,1	0,5	0,0	7,6	0,0	7,6	0,0	7,6	0,2			
	- Hutan Sekunder	7,4	33,4	38,6	7,9	87,3	0,0	87,3	20,3	107,6	3,1			
	- Hutan Tanaman *	3,2	32,9	124,4	308,6	469,2	0,0	469,2	71,9	541,1	15,6			
	B. Non Hutan	4,8	11,7	17,2	61,0	94,7	0,0	94,7	2.708,1	2.802,8	81,0			
	Total	15,5	85,1	180,6	377,6	658,8	0,0	658,8	2.800,3	3.459,0	100,0			
15	DI YOGYAKARTA													
	A. Hutan	2,7	1,9	0,0	10,9	15,5	0,0	15,5	6,9	22,4	7,0			
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	- Hutan Sekunder	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	0,1	1,4	0,4			
	- Hutan Tanaman *	1,4	1,9	0,0	10,9	14,2	0,0	14,2	6,8	21,0	6,5			
	B. Non Hutan	0,4	0,5	0,0	2,8	3,7	0,0	3,7	295,7	299,5	93,0			
	Total	3,1	2,3	0,0	13,8	19,2	0,0	19,2	302,6	321,9	100,0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah	%				
		HK 3	HL 4	HPT 5	HP 6	Jumlah 7								
1	2										10	11		
16	JATIM													
	A. Hutan	198.5	258.1	0.2	650.9	1.107.6	0.0	1.107.6	153.9	1.261.6	25.9			
	- Hutan Primer	26.7	10.3	0.0	4.5	41.6	0.0	41.6	1.1	42.7	0.9			
	- Hutan Sekunder	162.2	158.2	0.0	55.1	375.4	0.0	375.4	38.2	413.6	8.5			
	- Hutan Tanaman *	9.6	89.6	0.2	591.3	690.7	0.0	690.7	114.6	805.3	16.5			
	B. Non Hutan	37.9	78.9	0.0	157.9	274.8	0.0	274.8	3.333.7	3.608.5	74.1			
	Total	236.4	337.0	0.2	808.9	1.382.4	0.0	1.382.4	3.487.6	4.870.0	100.0			
	PULAU JAWA													
	A. Hutan	437.8	500.1	320.4	1.128.5	2.386.8	0.0	2.386.8	401.9	2.788.7	20.8			
	- Hutan Primer	43.1	18.6	0.5	5.8	68.0	0.0	68.0	1.2	69.2	0.5			
	- Hutan Sekunder	340.0	265.5	61.8	84.6	751.9	0.0	751.9	78.2	830.1	6.2			
	- Hutan Tanaman *	54.7	216.0	258.1	1.038.1	1.566.9	0.0	1.566.9	322.5	1.889.4	14.1			
	B. Non Hutan	94.1	167.2	100.5	313.1	674.8	0.0	674.8	9.916.8	10.591.6	79.2			
	Total	531.9	667.2	420.9	1.441.5	3.061.6	0.0	3.061.6	10.318.7	13.380.3	100.0			
17	KALBAR													
	A. Hutan	1.156.0	1.795.1	1.387.9	798.7	5.137.6	52.5	5.190.1	475.9	5.666.0	38.9			
	- Hutan Primer	964.6	978.8	318.6	15.0	2.277.0	0.6	2.277.6	1.5	2.279.1	15.7			
	- Hutan Sekunder	191.3	816.3	1.062.6	701.6	2.771.9	51.9	2.823.8	471.2	3.295.0	22.6			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.0	6.6	82.1	88.7	0.0	88.7	3.2	91.9	0.6			
	B. Non Hutan	266.8	489.5	729.4	1.300.3	2.786.1	131.8	2.917.8	5.971.4	8.889.3	61.1			
	Total	1.422.8	2.284.6	2.117.3	2.099.0	7.923.7	184.3	8.108.0	6.447.3	14.555.3	100.0			
18	KALSEL													
	A. Hutan	136.6	357.6	84.3	278.9	857.4	7.2	864.6	78.5	943.1	25.6			
	- Hutan Primer	16.8	38.3	1.8	0.3	57.2	0.0	57.2	1.9	59.0	1.6			
	- Hutan Sekunder	88.0	318.5	78.9	201.5	686.9	6.4	693.3	55.2	748.5	20.3			
	- Hutan Tanaman *	31.8	0.8	3.6	77.1	113.3	0.7	114.1	21.5	135.6	3.7			
	B. Non Hutan	78.8	148.3	40.4	454.8	722.2	112.7	834.9	1.911.8	2.746.7	74.4			
	Total	215.4	505.8	124.7	733.7	1.579.6	119.8	1.699.5	1.990.3	3.689.8	100.0			
19	KALTENG													
	A. Hutan	1.077.6	967.0	2.802.7	1.930.5	6.777.9	406.7	7.184.6	221.0	7.405.6	48.8			
	- Hutan Primer	292.8	441.8	329.3	33.4	1.097.3	1.5	1.098.8	0.9	1.099.6	7.2			
	- Hutan Sekunder	784.8	525.2	2.468.9	1.747.7	5.526.7	400.0	5.926.7	197.1	6.123.8	40.4			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.0	4.5	149.4	153.9	5.2	159.1	23.1	182.2	1.2			
	B. Non Hutan	523.4	380.8	444.7	1.837.9	3.186.8	1.395.1	4.581.9	3.182.2	7.764.1	51.2			
	Total	1.601.0	1.347.8	3.247.4	3.768.5	9.964.7	1.801.8	11.766.5	3.403.2	15.169.7	100.0			
20	KALTIM													
	A. Hutan	199.3	1.771.5	2.798.1	2.081.4	6.850.3	122.8	6.973.0	933.1	7.906.2	62.4			
	- Hutan Primer	11.8	1.294.0	863.8	88.1	2.257.6	3.0	2.260.6	125.2	2.385.8	18.8			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	JUMLAH	%				
		HK 3	HL 4	HPT 5	HP 6	Jumlah 7								
1	2							9	10	11				
	- Hutan Sekunder	187,0	476,5	1.918,4	1.448,8	4.030,8	74,7	4.105,5	773,8	4.879,3	38,5			
	- Hutan Tanaman *	0,5	1,0	15,9	544,5	561,9	45,0	606,9	34,2	641,1	5,1			
	B. Non Hutan	235,3	45,4	181,3	841,0	1.303,0	55,2	1.358,3	3.396,2	4.754,5	37,6			
	Total	434,6	1.817,0	2.979,4	2.922,4	8.153,3	178,0	8.331,3	4.329,4	12.660,7	100,0			
21	KALTARA													
	A. Hutan	1.264,2	998,9	2.022,5	859,0	5.144,6	47,5	5.192,1	606,1	5.798,3	84,5			
	- Hutan Primer	1.201,1	896,1	1.254,2	284,2	3.635,6	0,2	3.635,8	179,7	3.815,5	55,6			
	- Hutan Sekunder	63,1	102,8	765,8	498,8	1.430,6	46,8	1.477,4	421,5	1.898,8	27,7			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	2,5	75,9	78,4	0,5	79,0	4,9	83,9	1,2			
	B. Non Hutan	9,0	13,1	52,9	213,4	288,5	12,0	300,5	762,3	1.062,7	15,5			
	Total	1.273,3	1.012,0	2.075,5	1.072,4	5.433,1	59,5	5.492,6	1.368,4	6.861,0	100,0			
	PULAU KALIMANTAN													
	A. Hutan	3.833,7	5.890,1	9.095,5	5.948,5	24.767,8	636,6	25.404,5	2.314,7	27.719,2	52,4			
	- Hutan Primer	2.487,1	3.649,0	2.767,7	421,0	9.324,8	5,2	9.330,0	309,2	9.639,2	18,2			
	- Hutan Sekunder	1.314,2	2.239,3	6.294,8	4.598,5	14.446,8	579,9	15.026,7	1.918,7	16.945,4	32,0			
	- Hutan Tanaman *	32,3	1,8	33,1	929,1	996,3	51,5	1.047,8	86,8	1.134,6	2,1			
	B. Non Hutan	1.113,3	1.077,1	1.448,8	4.647,4	8.286,6	1.706,8	9.993,3	15.223,9	25.217,3	47,6			
	Total	4.946,9	6.967,3	10.544,3	10.595,9	33.054,4	2.343,4	35.397,8	17.538,6	52.936,4	100,0			
	SULUT													
	A. Hutan	208,2	112,0	143,6	30,2	494,1	11,3	505,4	47,4	552,7	38,3			
	- Hutan Primer	128,5	61,3	31,2	11,0	232,0	0,0	232,0	5,8	237,8	16,5			
	- Hutan Sekunder	79,7	50,7	112,4	19,2	262,1	11,3	273,4	41,6	314,9	21,8			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	B. Non Hutan	36,3	46,3	66,5	35,8	184,9	3,4	188,3	703,1	891,4	61,7			
	Total	244,5	158,3	210,1	66,0	679,0	14,7	693,7	750,5	1.444,1	100,0			
	GORONTALO													
	A. Hutan	186,1	178,5	202,9	69,9	637,5	10,8	648,2	60,8	709,0	59,2			
	- Hutan Primer	129,2	76,3	64,4	6,1	276,0	0,5	276,5	1,9	278,4	23,3			
	- Hutan Sekunder	56,9	102,3	126,3	54,9	340,3	8,3	348,7	58,1	406,8	34,0			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	12,2	8,9	21,1	1,9	23,0	0,7	23,8	2,0			
	B. Non Hutan	9,9	24,2	48,7	19,4	102,2	12,5	114,7	373,5	488,2	40,8			
	Total	196,0	202,8	251,6	89,3	739,7	23,2	762,9	434,3	1.197,2	100,0			
	SULTENG													
	A. Hutan	551,1	1.125,5	1.212,9	317,1	3.206,6	106,1	3.312,7	447,2	3.759,9	62,2			
	- Hutan Primer	323,8	813,1	699,1	159,7	1.995,6	46,8	2.042,4	129,8	2.172,2	35,9			
	- Hutan Sekunder	227,4	312,1	506,7	157,4	1.203,5	59,3	1.262,8	315,8	1.578,6	26,1			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,3	7,2	0,0	7,5	0,0	7,5	1,7	9,2	0,2			
	B. Non Hutan	88,2	125,8	215,6	108,0	537,7	50,1	587,8	1.697,8	2.285,6	37,8			
	Total	639,3	1.251,3	1.428,5	425,1	3.744,3	156,2	3.900,5	2.145,0	6.045,5	100,0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%			
		HK 3	HL 4	HPT 5	HP 6	Jumlah 7								
1	2										10	11		
25	SULTRA													
	A. Hutan	221,2	946,4	358,8	214,9	1.741,3	22,0		1.763,3		120,7		1.884,0	52,0
	- Hutan Primer	15,0	710,9	208,2	52,4	986,6	9,6		996,2		10,2		1.006,4	27,8
	- Hutan Sekunder	206,2	235,4	150,6	161,9	754,1	12,4		766,5		110,3		876,8	24,2
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0		0,6		0,2		0,8	0,0
	B. Non Hutan	72,2	130,8	91,0	197,8	491,8	44,2		536,0		1.202,9		1.738,9	48,0
	Total	293,4	1.077,2	449,9	412,7	2.233,1	66,2		2.299,3		1.323,6		3.622,9	100,0
26	SULBAR													
	A. Hutan	178,8	317,7	238,2	41,2	775,9	5,8		781,7		30,0		811,7	49,2
	- Hutan Primer	111,9	126,3	74,2	9,5	321,9	0,2		322,1		0,5		322,6	19,5
	- Hutan Sekunder	66,8	191,4	164,0	31,7	454,0	5,6		459,6		29,5		489,1	29,6
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	-
	B. Non Hutan	10,7	132,5	91,7	29,5	264,4	14,8		279,2		560,3		839,4	50,8
	Total	189,5	450,2	330,0	70,7	1.040,3	20,6		1.060,9		590,3		1.651,2	100,0
27	SULSEL													
	A. Hutan	152,3	832,9	318,4	64,8	1.368,4	11,4		1.379,8		131,4		1.511,2	33,9
	- Hutan Primer	88,9	447,6	157,5	4,2	698,2	5,9		704,0		16,8		720,9	16,2
	- Hutan Sekunder	63,0	383,8	155,3	59,0	661,2	5,6		666,8		113,4		780,2	17,5
	- Hutan Tanaman *	0,3	1,5	5,6	1,6	9,0	0,0		9,0		1,2		10,2	0,2
	B. Non Hutan	35,7	286,2	151,3	70,9	544,0	3,4		547,4		2.398,9		2.946,3	66,1
	Total	188,0	1.119,0	469,7	135,7	1.912,4	14,8		1.927,2		2.530,3		4.457,5	100,0
PULAU SULAWESI														
	A. Hutan	1.497,7	3.513,0	2.474,9	738,1	8.223,7	167,4		8.391,1		837,4		9.228,6	50,1
	- Hutan Primer	797,4	2.235,5	1.234,5	242,9	4.510,3	63,0		4.573,3		165,0		4.738,3	25,7
	- Hutan Sekunder	700,0	1.275,7	1.215,4	484,2	3.675,2	102,5		3.777,7		668,6		4.446,3	24,1
	- Hutan Tanaman *	0,3	1,8	25,0	11,1	38,2	1,9		40,2		3,8		44,0	0,2
	B. Non Hutan	253,0	745,8	664,9	461,4	2.125,0	128,3		2.253,3		6.936,5		9.189,8	49,9
	Total	1.750,7	4.258,7	3.139,8	1.199,5	10.348,8	295,7		10.644,5		7.773,9		18.418,4	100,0
28	BALI													
	A. Hutan	18,0	69,3	3,8	0,2	91,5	0,0		91,5		4,4		95,9	16,9
	- Hutan Primer	2,6	36,0	0,0	0,0	38,6	0,0		38,6		0,0		38,6	6,8
	- Hutan Sekunder	13,6	30,5	1,2	0,1	45,3	0,0		45,3		2,3		47,6	8,4
	- Hutan Tanaman *	1,9	2,9	2,6	0,2	7,5	0,0		7,5		2,1		9,6	1,7
	B. Non Hutan	2,9	29,2	3,2	1,8	37,0	0,0		37,0		433,9		471,0	83,1
	Total	20,9	98,5	7,0	2,0	128,5	0,0		128,5		438,3		566,8	100,0
29	NTB													
	A. Hutan	81,6	386,0	224,9	79,4	771,9	0,0		771,9		112,4		884,3	44,2
	- Hutan Primer	40,5	192,4	70,4	8,0	311,2	0,0		311,2		1,6		312,9	15,6

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	- Hutan Sekunder	41.0	192.2	154.1	68.9	456.2	0.0	456.2	107.2	563.4	28.1			
	- Hutan Tanaman *	0.1	1.5	0.5	2.4	4.5	0.0	4.5	3.6	8.1	0.4			
	B. Non Hutan	93.2	61.9	74.2	73.5	302.8	0.0	302.8	815.0	1.117.9	55.8			
	Total	174.8	447.9	299.1	152.9	1.074.7	0.0	1.074.7	927.5	2.002.2	100.0			
30	NTT													
	A. Hutan	166.7	419.4	97.6	175.4	859.1	20.8	879.9	830.1	1.710.0	36.1			
	- Hutan Primer	108.4	152.7	18.8	63.0	342.9	3.8	346.7	174.8	521.5	11.0			
	- Hutan Sekunder	57.3	265.0	76.9	110.5	509.7	17.0	526.6	653.1	1.179.7	24.9			
	- Hutan Tanaman *	1.0	1.7	2.0	1.9	6.6	0.0	6.6	2.2	8.8	0.2			
	B. Non Hutan	98.3	267.8	75.2	118.0	559.3	62.2	621.6	2.399.6	3.021.1	63.9			
	Total	264.9	687.2	172.9	293.4	1.418.5	83.0	1.501.5	3.229.6	4.731.1	100.0			
	PULAU BALI NUSA													
	A. Hutan	266.3	874.8	326.4	255.0	1.722.5	20.8	1.743.3	946.9	2.690.2	36.9			
	- Hutan Primer	151.5	381.0	89.1	71.0	692.7	3.8	696.5	176.4	872.9	12.0			
	- Hutan Sekunder	111.8	487.7	232.2	179.5	1.011.2	17.0	1.028.2	762.6	1.790.7	24.5			
	- Hutan Tanaman *	3.0	6.1	5.0	4.5	18.6	0.0	18.6	7.9	26.5	0.4			
	B. Non Hutan	194.3	358.9	152.6	193.4	899.2	62.2	961.4	3.648.5	4.610.0	63.1			
	Total	460.6	1.233.7	479.0	448.4	2.621.7	83.0	2.704.7	4.595.4	7.300.1	100.0			
31	MALUKU													
	A. Hutan	377.8	522.8	763.7	433.0	2.097.4	834.1	2.931.5	165.3	3.096.8	66.9			
	- Hutan Primer	74.9	39.6	31.3	61.9	207.7	142.9	350.6	12.7	363.2	7.8			
	- Hutan Sekunder	302.9	483.3	732.4	371.1	1.889.7	691.2	2.581.0	152.6	2.733.6	59.1			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-			
	B. Non Hutan	45.4	106.1	129.5	213.6	494.7	488.5	983.1	549.1	1.532.2	33.1			
	Total	423.2	629.0	893.2	646.7	2.592.1	1.322.6	3.914.7	714.3	4.629.0	100.0			
32	MALUT													
	A. Hutan	205.7	491.0	567.7	370.4	1.634.9	289.0	1.923.9	114.8	2.038.7	65.0			
	- Hutan Primer	62.8	141.8	103.0	15.6	323.1	14.7	337.8	16.8	354.6	11.3			
	- Hutan Sekunder	143.0	349.0	460.8	322.8	1.275.6	272.7	1.548.3	98.0	1.646.3	52.5			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.2	3.9	32.1	36.2	1.6	37.9	0.0	37.9	1.2			
	B. Non Hutan	13.1	78.0	111.5	110.9	313.5	254.6	568.1	531.6	1.099.7	35.0			
	Total	218.8	569.0	679.2	481.3	1.948.3	543.7	2.492.0	646.4	3.138.4	100.0			
	PULAU MALUKU													
	A. Hutan	583.5	1.013.9	1.331.4	803.4	3.732.3	1.123.2	4.855.5	280.1	5.135.6	66.1			
	- Hutan Primer	137.7	181.4	134.3	77.5	530.8	157.6	688.3	29.5	717.8	9.2			
	- Hutan Sekunder	445.9	832.3	1.193.3	693.9	3.165.3	964.0	4.129.3	250.6	4.379.8	56.4			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.2	3.9	32.1	36.2	1.6	37.9	0.0	37.9	0.5			
	B. Non Hutan	58.5	184.1	241.0	324.5	808.1	743.1	1.551.2	1.080.7	2.631.9	33.9			
	Total	642.0	1.198.0	1.572.4	1.128.0	4.540.4	1.866.2	6.406.6	1.360.8	7.767.4	100.0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK						Jumlah	JUMLAH	%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
33	PAPUA														
	A. Hutan	5.379,4	6.898,0	5.258,0	4.221,4	21.756,7	2.325,7	24.082,4	1.239,5	25.321,9		81,8			
	- Hutan Primer	4.607,4	6.062,3	4.002,0	2.613,6	17.285,4	1.407,9	18.693,3	650,3	19.343,6		62,5			
	- Hutan Sekunder	771,9	835,7	1.256,0	1.598,2	4.461,7	917,1	5.378,8	589,2	5.968,0		19,3			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,7	10,2	0,1	10,3		0,0			
	B. Non Hutan	1.345,3	779,7	702,7	668,9	3.496,6	1.253,2	4.749,8	884,9	5.634,7		18,2			
	Total	6.724,6	7.677,7	5.960,7	4.890,2	25.253,3	3.578,9	28.832,1	2.124,4	30.956,5		100,0			
34	PAPUA BARAT														
	A. Hutan	1.689,2	1.566,7	1.795,4	2.131,5	7.182,8	1.290,3	8.473,0	658,6	9.131,6		93,1			
	- Hutan Primer	1.503,8	1.279,5	1.269,2	1.073,4	5.125,8	696,4	5.822,2	229,9	6.052,1		61,7			
	- Hutan Sekunder	185,5	287,2	526,2	1.057,5	2.056,3	593,8	2.650,1	428,6	3.078,8		31,4			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7		0,0			
	B. Non Hutan	31,6	88,3	47,0	95,2	262,0	100,4	362,4	309,8	672,2		6,9			
	Total	1.720,8	1.654,9	1.842,3	2.226,7	7.444,7	1.390,7	8.835,4	968,3	9.803,8		100,0			
	PULAU PAPUA														
	A. Hutan	7.068,6	8.464,6	7.053,3	6.352,9	28.939,4	3.615,9	32.555,4	1.898,1	34.453,4		84,5			
	- Hutan Primer	6.111,2	7.341,8	5.271,2	3.687,0	22.411,2	2.104,3	24.515,5	880,2	25.395,7		62,3			
	- Hutan Sekunder	957,4	1.122,9	1.782,1	2.655,7	6.518,1	1.510,9	8.029,0	1.017,8	9.046,7		22,2			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,8	10,9	0,1	11,0		0,0			
	B. Non Hutan	1.376,9	868,0	749,7	764,0	3.758,6	1.353,6	5.112,2	1.194,7	6.306,8		15,5			
	Total	8.445,4	9.332,6	7.803,0	7.116,9	32.698,0	4.969,5	37.667,6	3.092,7	40.760,3		100,0			
	INDONESIA														
	A. Hutan	17.567,9	23.992,7	21.852,8	19.129,2	82.542,6	5.750,2	88.292,8	7.676,6	95.969,4		51,2			
	- Hutan Primer	12.346,8	15.870,0	9.698,7	4.753,1	42.668,5	2.340,4	45.008,9	1.638,6	46.647,5		24,9			
	- Hutan Sekunder	5.118,8	7.863,8	11.752,3	10.267,9	35.002,8	3.342,0	38.344,8	5.492,6	43.837,4		23,4			
	- Hutan Tanaman *	102,4	258,8	401,9	4.108,2	4.871,3	67,9	4.939,2	545,4	5.484,5		2,9			
	B. Non Hutan	4.215,0	5.255,5	4.906,7	10.059,4	24.436,5	5.465,4	29.901,9	61.716,4	91.618,3		48,8			
	Total	21.782,9	29.248,1	26.759,5	29.188,6	106.979,1	11.215,6	118.194,7	69.393,0	187.587,6		100,0			

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tanaman merupakan hutan hasil penanaman baik di dalam dan di luar konsesi Hutan Tanaman Industri

Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2022

Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- Data digital Perkembangan Kawasan Hutan per September 2022, Direktorat Pengkukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Data s.d. 31 Oktober 2023

TABEL I.2. TABEL ANGKA DEFORESTASI NETTO DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP				Jumlah		HPK		
1	2	HK 3	HL 4	HPT 5	HP 6	Jumlah 7	Jumlah 9	8	10	11
1	ACEH									
	A. Hutan Primer	234,5	440,6	67,2	234,9	977,3	977,3	-	265,1	1.242,3
	- Hutan lahan kering primer	65,1	440,6	67,2	234,9	807,8	807,8	-	193,2	1.001,0
	- Hutan rawa primer	169,5	-	-	-	169,5	169,5	-	71,9	241,4
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	114,5	668,7	285,3	743,3	1.811,8	1.836,7	24,9	2.262,1	4.098,9
	- Hutan lahan kering sekunder	49,4	668,7	285,3	699,0	1.702,4	1.727,3	24,9	1.924,9	3.652,2
	- Hutan rawa sekunder	65,1	-	-	-	65,1	65,1	-	337,2	402,3
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	44,3	44,3	44,3	-	-	44,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	20,5	20,5	20,5	-	5,4	25,9
	TOTAL	349,1	1.109,4	352,5	998,6	2.809,6	2.834,5	24,9	2.532,6	5.367,1
2	SUMATERA UTARA									
	A. Hutan Primer	112,6	144,2	3,9	0,9	261,6	261,6	-	0,0	261,6
	- Hutan lahan kering primer	112,6	144,2	3,9	0,9	261,6	261,6	-	0,0	261,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	164,3	1.284,7	752,5	685,2	2.886,6	2.997,9	111,3	2.339,4	5.337,2
	- Hutan lahan kering sekunder	83,6	1.101,2	711,9	307,9	2.204,6	2.308,8	104,2	1.841,1	4.149,9
	- Hutan rawa sekunder	-	1,2	20,7	5,7	27,5	34,6	7,0	120,7	155,3
	- Hutan mangrove sekunder	80,7	182,3	19,9	371,6	654,5	654,5	-	377,5	1.032,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	276,9	1.428,9	756,3	686,1	3.148,2	3.259,5	111,3	2.339,4	5.598,8
3	RIAU									
	A. Hutan Primer	11,4	10,5	276,6	-	298,5	298,5	-	-	298,5
	- Hutan lahan kering primer	11,4	10,5	276,6	-	298,5	298,5	-	-	298,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	1.462,1	1.126,9	2.187,6	3.424,5	8.201,2	8.732,1	530,9	1.431,2	10.163,2
	- Hutan lahan kering sekunder	1.182,0	1.106,4	985,5	452,6	3.726,5	3.838,5	112,0	261,6	4.100,0
	- Hutan rawa sekunder	280,1	20,5	911,9	2.940,2	4.152,7	4.502,8	350,1	1.042,0	5.544,8
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	290,2	31,7	322,0	390,8	68,8	127,6	518,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(58,3)	(1.074,6)	(1.132,9)	(1.132,9)	-	(74,0)	(1.206,9)
	TOTAL	1.473,5	1.137,5	2.405,9	2.349,9	7.366,8	7.897,7	530,9	1.357,1	9.254,8

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	SUMATERA BARAT												
	A. Hutan Primer	958,0	974,1	16,5	12,2	1.960,8	-	1.960,8	54,1	2.014,9			
	- Hutan lahan kering primer	958,0	974,1	16,5	0,4	1.949,0	-	1.949,0	54,1	2.003,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	11,8	11,8	-	11,8	-	11,8			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	757,5	1.249,4	320,8	374,2	2.701,9	198,7	2.900,6	902,0	3.802,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	757,5	1.231,9	320,8	352,9	2.663,0	96,7	2.759,7	875,0	3.634,7			
	- Hutan rawa sekunder	-	17,6	-	21,3	38,9	102,0	140,9	21,2	162,1			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	TOTAL	1.715,5	2.223,5	337,3	386,3	4.662,7	198,7	4.861,4	956,1	5.817,5			
5	JAMBI												
	A. Hutan Primer	1.520,9	119,6	80,7	153,6	1.874,7	-	1.874,7	83,7	1.958,4			
	- Hutan lahan kering primer	1.520,9	119,6	80,7	153,6	1.874,7	-	1.874,7	83,7	1.958,4			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	1.615,7	33,0	750,9	820,2	3.219,9	-	3.219,9	288,7	3.508,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	1.615,7	33,0	750,9	529,0	2.928,6	-	2.928,6	284,4	3.213,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	0,0	-	291,3	291,3	-	291,3	4,2	295,5			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	3.136,6	152,6	831,6	973,9	5.094,6	-	5.094,6	372,3	5.467,0			
6	SUMATERA SELATAN												
	A. Hutan Primer	35,2	113,0	-	-	148,2	-	148,2	45,0	193,2			
	- Hutan lahan kering primer	26,0	113,0	-	-	138,9	-	138,9	-	138,9			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	9,3	-	-	-	9,3	-	9,3	45,0	54,3			
	B. Hutan Sekunder	101,1	1.681,1	230,5	44,1	2.056,8	-	2.056,8	497,5	2.554,3			
	- Hutan lahan kering sekunder	101,1	549,6	207,9	10,7	869,3	-	869,3	165,8	1.035,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	11,0	22,6	31,8	65,4	-	65,4	46,3	111,8			
	- Hutan mangrove sekunder	-	1.120,6	-	1,5	1.122,1	-	1.122,1	285,4	1.407,4			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(2.341,6)	(2.341,6)	-	(2.341,6)	(2,0)	(2.343,6)			
	TOTAL	136,3	1.794,1	230,5	(2.297,5)	(136,6)	-	(136,6)	540,5	403,9			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												
	A. Hutan Primer	-	12,9	-	34,0	46,9	-	46,9	2,5	49,4			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	12,9	-	34,0	46,9	-	46,9	2,5	49,4			
	B. Hutan Sekunder	12,6	327,6	-	1.296,7	1.636,9	-	1.636,9	528,7	2.165,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	12,6	47,7	-	651,1	711,4	-	711,4	301,9	1.013,3			
	- Hutan rawa sekunder	-	160,0	-	622,4	782,3	-	782,3	136,7	919,0			
	- Hutan mangrove sekunder	-	119,9	-	23,3	143,2	-	143,2	90,1	233,3			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	12,6	340,5	-	1.330,7	1.683,8	-	1.683,8	531,3	2.215,0			
8	BENGKULU												
	A. Hutan Primer	241,7	352,4	31,1	-	625,2	-	625,2	0,4	625,6			
	- Hutan lahan kering primer	241,7	352,4	31,1	-	625,2	-	625,2	0,4	625,6			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	272,4	614,3	2.140,8	770,7	3.798,1	9,0	3.807,1	329,7	4.136,8			
	- Hutan lahan kering sekunder	272,4	614,3	2.140,8	770,7	3.798,1	9,0	3.807,1	329,7	4.136,8			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	514,1	966,6	2.171,9	770,7	4.423,3	9,0	4.432,3	330,0	4.762,4			
9	LAMPUNG												
	A. Hutan Primer	136,7	14,9	7,9	-	159,5	-	159,5	-	159,5			
	- Hutan lahan kering primer	136,7	14,9	7,9	-	159,5	-	159,5	-	159,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	28,7	341,9	27,5	-	398,1	-	398,1	66,1	464,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	28,7	341,9	27,5	-	398,1	-	398,1	33,2	431,3			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	32,9	32,9			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	165,4	356,8	35,4	-	557,6	-	557,6	66,1	623,7			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP						HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
10	KEPULAUAN RIAU												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	13,5	28,1	30,7	72,4	19,5	91,8	298,1	390,0			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	13,5	27,0	30,0	70,6	19,5	90,1	288,0	378,0			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	1,1	0,7	1,8	-	1,8	7,5	9,3			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	13,5	28,1	30,7	72,4	19,5	91,8	298,1	390,0			
11	BANTEN												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	(31,2)	(31,2)			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	(31,2)	(31,2)			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	3,5	3,5	-	3,5	3,8	7,3			
	TOTAL	-	-	-	3,5	3,5	-	3,5	(27,4)	(23,9)			
12	DKI JAKARTA												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP						HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
13	JAWA BARAT												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	-	5,2	-	5,2	-	5,2	-	5,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	5,2	-	5,2	-	5,2	-	5,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	23,9	73,3	97,1	-	97,1	127,9	225,0			
	TOTAL	-	-	29,0	73,3	102,3	-	102,3	127,9	230,1			
14	JAWA TENGAH												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	6,2	74,2	92,1	24,4	196,8	-	196,8	(585,1)	(388,3)			
	- Hutan lahan kering sekunder	6,2	74,2	92,1	6,0	178,5	-	178,5	44,9	223,4			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	18,3	18,3	-	18,3	(630,0)	(611,7)			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	3,2	9,8	13,0	-	13,0	0,0	13,0			
	TOTAL	6,2	74,2	95,3	34,2	209,9	-	209,9	(585,1)	(375,2)			
15	D.I. YOGYAKARTA												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP						HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
16	JAWA TIMUR												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9			
17	KALIMANTAN BARAT												
	A. Hutan Primer	16,0	99,0	668,6	8,7	792,3	-	792,3	-	792,3			
	- Hutan lahan kering primer	16,0	99,0	668,6	8,7	792,3	-	792,3	-	792,3			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	68,4	702,7	2.119,8	2.957,0	5.847,9	138,8	5.986,7	2.723,4	8.710,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	52,4	625,7	2.098,3	728,6	3.505,0	10,9	3.515,8	1.383,3	4.899,1			
	- Hutan rawa sekunder	16,0	21,8	11,4	2.222,6	2.271,8	127,9	2.399,8	1.238,8	3.638,5			
	- Hutan mangrove sekunder	-	55,2	10,1	5,8	71,1	-	71,1	101,3	172,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(120,1)	(1.530,1)	(1.650,1)	-	(1.650,1)	(6,6)	(1.656,7)			
	TOTAL	84,4	801,8	2.668,3	1.435,7	4.990,1	138,8	5.128,9	2.716,8	7.845,7			
18	KALIMANTAN SELATAN												
	A. Hutan Primer	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0			
	- Hutan lahan kering primer	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	288,3	159,9	351,5	799,6	17,5	817,0	98,8	915,8			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	288,3	159,9	351,5	799,6	17,5	817,0	86,1	903,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,6			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(183,6)	(183,6)	-	(183,6)	(600,3)	(783,9)			
	TOTAL	-	291,2	159,9	167,8	618,9	17,5	636,4	(501,5)	134,9			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
19	KALIMANTAN TENGAH												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	7,2	95,5	1.196,3	11.172,6	12.471,7	2.167,0	14.638,7	1.726,2	16.364,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	95,5	1.196,3	9.003,1	10.295,0	813,9	11.108,9	888,8	11.997,7			
	- Hutan rawa sekunder	7,2	-	-	2.169,5	2.176,7	1.344,0	3.520,7	837,4	4.358,1			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	9,1	9,1	-	9,1			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(4.800,5)	(4.800,5)	-	(4.800,5)	-	(4.800,5)			
	TOTAL	7,2	95,5	1.196,3	6.372,1	7.671,2	2.167,0	9.838,2	1.726,2	11.564,4			
20	KALIMANTAN TIMUR												
	A. Hutan Primer	-	22,0	16,1	-	38,1	-	38,1	12,3	50,4			
	- Hutan lahan kering primer	-	22,0	16,1	-	38,1	-	38,1	12,3	50,4			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	59,2	148,3	888,5	4.088,9	5.184,9	269,3	5.454,2	4.739,4	10.193,7			
	- Hutan lahan kering sekunder	5,6	148,3	888,5	3.909,1	4.951,5	269,3	5.220,8	4.507,1	9.727,9			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	138,7	138,7			
	- Hutan mangrove sekunder	53,6	-	-	179,8	233,4	-	233,4	93,7	327,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(1.523,5)	(1.523,5)	727,4	(796,0)	42,6	(753,5)			
	TOTAL	59,2	170,3	904,6	2.565,5	3.699,6	996,7	4.696,3	4.794,3	9.490,6			
21	KALIMANTAN UTARA												
	A. Hutan Primer	6,6	-	103,8	5,4	115,8	-	115,8	59,5	175,3			
	- Hutan lahan kering primer	6,6	-	103,8	-	110,4	-	110,4	53,4	163,7			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	5,4	5,4	-	5,4	-	5,4			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1			
	B. Hutan Sekunder	1,6	28,0	349,0	325,3	703,9	78,7	782,6	3.331,0	4.113,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	1,6	28,0	349,0	257,8	636,4	67,8	704,2	349,5	1.053,7			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	4,9	4,9	-	4,9	2.960,4	2.965,3			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	62,6	62,6	10,9	73,5	21,1	94,6			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(20,6)	(20,6)	-	(20,6)	-	(20,6)			
	TOTAL	8,1	28,0	452,9	310,2	799,1	78,7	877,8	3.390,4	4.268,3			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
22	SULAWESI UTARA												
	A. Hutan Primer	11,2	11,2	23,0	11,6	57,1	-	57,1	6,0	63,1			
	- Hutan lahan kering primer	11,2	11,2	23,0	11,6	57,1	-	57,1	6,0	63,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	2,7	4,8	219,6	2,9	230,1	8,0	238,1	83,4	321,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	2,7	4,8	219,6	2,9	230,1	8,0	238,1	83,4	321,5			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	13,9	16,1	242,6	14,6	287,2	8,0	295,2	89,4	384,6			
22	GORONTALO												
	A. Hutan Primer	13,8	-	18,1	-	32,0	-	32,0	-	32,0			
	- Hutan lahan kering primer	13,8	-	18,1	-	32,0	-	32,0	-	32,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	4,9	24,2	178,6	11,2	218,8	3,6	222,4	83,2	305,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	4,9	7,8	178,6	11,2	202,5	3,6	206,0	45,5	251,6			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	16,4	-	-	16,4	-	16,4	37,7	54,1			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	18,7	24,2	196,7	11,2	250,8	3,6	254,3	83,2	337,6			
24	SULAWESI TENGAH												
	A. Hutan Primer	1,4	66,3	487,1	59,2	614,0	88,5	702,4	104,3	806,7			
	- Hutan lahan kering primer	1,4	66,3	487,1	59,2	614,0	88,5	702,4	104,3	806,7			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	94,2	288,1	922,7	532,3	1.837,4	944,7	2.782,1	2.165,8	4.947,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	94,2	288,1	922,7	532,3	1.837,4	944,7	2.782,1	2.164,4	4.946,5			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-	5,9			
	TOTAL	95,6	354,4	1.415,8	591,5	2.457,2	1.033,2	3.490,4	2.270,1	5.760,5			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN											APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
25	SULAWESI TENGGARA													
	A. Hutan Primer	-	34,0	33,1	3,8	70,9	-	70,9	6,0	77,0				
	- Hutan lahan kering primer	-	34,0	33,1	3,8	70,9	-	70,9	6,0	77,0				
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	B. Hutan Sekunder	48,4	1.744,7	644,1	185,4	2.622,6	7,2	2.629,8	910,6	3.540,4				
	- Hutan lahan kering sekunder	48,4	80,4	644,1	175,8	948,7	7,2	955,9	442,2	1.398,1				
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	9,6	9,6	-	9,6	-	9,6				
	- Hutan mangrove sekunder	-	1.664,3	-	-	1.664,3	-	1.664,3	468,4	2.132,7				
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL	48,4	1.778,7	677,2	189,2	2.693,6	7,2	2.700,7	916,6	3.617,4				
26	SULAWESI BARAT													
	A. Hutan Primer	-	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5				
	- Hutan lahan kering primer	-	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5				
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	B. Hutan Sekunder	-	60,4	123,2	130,8	314,4	12,9	327,3	75,9	403,2				
	- Hutan lahan kering sekunder	-	60,4	123,2	130,8	314,4	12,9	327,3	75,9	403,2				
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL	-	62,9	123,2	130,8	316,9	12,9	329,8	75,9	405,7				
27	SULAWESI SELATAN													
	A. Hutan Primer	12,1	80,5	38,1	-	130,7	-	130,7	-	130,7				
	- Hutan lahan kering primer	12,1	80,5	38,1	-	130,7	-	130,7	-	130,7				
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	B. Hutan Sekunder	4,8	378,0	249,2	78,2	710,1	-	710,1	239,3	949,5				
	- Hutan lahan kering sekunder	4,8	378,0	249,2	78,2	710,1	-	710,1	239,3	949,5				
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTAL	16,9	458,5	287,3	78,2	840,9	-	840,9	239,3	1.080,2				

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP						HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
28	BALI												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	2,0	53,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	-	51,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	2,0	53,2			
29	NUSA TENGGARA BARAT												
	A. Hutan Primer	-	67,5	23,0	8,6	99,0	-	99,0	-	99,0			
	- Hutan lahan kering primer	-	67,5	23,0	8,6	99,0	-	99,0	-	99,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	354,8	1.520,0	1.542,0	1.285,8	4.702,6	-	4.702,6	1.566,5	6.269,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	354,8	1.520,0	1.530,9	1.285,8	4.691,6	-	4.691,6	1.507,6	6.199,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	11,0	-	11,0	-	11,0	58,9	70,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	6,4	8,6	13,9	28,8	-	28,8	14,3	43,0			
	TOTAL	354,8	1.593,8	1.573,5	1.308,2	4.830,4	-	4.830,4	1.580,8	6.411,1			
30	NUSA TENGGARA TIMUR												
	A. Hutan Primer	37,2	197,3	55,3	88,1	377,9	-	377,9	223,3	601,3			
	- Hutan lahan kering primer	36,5	197,3	55,3	88,1	377,2	-	377,2	197,4	574,6			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	0,7	-	-	-	0,7	-	0,7	26,0	26,7			
	B. Hutan Sekunder	23,8	716,1	189,1	349,0	1.278,0	-	1.278,0	2.065,4	3.343,4			
	- Hutan lahan kering sekunder	23,8	716,1	189,1	349,0	1.278,0	-	1.278,0	2.041,9	3.320,0			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	23,5	23,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	61,1	913,4	244,4	437,1	1.656,0	-	1.656,0	2.288,8	3.944,7			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
31	MALUKU UTARA												
	A. Hutan Primer	14,8	39,7	56,6	1,1	112,2	-	112,2	4,4	116,7			
	- Hutan lahan kering primer	14,8	39,7	56,6	1,1	112,2	-	112,2	-	112,2			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,4			
	B. Hutan Sekunder	20,2	127,3	283,8	894,9	1.326,1	880,5	2.206,6	342,5	2.549,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	20,2	127,3	283,8	894,9	1.326,1	880,5	2.206,6	342,5	2.549,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	35,0	167,0	340,4	896,0	1.438,3	880,5	2.318,8	346,9	2.665,7			
32	MALUKU												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	174,1	98,4	990,3	1.262,9	147,9	1.410,8	50,5	1.461,3			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	174,1	98,4	980,2	1.252,8	133,3	1.386,1	50,5	1.436,6			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	10,1	10,1	14,6	24,8	-	24,8			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	174,1	98,4	990,3	1.262,9	149,8	1.412,7	50,5	1.463,2			
	PAPUA												
	A. Hutan Primer	119,9	23,2	691,4	-	834,5	282,2	1.116,7	366,8	1.483,5			
	- Hutan lahan kering primer	119,9	23,2	28,7	-	171,8	14,9	186,7	365,8	552,4			
	- Hutan rawa primer	-	-	662,7	-	662,7	267,4	930,1	1,0	931,1			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	67,0	44,0	515,9	1.490,4	2.117,2	528,1	2.645,3	1.242,7	3.888,0			
	- Hutan lahan kering sekunder	67,0	12,0	352,5	26,7	458,2	481,9	940,1	1.030,7	1.970,8			
	- Hutan rawa sekunder	-	31,9	163,4	1.463,7	1.659,0	46,2	1.705,2	205,0	1.910,2			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(839,5)	(839,5)	-	(839,5)	-	(839,5)			
	TOTAL	186,8	67,1	1.207,3	650,9	2.112,2	810,4	2.922,5	1.609,4	4.532,0			

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP						HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
34	PAPUA BARAT												
	A. Hutan Primer	30,3	-	5,8	12,5	48,6	-	48,6	-	48,6			
	- Hutan lahan kering primer	30,3	-	5,8	-	36,1	-	36,1	-	36,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	12,5	12,5	-	12,5	-	12,5			
	B. Hutan Sekunder	20,3	38,8	28,8	65,2	153,2	98,3	251,5	334,0	585,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	4,7	5,3	28,7	-	38,7	98,3	137,0	332,3	469,4			
	- Hutan rawa sekunder	-	30,6	-	-	30,6	-	30,6	-	30,6			
	- Hutan mangrove sekunder	15,6	3,0	0,2	65,2	83,9	-	83,9	1,7	85,6			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(364,5)	(364,5)	(10,5)	(375,0)	-	(375,0)			
	TOTAL	50,6	38,8	34,6	(286,8)	(162,7)	87,8	(74,8)	334,0	259,2			
	INDONESIA												
	A. Hutan Primer	3.514,5	2.828,5	2.703,9	634,7	9.681,5	372,6	10.054,1	1.233,3	11.287,4			
	- Hutan lahan kering primer	3.335,0	2.815,6	2.041,2	570,9	8.762,7	105,2	8.867,9	1.076,4	9.944,3			
	- Hutan rawa primer	169,5	-	662,7	17,3	849,4	267,4	1.116,8	72,9	1.189,7			
	- Hutan mangrove primer	10,0	12,9	-	46,5	69,4	-	69,4	84,0	153,4			
	B. Hutan Sekunder	5.325,6	13.869,2	16.530,1	33.125,7	68.850,6	6.196,8	75.047,3	30.158,3	105.205,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	4.807,3	10.393,7	15.067,6	22.527,8	52.796,4	4.116,0	56.912,4	21.921,6	78.834,0			
	- Hutan rawa sekunder	368,5	294,5	1.129,9	9.782,9	11.575,8	1.977,4	13.553,2	7.091,3	20.644,5			
	- Hutan mangrove sekunder	149,8	3.181,0	332,5	815,0	4.478,4	103,4	4.581,8	1.145,4	5.727,2			
	C. Hutan Tanaman*	-	6,4	(136,9)	(12.557,5)	(12.688,0)	716,9	(11.971,1)	(489,0)	(12.460,0)			
	TOTAL	8.840,0	16.704,0	19.097,0	21.202,9	65.844,0	7.286,3	73.130,4	30.902,6	104.032,9			

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL I.3. DATA POTENSI SUMBER DAYA HUTAN INDONESIA DARI PLOT INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

A. Volume Tegakan Pohon Diameter 5 cm up, 20 cm up, 50 cm up, per Provinsi

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Volume Tegakan Pohon Diameter 5 Cm up (m3/ha)					Volume Tegakan Pohon Diameter 20 Cm up (m3/ha)					Volume Tegakan Pohon Diameter 50 Cm up (m3/ha)								
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Aoch	Hutan Lahan Kering Primer	36	382,04	156,08	26,01	329,23	434,85	36	316,06	156,64	26,11	263,06	369,06	36	204,72	159,83	26,64	150,64	258,80	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	36	230,85	99,03	16,50	197,34	264,35	36	160,81	91,50	15,25	129,85	191,77	36	81,89	76,28	12,71	56,08	107,70	
		Hutan Rawa Primer	1	513,27	-	-	-	-	1	470,10	-	-	-	-	-	1	428,21	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	2	206,06	216,88	153,36	-	2.154,65	-	2	173,34	213,09	150,68	-	2.087,86	2	106,77	150,99	106,77	-	1.463,36
2	Ball	Hutan Lahan Kering Primer	11	341,64	77,74	23,44	289,41	393,86	11	284,62	76,45	23,05	233,26	335,98	11	178,72	62,59	18,87	136,66	220,77	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	9	143,64	86,16	28,72	77,41	209,87	9	102,63	74,27	24,76	45,53	159,72	9	50,58	54,67	18,22	8,56	92,60	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	12	309,15	123,58	35,67	230,63	387,67	12	252,41	131,28	37,90	169,00	335,82	12	177,14	133,76	38,61	92,15	262,13	
		Hutan Lahan Kering Primer	26	334,68	105,39	20,67	292,12	377,25	26	271,13	105,27	20,65	228,61	313,65	26	167,54	97,24	19,07	128,26	206,82	
4	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Sekunder	22	282,33	131,74	28,09	223,92	340,74	22	225,26	127,36	27,15	168,79	281,72	22	132,87	95,50	20,36	90,53	175,22	
		Hutan Lahan Kering Primer	22	332,89	83,22	17,74	295,99	369,79	22	319,22	83,60	17,82	282,16	356,29	22	214,99	79,37	16,92	179,80	250,18	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	28	251,78	106,54	20,13	210,47	293,10	28	233,42	103,68	19,59	193,22	273,62	28	147,48	95,05	17,96	110,63	184,34	
		Hutan Lahan Kering Primer	21	380,41	140,20	30,59	316,59	444,23	21	317,40	130,56	28,49	257,97	376,83	21	199,53	108,76	23,73	150,03	249,04	
6	Jambi	Hutan Lahan Kering Sekunder	37	249,38	118,80	19,53	209,77	288,99	37	185,75	108,33	17,81	149,63	221,87	37	93,35	78,65	12,93	67,13	119,58	
		Hutan Rawa Primer	5	327,47	152,31	68,12	138,35	516,60	5	214,19	113,18	50,62	73,65	354,72	5	77,88	53,08	23,74	11,98	143,79	
		Hutan Rawa Sekunder	4	146,45	100,36	50,18	-	306,15	4	80,46	57,23	28,62	-	171,53	4	31,34	21,09	10,55	-	64,90	
		Hutan Lahan Kering Primer	4	378,16	80,37	40,19	250,27	506,05	4	332,71	78,37	39,19	208,00	457,41	4	212,18	82,94	41,47	80,20	344,16	
7	Jawa Barat	Hutan Lahan Kering Sekunder	27	220,33	113,88	21,92	175,28	265,38	27	172,82	109,38	21,05	129,55	216,09	27	95,49	73,84	14,21	66,28	124,70	
		Hutan Tanaman	5	264,82	141,64	63,34	88,96	440,68	5	218,30	121,17	54,19	67,85	368,75	5	117,83	106,05	47,43	-	249,51	
		Hutan Lahan Kering Primer	1	249,94	-	-	-	-	1	185,94	-	-	-	-	-	1	112,15	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Sekunder	6	180,54	49,12	20,05	128,99	232,09	6	143,40	43,50	17,76	97,75	189,05	6	73,22	47,71	19,48	23,15	123,29	
9	Jawa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	6	467,00	182,82	74,64	275,14	658,86	6	420,41	182,81	74,63	228,57	612,26	6	333,60	184,81	75,45	139,85	527,75	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	51	243,98	138,43	19,38	205,05	282,91	51	202,50	133,26	18,66	165,02	239,98	51	146,51	119,00	16,66	113,04	179,98	
		Hutan Tanaman	1	237,90	-	-	-	-	1	214,32	-	-	-	-	-	1	143,47	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Primer	95	380,04	114,75	11,77	356,67	403,42	95	294,42	117,96	12,10	270,39	318,45	95	190,00	103,38	10,61	168,94	211,06	
10	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Sekunder	127	260,75	110,53	9,81	241,34	280,16	127	184,82	104,49	9,27	166,47	203,17	127	105,85	86,86	7,71	90,60	121,11	
		Hutan Rawa Primer	1	366,86	-	-	-	-	1	243,45	-	-	-	-	-	1	6,63	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	73	247,49	112,52	13,17	221,24	273,74	73	153,48	105,78	12,38	128,80	178,16	73	61,15	72,03	8,43	44,34	77,96	
		Hutan Lahan Kering Primer	7	365,97	128,67	48,63	246,96	484,97	7	301,27	126,69	47,89	184,10	418,44	7	176,07	114,58	43,31	70,10	282,04	
11	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Sekunder	63	211,37	103,69	13,06	185,26	237,49	63	155,04	96,52	12,16	130,73	179,35	63	80,94	65,55	8,26	64,43	97,45	
		Hutan Rawa Sekunder	1	150,21	-	-	-	-	1	122,86	-	-	-	-	-	1	40,69	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Primer	32	335,68	162,01	28,64	277,27	394,09	32	258,83	153,25	27,09	203,57	314,08	32	177,00	140,16	24,78	126,46	227,53	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	160	255,06	116,41	9,20	236,88	273,23	160	187,25	108,80	8,60	170,26	204,24	160	108,58	82,07	6,49	95,77	121,40	
12	Kalimantan Tengah	Hutan Rawa Primer	5	284,58	88,66	39,65	174,49	394,67	5	199,34	102,73	45,94	71,79	326,89	5	91,36	70,65	31,59	3,64	179,08	
		Hutan Rawa Sekunder	85	202,25	99,57	10,80	180,78	223,73	85	114,98	83,26	9,03	97,02	132,94	85	33,26	39,44	4,28	24,76	41,77	
		Hutan Lahan Kering Primer	30	309,83	132,68	24,22	260,28	359,37	30	236,70	124,89	22,80	190,07	283,34	30	149,27	111,77	20,41	107,53	191,00	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	214	218,90	104,34	7,13	204,84	232,95	214	159,02	97,25	6,65	145,91	172,12	214	88,81	72,02	4,92	79,10	98,51	
13	Kalimantan Timur	Hutan Rawa Primer	1	274,81	-	-	-	-	1	207,07	-	-	-	-	-	1	144,53	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	167,23	75,07	22,64	116,80	217,67	11	97,80	63,29	19,08	55,28	140,32	11	42,08	37,40	11,28	16,95	67,21	
		Hutan Lahan Kering Primer	46	277,77	140,65	20,74	236,00	319,54	46	207,40	136,61	20,14	160,83	241,96	46	127,97	123,76	18,25	91,21	164,72	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	55	236,80	103,64	13,98	210,79	266,82	55	174,89	102,83	13,87	147,09	202,69	55	110,16	86,16	11,62	86,87	133,46	
14	Kalimantan Utara	Hutan Rawa Primer	1	221,12	-	-	-	-	1	145,71	-	-	-	-	-	1	124,83	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	223,42	92,13	27,78	161,52	285,32	11	152,99	89,35	26,94	92,97	213,02	11	46,36	51,04	15,39	12,07	80,65	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	14	155,36	71,49	19,11	114,08	196,64	14	91,75	60,53	16,18	56,81	126,70	14	28,57	36,73	9,82	7,36	49,77	
		Hutan Rawa Sekunder	4	178,10	53,56	26,78	92,88	283,32	4	90,60	34,92	17,46	35,03	146,18	4	35,12	24,74	12,37	-	74,49	
15	Kepulauan Bangka Beilutung	Hutan Lahan Kering Sekunder	48	252,94	110,40	15,94	220,88	284,99	48	184,38	104,84	15,13	153,94	214,83	48	83,82	82,51	11,91	59,86	107,78	
		Hutan Rawa Sekunder	27	370,15	119,54	23,01	322,86	417,44	27	310,12	116,21	22,37	264,15	356,09	27	220,48	108,46	20,87	177,57	263,38	
		Hutan Lahan Kering Primer	23	270,72	125,72	26,21	216,36	325,09	23	207,31	122,72	25,59	154,25	280,38	23	130,70	107,68	22,45	84,13	177,27	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	7	209,90	29,28	11,07	182,82	236,98	7	166,69	17,34	6,55	150,66	182,73	7	78,07	15,59	5,89	63,65	92,48	

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Volume Tegakan Pohon Diameter 5 Cm up (m3/ha)						Volume Tegakan Pohon Diameter 20 Cm up (m3/ha)						Volume Tegakan Pohon Diameter 50 Cm up (m3/ha)					
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	258.75	99.26	26.53	201.44	316.06	14	245.07	98.45	26.31	188.23	301.92	14	151.74	77.84	20.80	106.80	196.68
		Hutan Lahan Kering Sekunder	81	199.93	91.94	10.22	179.60	220.26	81	186.64	91.38	10.15	166.43	206.84	81	109.02	73.10	8.12	92.86	125.19
19	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	239.36	61.54	35.53	86.49	392.23	3	229.00	61.14	35.30	77.11	380.88	3	137.11	40.54	23.41	36.40	237.83
		Hutan Lahan Kering Sekunder	26	211.07	122.02	23.93	161.78	280.35	26	198.62	123.66	24.25	148.67	296.03	26	128.16	88.59	17.37	92.38	163.94
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	61	334.55	112.69	14.43	305.69	363.41	61	267.30	112.18	14.36	238.57	296.03	61	163.98	97.93	12.54	138.90	189.07
		Hutan Lahan Kering Sekunder	42	200.62	94.76	14.62	171.09	230.15	42	134.36	89.55	13.82	106.45	162.26	42	64.04	63.34	9.77	44.30	83.78
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	38	371.70	189.73	30.78	309.34	434.06	38	319.51	190.10	30.84	257.03	382.00	38	231.89	187.12	30.36	170.39	293.40
		Hutan Lahan Kering Sekunder	74	145.47	89.44	10.40	124.75	166.20	74	102.86	82.70	9.61	83.70	122.02	74	49.53	50.50	5.87	37.83	61.23
22	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	96	213.57	86.82	8.86	195.98	231.16	96	192.57	89.19	9.10	174.50	210.64	96	108.25	75.35	7.69	92.99	123.52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	180.38	96.67	10.88	158.73	202.04	79	162.33	96.29	10.83	140.76	183.90	79	84.04	70.59	7.94	68.23	99.85
		Hutan Rawa Primer	61	163.35	94.75	12.13	139.08	187.61	61	148.27	93.32	11.95	124.37	172.17	61	82.95	78.75	10.08	62.79	103.12
		Hutan Rawa Sekunder	35	108.63	69.10	11.68	84.90	132.37	35	93.87	70.45	11.91	69.67	118.07	35	42.61	49.85	8.43	25.49	59.74
23	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	84	243.31	105.09	11.47	220.51	286.12	84	223.16	105.53	11.51	200.26	246.06	84	134.06	87.16	9.51	115.14	152.97
		Hutan Lahan Kering Sekunder	47	202.82	106.99	15.61	171.41	234.24	47	184.17	107.44	15.67	152.63	215.72	47	109.59	87.30	12.73	83.96	135.22
		Hutan Rawa Primer	12	192.89	77.85	22.47	143.42	242.35	12	177.65	77.87	22.48	128.17	227.13	12	115.40	69.74	20.13	71.09	159.71
		Hutan Rawa Sekunder	1	185.74	-	-	-	-	1	167.95	-	-	-	-	1	78.07	-	-	-	-
24	Riau	Hutan Lahan Kering Primer	10	327.70	116.35	36.79	244.46	410.93	10	240.52	121.69	38.48	153.47	327.57	10	100.05	102.23	32.33	26.92	173.19
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	268.98	111.81	15.97	236.87	301.10	49	195.69	105.43	15.06	165.41	225.97	49	94.04	77.09	11.01	71.90	116.18
		Hutan Rawa Primer	8	338.47	140.25	49.59	221.22	455.72	8	265.58	129.28	45.71	157.50	373.66	8	141.01	114.77	40.58	45.05	236.96
		Hutan Rawa Sekunder	110	226.73	101.62	9.69	207.52	245.93	110	150.55	91.01	8.68	133.35	167.75	110	45.15	50.61	4.83	35.58	54.71
25	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	24	287.33	129.16	26.36	232.80	341.87	24	264.33	119.49	24.39	213.88	314.79	24	150.84	100.68	20.55	108.33	193.35
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	170.49	81.03	18.59	131.44	209.55	19	154.00	78.86	18.09	115.99	192.01	19	77.48	57.36	13.16	49.84	105.13
26	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	42	223.49	119.60	18.46	186.22	260.76	42	200.98	112.77	17.40	165.84	236.12	42	96.26	98.01	15.12	65.72	126.80
		Hutan Lahan Kering Sekunder	40	154.66	116.12	18.36	117.53	191.80	40	131.29	107.05	16.93	97.06	165.53	40	68.78	84.42	13.35	41.78	95.78
27	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	121	271.23	112.85	10.26	250.91	291.54	121	212.90	117.47	10.68	191.75	234.04	121	114.98	105.99	9.64	95.91	134.06
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	221.90	87.16	9.40	203.21	240.58	86	170.88	84.32	9.09	152.80	188.96	86	92.28	69.74	7.52	77.32	107.23
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	38	357.52	126.95	20.59	315.79	399.25	38	285.71	126.24	20.48	244.21	327.20	38	172.73	106.77	17.32	137.63	207.82
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	186.77	106.58	13.43	159.93	213.61	63	134.84	99.10	12.49	109.88	159.80	63	64.35	76.80	9.68	45.01	83.69
29	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	14	375.44	133.35	35.64	298.44	452.43	14	360.73	132.68	35.46	284.12	437.33	14	258.18	108.10	28.89	195.76	320.59
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	259.55	94.01	20.04	217.87	301.23	22	238.78	88.60	18.89	199.50	278.07	22	146.83	79.86	17.03	111.42	182.23
30	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	16	386.68	153.69	38.42	304.78	468.57	16	299.03	152.28	38.07	217.89	380.18	16	172.44	133.36	33.34	101.38	243.51
		Hutan Lahan Kering Sekunder	46	231.68	108.33	15.97	199.51	263.85	46	164.17	96.77	14.27	135.44	192.91	46	78.48	73.08	10.78	56.77	100.18
		Hutan Rawa Sekunder	4	111.88	77.40	38.70	-	235.05	4	71.74	76.77	38.39	-	193.90	4	11.62	19.58	9.79	-	42.78
31	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	20	289.23	101.28	22.65	241.83	336.63	20	234.73	91.68	20.50	191.82	277.64	20	133.86	76.23	17.04	98.18	169.53
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	175.00	105.15	16.42	141.82	208.19	41	118.56	97.31	15.20	87.84	149.27	41	55.59	62.28	9.73	35.93	75.25
		Hutan Rawa Primer	1	502.29	-	-	-	-	1	404.63	-	-	-	-	1	194.05	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	21	202.92	127.56	27.84	144.86	260.99	21	156.29	111.53	24.34	105.52	207.06	21	77.92	69.88	15.25	46.12	109.73
32	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	26	399.20	107.47	21.08	355.79	442.60	26	333.73	111.34	21.84	288.76	378.70	26	194.98	104.91	20.57	162.61	237.35
		Hutan Lahan Kering Sekunder	61	271.46	136.15	17.43	236.59	306.33	61	205.91	129.22	16.54	172.81	239.00	61	104.51	95.44	12.22	80.07	128.95
		Hutan Rawa Sekunder	6	215.98	195.77	79.92	10.53	421.44	6	149.24	164.49	67.15	-	321.86	6	64.81	89.75	36.64	-	159.00

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2023

TABEL I.3. DATA POTENSI SUMBER DAYA HUTAN INDONESIA DARI PLOT INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

B. Luas Bidang Dasar Pohon Diameter 5 cm up, 20 cm up, 50 cm up per Provinsi

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Diameter 5 Cm up (m2/ha)					Diameter 20 Cm up (m2/ha)					Diameter 50 Cm up (m2/ha)								
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1		Aceh	Hutan Lahan Kering Primer	36	29.20	9.25	1.54	26.06	32.33	36	21.41	8.84	1.47	18.42	24.40	36	12.42	8.85	1.47	9.43	15.42
		Hutan Lahan Kering Sekunder	36	19.86	7.61	1.27	17.29	22.44	36	11.64	6.16	1.03	9.56	13.73	36	5.19	4.70	0.78	3.60	6.78	
		Hutan Rawa Primer	1	33.41	-	-	-	-	1	28.47	-	-	-	-	1	25.02	-	-	-	-	
		Hutan Rawa Sekunder	2	15.44	13.91	9.83	-	140.39	2	11.46	13.36	9.45	-	131.51	2	5.87	8.30	5.87	-	80.45	
2	Bali	Hutan Lahan Kering Primer	11	26.30	5.37	1.62	22.70	29.91	11	19.56	5.07	1.53	16.15	22.97	11	10.77	3.77	1.14	8.24	13.30	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	9	12.50	6.54	2.18	7.47	17.53	9	7.47	5.06	1.69	3.58	11.35	9	3.12	3.43	1.14	0.49	5.76	
3		Banten	Hutan Lahan Kering Sekunder	12	23.15	7.03	2.03	18.69	27.62	12	16.51	7.50	2.16	11.74	21.21	12	10.26	7.47	2.16	5.51	15.00
4	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Primer	26	26.23	6.51	1.28	23.60	28.87	26	18.67	6.28	1.23	16.13	21.21	26	10.18	5.41	1.06	7.99	12.36	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	22.44	9.06	1.93	18.42	26.46	22	15.71	8.42	1.80	11.98	19.45	22	8.04	5.57	1.19	5.57	10.52	
5		Gorontalo	Hutan Lahan Kering Primer	22	23.15	4.96	1.06	20.95	25.35	22	21.37	4.93	1.05	19.18	23.55	22	12.85	4.29	0.92	10.95	14.75
		Hutan Lahan Kering Sekunder	28	18.38	6.86	1.30	15.72	21.03	28	16.01	6.33	1.20	13.55	18.46	28	8.95	5.26	0.99	6.91	10.99	
6	Jambi	Hutan Lahan Kering Primer	21	28.98	9.71	2.12	24.56	33.40	21	21.48	8.18	1.79	17.75	25.20	21	11.75	6.16	1.35	8.94	14.55	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	37	21.21	8.78	1.44	18.28	24.14	37	13.56	7.32	1.20	11.12	16.00	37	5.90	4.78	0.79	4.30	7.49	
		Hutan Rawa Primer	5	29.51	13.06	5.84	13.30	45.72	5	16.31	8.63	3.86	5.60	27.02	5	5.12	3.28	1.47	1.06	9.19	
		Hutan Rawa Sekunder	4	13.79	9.59	4.80	-	29.05	4	6.08	4.48	2.24	-	13.21	4	2.02	1.40	0.70	-	4.28	
7	Jawa Barat	Hutan Lahan Kering Primer	4	28.39	5.45	2.72	19.72	37.05	4	22.89	5.35	2.68	14.38	31.41	4	13.07	5.22	2.61	4.77	21.38	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	27	18.12	8.30	1.60	14.83	21.40	27	12.34	7.65	1.47	9.31	15.37	27	5.95	4.50	0.87	4.17	7.73	
		Hutan Tanaman	5	21.32	10.41	4.66	8.39	34.25	5	15.73	7.93	3.55	5.88	25.58	5	7.50	6.70	3.00	-	15.81	
8	Jawa Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	1	21.16	-	-	-	-	1	13.31	-	-	-	-	1	6.99	-	-	-	-	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	6	14.83	3.43	1.40	11.24	18.43	6	10.34	2.38	0.97	7.85	12.84	6	4.48	2.61	1.07	1.74	7.22	
9		Jawa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	6	31.08	10.33	4.22	20.24	41.92	6	25.44	10.04	4.10	14.91	35.97	6	18.38	9.99	4.08	7.90	28.85
		Hutan Lahan Kering Sekunder	51	17.86	8.73	1.22	15.40	20.32	51	12.87	7.74	1.08	10.69	15.04	51	8.23	6.35	0.89	6.45	10.02	
		Hutan Tanaman	1	17.77	-	-	-	-	1	15.01	-	-	-	-	1	9.08	-	-	-	-	
10	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Primer	95	30.31	7.78	0.80	28.72	31.89	95	20.17	7.49	0.77	18.64	21.70	95	11.62	6.11	0.63	10.38	12.87	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	127	22.05	8.18	0.73	20.61	23.49	127	13.03	6.78	0.60	11.84	14.22	127	6.53	5.17	0.46	5.63	7.44	
		Hutan Rawa Primer	1	34.96	-	-	-	-	-	1	20.11	-	-	-	-	1	0.46	-	-	-	-
11	Kalimantan Selatan	Hutan Rawa Sekunder	73	22.82	8.83	1.03	20.76	24.88	73	11.53	7.41	0.87	9.80	13.26	73	3.80	4.32	0.51	2.79	4.81	
		Hutan Lahan Kering Primer	7	28.66	8.29	3.13	21.00	36.33	7	20.84	7.67	2.90	13.74	27.93	7	10.63	6.34	2.40	4.77	16.49	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	17.84	7.64	0.96	15.92	19.76	63	11.12	6.62	0.83	9.45	12.79	63	5.03	3.96	0.50	4.03	6.02	
		Hutan Rawa Sekunder	1	12.56	-	-	-	-	1	9.45	-	-	-	-	1	2.66	-	-	-	-	
12	Kalimantan Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	32	26.70	10.99	1.94	22.74	30.66	32	17.42	9.53	1.68	13.98	20.86	32	10.75	8.35	1.48	7.73	13.76	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	160	21.39	8.78	0.69	20.02	22.76	160	13.16	7.34	0.58	12.01	14.30	160	6.66	4.91	0.39	5.89	7.43	
		Hutan Rawa Primer	5	24.94	5.84	2.52	17.94	31.94	5	14.73	7.22	3.23	5.77	23.69	5	5.72	4.38	1.96	0.28	11.16	
		Hutan Rawa Sekunder	85	19.73	8.97	0.97	17.80	21.67	85	9.05	6.41	0.70	7.67	10.43	85	2.16	2.50	0.27	1.62	2.70	
13	Kalimantan Timur	Hutan Lahan Kering Primer	30	24.91	8.89	1.62	21.59	28.23	30	16.33	7.68	1.40	13.47	19.20	30	9.16	6.49	1.18	6.73	11.58	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	214	18.34	7.67	0.52	17.31	19.37	214	11.31	6.58	0.45	10.43	12.20	214	5.54	4.38	0.30	4.95	6.13	
		Hutan Rawa Primer	1	21.94	-	-	-	-	-	1	13.72	-	-	-	-	1	8.47	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	15.50	6.44	1.94	11.17	19.82	11	7.32	4.84	1.46	4.07	10.58	11	2.67	2.34	0.70	1.10	4.23	
14	Kalimantan Utara	Hutan Lahan Kering Primer	46	22.72	9.09	1.34	20.02	25.42	46	13.89	8.34	1.23	11.42	16.37	46	7.91	7.28	1.07	5.75	10.07	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	55	19.50	7.05	0.95	17.59	21.40	55	12.10	6.50	0.88	10.34	13.86	55	6.79	4.95	0.67	5.45	8.13	
		Hutan Rawa Primer	1	16.26	-	-	-	-	-	1	6.62	-	-	-	-	1	4.91	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	19.97	7.94	2.39	14.63	25.31	11	11.68	6.77	2.04	7.13	16.23	11	2.88	2.88	0.87	0.94	4.81	
15	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan Lahan Kering Sekunder	14	14.96	5.97	1.60	11.52	18.41	14	7.13	4.42	1.18	4.58	9.68	14	1.76	2.12	0.57	0.53	2.98	
		Hutan Rawa Sekunder	4	17.50	6.04	3.02	7.89	27.12	4	6.92	2.57	1.29	2.83	11.01	4	2.25	1.57	0.79	-	4.75	
16		Kepulauan Riau	Hutan Lahan Kering Sekunder	48	22.00	8.25	1.19	19.60	24.39	48	13.63	7.00	1.01	11.59	15.66	48	5.16	4.93	0.71	3.73	6.59
17	Lampung	Hutan Lahan Kering Primer	27	27.50	7.53	1.45	24.52	30.48	27	20.39	6.85	1.32	17.68	23.10	27	12.98	5.93	1.14	10.64	15.33	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	23	21.61	8.61	1.80	17.88	25.33	23	14.17	7.66	1.60	10.86	17.49	23	7.77	6.22	1.30	5.08	10.46	
		Hutan Rawa Sekunder	7	17.71	3.36	1.27	14.61	20.82	7	12.43	1.50	0.57	11.04	13.82	7	4.97	0.90	0.34	4.14	5.80	
18	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	18.85	6.78	1.81	14.93	22.76	14	17.05	6.65	1.78	13.21	20.89	14	9.44	4.77	1.27	6.68	12.19	

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Diameter 5 Cm up (m2/ha)					Diameter 20 Cm up (m2/ha)					Diameter 50 Cm up (m2/ha)								
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	
18	Maluku 2	3	81	14.85	6.14	0.68	13.49	16.21	81	13.10	6.05	0.67	11.77	14.44	15	16	17	18	19	20	21
19	Maluku Utara		3	17.44	4.26	2.46	6.87	28.02	3	16.16	4.33	2.50	5.40	26.91	3	8.77	2.70	1.56	2.07	15.47	7.75
20	Nusa Tenggara Barat		26	15.38	8.19	1.61	12.07	18.68	26	13.76	8.37	1.64	10.38	17.14	26	7.99	5.47	1.07	5.78	10.20	
21	Nusa Tenggara Timur		61	26.59	7.35	0.94	24.71	28.48	61	18.44	6.84	0.88	16.69	20.19	61	9.82	5.51	0.71	8.41	11.23	
22	Papua		42	17.88	7.30	1.13	15.60	20.15	42	9.85	6.14	0.95	7.94	11.77	42	3.91	3.65	0.56	2.77	5.05	
23	Papua Barat		38	26.84	10.98	1.78	23.23	30.44	38	20.54	10.56	1.71	17.06	24.01	38	13.33	10.02	1.63	10.04	16.82	
24	Riau		74	12.64	7.13	0.83	10.98	14.29	74	7.55	5.88	0.68	6.19	8.91	74	3.13	3.19	0.37	2.39	3.87	
25	Sulawesi Barat		96	16.48	5.73	0.58	15.32	17.65	96	13.69	5.91	0.60	12.49	14.89	96	6.73	4.49	0.46	5.82	7.64	
26	Sulawesi Selatan		79	14.20	6.64	0.75	12.71	15.68	79	11.77	6.51	0.73	10.31	13.23	79	5.26	4.26	0.48	4.31	6.22	
27	Sulawesi Tengah		61	12.48	6.50	0.83	10.81	14.14	61	10.48	6.22	0.80	8.89	12.08	61	5.08	4.63	0.59	3.90	6.27	
28	Sulawesi Tenggara		35	8.83	4.87	0.82	7.16	10.51	35	6.91	4.93	0.83	5.22	8.60	35	2.66	2.99	0.51	1.63	3.69	
29	Sumatera Barat		84	18.24	6.79	0.74	16.77	19.71	84	15.52	6.81	0.74	14.05	17.00	84	8.20	5.08	0.55	7.10	9.30	
30	Sumatera Selatan		47	15.28	6.95	1.01	13.24	17.32	47	12.79	6.94	1.01	10.75	14.82	47	6.67	5.16	0.75	5.15	8.18	
31	Sumatera Utara		12	14.16	5.36	1.55	10.75	17.57	12	12.11	5.09	1.47	8.88	15.34	12	7.09	4.16	1.20	4.44	9.73	
32	Sumatera Utara		1	14.78	-	-	-	-	1	12.47	-	-	-	-	1	5.00	-	-	-	-	-
33	Sumatera Utara		10	28.48	7.55	2.39	23.08	33.87	10	18.01	8.20	2.59	12.15	23.88	10	6.39	6.54	2.07	1.71	11.07	
34	Sumatera Utara		49	23.06	8.18	1.17	20.72	25.41	49	14.34	7.13	1.02	12.29	16.38	49	5.93	4.67	0.67	4.58	7.47	
35	Sumatera Utara		8	28.15	9.90	3.50	19.87	36.42	8	19.36	8.29	2.93	12.42	26.29	8	9.01	7.13	2.52	3.06	14.97	
36	Sumatera Utara		110	20.74	8.49	0.81	19.13	22.34	110	11.72	6.76	0.64	10.45	13.00	110	2.95	3.22	0.31	2.34	3.56	
37	Sumatera Utara		24	21.45	9.31	1.90	17.52	25.38	24	18.59	7.79	1.59	15.30	21.88	24	9.40	6.04	1.23	6.85	11.95	
38	Sumatera Utara		19	13.41	5.78	1.33	10.63	16.19	19	11.29	5.43	1.25	8.68	13.91	19	4.98	3.64	0.84	3.22	6.73	
39	Sumatera Utara		42	17.36	8.35	1.29	14.76	19.96	42	14.59	7.22	1.11	12.34	16.84	42	6.05	5.77	0.89	4.26	7.85	
40	Sumatera Utara		40	12.39	8.10	1.28	9.80	14.98	40	9.46	7.10	1.12	7.19	11.73	40	4.26	5.00	0.79	2.66	5.86	
41	Sumatera Utara		121	21.88	7.10	0.65	20.61	23.16	121	15.06	7.22	0.66	13.76	16.36	121	7.01	6.14	0.56	5.90	8.11	
42	Sumatera Utara		86	18.21	6.25	0.67	16.87	19.55	86	12.20	5.50	0.59	11.02	13.38	86	5.75	4.15	0.45	4.86	6.64	
43	Sumatera Utara		38	28.26	8.76	1.42	25.38	31.14	38	19.89	8.19	1.33	17.20	22.59	38	10.70	6.41	1.04	8.60	12.81	
44	Sumatera Utara		63	15.94	7.60	0.96	14.03	17.86	63	9.81	6.40	0.81	8.20	11.43	63	4.01	4.40	0.55	2.90	5.12	
45	Sumatera Utara		14	25.61	8.63	2.31	20.63	30.59	14	23.76	8.51	2.28	18.85	28.68	14	15.36	6.27	1.68	11.74	18.98	
46	Sumatera Utara		22	19.02	6.20	1.32	16.27	21.77	22	16.50	5.45	1.16	14.08	18.92	22	8.94	4.69	1.00	6.86	11.02	
47	Sumatera Utara		16	31.01	10.49	2.62	25.42	36.60	16	21.06	9.70	2.43	15.89	26.23	16	10.77	7.90	1.98	6.56	14.98	
48	Sumatera Utara		46	19.80	8.23	1.21	17.36	22.25	46	12.01	6.55	0.97	10.06	13.96	46	5.01	4.49	0.66	3.68	6.34	
49	Sumatera Utara		4	10.43	6.55	3.27	0.01	20.85	4	5.83	6.44	3.22	-	16.07	4	0.80	1.34	0.67	-	2.93	
50	Sumatera Utara		20	22.96	7.19	1.61	19.60	26.33	20	16.48	5.93	1.33	13.70	19.25	20	8.22	4.50	1.01	6.12	10.33	
51	Sumatera Utara		41	15.48	8.06	1.26	12.94	18.03	41	8.69	6.76	1.06	6.56	10.82	41	3.43	3.71	0.58	2.26	4.60	
52	Sumatera Utara		1	39.92	-	-	-	-	1	28.91	-	-	-	-	1	11.87	-	-	-	-	-
53	Sumatera Utara		21	17.05	10.22	2.23	12.39	21.70	21	11.43	7.90	1.72	7.83	15.02	21	4.93	4.33	0.94	2.96	6.90	
54	Sumatera Utara		26	31.43	7.02	1.38	28.59	34.26	26	23.63	7.23	1.42	20.71	26.55	26	12.33	6.45	1.26	9.73	14.94	
55	Sumatera Utara		61	22.49	9.81	1.26	19.97	25.00	61	14.78	8.61	1.10	12.57	16.98	61	6.44	5.56	0.71	5.02	7.87	
56	Sumatera Utara		6	18.60	14.99	6.12	2.87	34.33	6	11.04	11.72	4.78	-	23.34	6	4.16	5.82	2.37	-	10.26	

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2023

TABEL I.3. DATA POTENSI SUMBER DAYA HUTAN INDONESIA DARI PLOT INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

C. Kerapatan Jenis Pohon Diameter 5 cm up, 20 cm up, 50 cm up per Provinsi

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Diameter 5 Cm up (Individu/ha)					Diameter 20 Cm up (Individu/ha)					Diameter 50 Cm up (Individu/ha)								
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Aceh	Hutan Lahan Kering Primer	36	214,58	53,66	8,94	196,43	232,74	36	126,22	36,88	6,15	113,74	138,70	36	31,06	15,59	2,60	25,78	36,33	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	36	176,44	65,67	10,95	154,22	198,66	36	89,03	38,93	6,49	75,86	102,20	36	15,08	12,69	2,12	10,79	19,38	
		Hutan Rawa Primer	1	138,00	-	-	-	-	1	90,00	-	-	-	-	-	1	50,00	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	2	137,00	87,68	62,00	-	924,78	2	84,00	69,30	49,00	-	706,60	2	9,50	13,44	9,50	-	130,21	
2	Bali	Hutan Lahan Kering Primer	11	214,64	45,89	13,83	183,81	245,46	11	135,36	34,47	10,39	112,21	158,52	11	26,45	9,79	2,95	19,88	33,03	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	9	139,11	53,26	17,75	98,17	180,05	9	64,44	29,30	9,77	41,93	86,96	9	8,00	9,54	3,18	0,67	15,33	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	12	173,25	55,10	15,91	138,24	208,26	12	99,25	38,61	11,15	74,72	123,78	12	21,17	13,09	3,78	12,85	29,49	
		Hutan Lahan Kering Primer	26	214,50	47,42	9,30	195,35	233,65	26	124,42	34,25	6,72	110,59	138,26	26	25,65	11,01	2,16	21,21	30,10	
4	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Sekunder	22	193,50	72,80	15,52	161,22	225,78	22	115,95	57,47	12,25	90,47	141,44	22	20,50	12,60	2,69	14,92	26,08	
		Hutan Lahan Kering Primer	22	195,32	39,10	8,34	177,98	212,66	22	128,36	30,24	6,45	114,96	141,77	22	31,05	8,30	1,77	27,37	34,72	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	28	178,21	67,71	12,80	151,96	204,47	28	105,93	42,77	8,08	89,35	122,51	28	22,86	11,11	2,10	18,55	27,17	
		Hutan Lahan Kering Primer	21	236,29	88,16	19,24	196,16	276,41	21	145,00	52,09	11,37	121,29	168,71	21	27,00	14,00	3,06	20,63	33,37	
6	Jambi	Hutan Lahan Kering Sekunder	37	212,24	77,27	12,70	186,48	238,01	37	112,49	49,38	8,12	96,02	128,95	37	17,14	12,37	2,03	13,01	21,26	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	5	277,00	109,70	49,06	140,79	413,21	5	146,00	83,14	37,18	42,77	249,23	5	17,80	8,70	3,89	7,00	28,60	
		Hutan Rawa Sekunder	4	139,50	83,38	41,69	6,82	272,18	4	55,75	44,87	22,43	-	127,14	4	6,25	4,72	2,36	-	13,76	
		Hutan Lahan Kering Primer	4	221,75	29,01	14,51	175,59	267,91	4	144,00	38,14	19,07	83,31	204,69	4	33,25	15,67	7,84	8,31	58,19	
7	Jawa Barat	Hutan Lahan Kering Sekunder	27	174,52	70,36	13,54	146,69	202,35	27	94,74	59,40	11,43	71,24	118,24	27	16,56	13,08	2,52	11,38	21,73	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	5	191,20	67,89	30,36	106,91	275,49	5	116,60	33,95	15,18	74,44	158,76	5	21,60	18,45	8,25	-	44,51	
		Hutan Lahan Kering Primer	1	215,00	-	-	-	-	1	113,00	-	-	-	-	-	1	19,00	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Sekunder	6	146,33	41,33	16,87	102,96	189,71	6	87,83	20,85	8,51	65,96	109,71	6	11,83	4,49	1,83	7,12	16,55	
9	Jawa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	6	187,67	72,18	29,47	111,92	263,42	6	113,17	44,79	18,29	66,16	160,17	6	31,83	15,57	6,36	15,49	48,18	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	51	138,63	66,73	9,34	119,86	157,40	51	72,92	41,45	5,80	61,26	84,58	51	15,59	11,24	1,57	12,43	18,75	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	1	134,00	-	-	-	-	1	104,00	-	-	-	-	-	1	26,00	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Primer	95	247,59	66,12	6,78	234,12	261,06	95	127,78	44,10	4,52	118,79	136,76	95	29,64	14,38	1,48	26,71	32,57	
10	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Sekunder	127	201,94	74,39	6,60	188,88	215,01	127	93,78	44,23	3,92	86,01	101,55	127	17,27	12,12	1,08	15,14	19,40	
		Hutan Rawa Primer	1	438,00	-	-	-	-	1	240,00	-	-	-	-	-	1	2,00	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	73	256,52	99,89	11,69	233,21	279,83	73	110,33	65,34	7,65	95,08	125,57	73	10,41	10,45	1,22	7,97	12,85	
		Hutan Lahan Kering Primer	7	250,14	93,43	35,31	163,74	336,55	7	141,00	49,95	18,88	94,80	187,20	7	27,00	12,60	4,76	15,35	38,65	
11	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Sekunder	63	169,05	67,06	8,45	152,16	185,94	63	85,75	48,05	6,05	73,64	97,85	63	13,92	10,18	1,28	11,36	16,48	
		Hutan Rawa Sekunder	1	119,00	-	-	-	-	1	90,00	-	-	-	-	-	1	9,00	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Primer	32	224,91	80,11	14,16	196,02	253,79	32	102,22	43,94	7,77	86,38	118,06	32	26,38	19,01	3,36	19,52	33,23	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	160	209,89	93,33	7,38	195,32	224,46	160	95,94	54,17	4,28	87,48	104,39	160	17,08	11,55	0,91	15,27	18,88	
12	Kalimantan Tengah	Hutan Rawa Primer	5	260,60	30,66	13,71	222,54	298,66	5	130,20	57,60	25,76	58,68	201,72	5	15,40	11,35	5,08	1,31	29,49	
		Hutan Rawa Sekunder	85	253,86	124,47	13,50	227,01	280,71	85	100,29	72,51	7,86	84,65	115,93	85	6,92	7,54	0,82	5,29	8,54	
		Hutan Lahan Kering Primer	30	204,43	53,40	9,75	184,49	224,37	30	107,03	34,66	6,33	94,09	119,97	30	23,20	12,91	2,36	18,38	28,02	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	214	167,94	62,53	4,27	159,51	176,36	214	84,26	44,21	3,02	78,31	90,22	214	15,31	11,28	0,77	13,79	16,83	
13	Kalimantan Timur	Hutan Rawa Primer	1	195,00	-	-	-	-	1	88,00	-	-	-	-	1	19,00	-	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	168,55	55,03	16,59	131,57	205,52	11	67,27	53,42	16,11	31,38	103,16	11	8,09	6,98	2,10	3,40	12,78	
		Hutan Lahan Kering Primer	46	180,00	48,79	7,19	165,51	194,49	46	89,63	36,52	5,38	78,79	100,47	46	22,13	18,63	2,75	16,60	27,66	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	55	160,65	50,00	6,74	147,14	174,17	55	81,18	36,93	4,98	71,20	91,16	55	18,22	10,99	1,48	15,25	21,79	
14	Kalimantan Utara	Hutan Rawa Primer	1	194,00	-	-	-	-	1	20,00	-	-	-	-	1	1,00	-	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	207,18	86,72	26,15	148,92	265,44	11	112,82	70,42	21,23	65,51	160,13	11	8,45	6,59	1,99	4,03	12,88	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	14	201,00	70,50	18,84	160,29	241,71	14	80,07	48,23	12,89	52,22	107,92	14	4,57	4,20	1,12	2,15	7,00	
		Hutan Rawa Sekunder	4	215,25	85,99	42,99	78,42	352,08	4	70,25	27,16	13,58	27,03	113,47	4	6,75	4,43	2,21	-	13,79	
16	Kepulauan Riau	Hutan Lahan Kering Sekunder	48	250,23	91,84	13,26	223,56	276,90	48	128,29	52,10	7,52	113,16	143,42	48	14,10	12,91	1,86	10,36	17,85	
		Hutan Lahan Kering Primer	27	201,00	58,54	12,27	177,84	224,16	27	119,37	38,33	7,38	104,21	134,53	27	28,56	10,97	2,11	24,22	32,89	
		Hutan Lahan Kering Sekunder	23	180,48	68,25	14,23	150,96	209,99	23	101,39	45,77	9,54	81,60	121,19	23	18,74	13,73	2,86	12,80	24,68	
		Hutan Rawa Sekunder	7	190,00	55,95	21,15	138,25	241,75	7	114,71	23,74	8,97	92,76	136,67	7	14,43	1,72	0,65	12,84	16,02	
18	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	178,29	52,36	13,99	148,05	208,52	14	109,79	43,36	11,59	84,75	134,82	14	24,93	12,55	3,36	17,68	32,18	

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Diameter 5 Cm up (Individu/ha)						Diameter 20 Cm up (Individu/ha)						Diameter 50 Cm up (Individu/ha)					
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Sekunder	81	157.72	54.62	6.07	145.64	169.79	81	88.78	37.92	4.21	80.39	97.16	81	18.35	11.43	1.27	15.82	20.87
		Hutan Lahan Kering Primer	3	154.33	25.79	14.89	90.26	218.41	3	102.67	27.61	15.94	34.08	171.25	3	26.00	10.44	6.03	0.06	51.94
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Sekunder	26	151.19	61.35	12.03	126.41	175.97	26	87.85	49.94	9.79	67.67	108.02	26	21.73	15.01	2.94	15.67	27.79
		Hutan Lahan Kering Primer	61	248.26	72.04	9.22	229.81	266.71	61	134.79	41.82	5.35	124.08	145.50	61	23.59	11.33	1.45	20.69	26.49
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Sekunder	42	202.62	89.09	13.75	174.86	230.38	42	92.36	53.49	8.25	75.69	109.03	42	10.36	8.52	1.31	7.70	13.01
		Hutan Lahan Kering Primer	38	199.50	80.87	13.12	172.92	226.08	38	113.34	46.96	7.62	97.91	128.78	38	26.95	16.36	2.65	21.57	32.32
22	Papua	Hutan Lahan Kering Sekunder	74	129.04	79.66	9.26	110.59	147.50	74	64.39	46.32	5.38	53.66	75.12	74	9.34	9.63	1.12	7.11	11.57
		Hutan Lahan Kering Primer	96	210.96	67.15	6.85	197.35	224.56	96	102.08	46.08	4.70	92.75	111.42	96	18.55	10.97	1.12	16.33	20.78
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	189.82	65.19	7.33	175.22	204.42	79	96.39	46.21	5.20	86.04	106.74	79	15.00	11.11	1.25	12.51	17.49
		Hutan Rawa Primer	61	158.34	69.31	8.87	140.59	176.09	61	79.51	53.39	6.84	65.83	93.18	61	13.28	10.78	1.38	10.52	16.04
23	Papua Barat	Hutan Rawa Sekunder	35	137.26	56.79	9.60	117.75	156.76	35	60.86	40.52	6.85	46.94	74.78	35	7.63	8.21	1.39	4.81	10.45
		Hutan Lahan Kering Primer	84	212.92	56.06	6.12	200.75	225.08	84	107.82	45.55	4.97	97.94	117.71	84	21.39	11.80	1.29	18.83	23.95
		Hutan Lahan Kering Sekunder	47	185.83	57.04	8.32	169.08	202.58	47	88.21	42.84	6.25	75.64	100.79	47	16.81	12.00	1.75	13.29	20.33
		Hutan Rawa Primer	12	152.92	76.07	21.96	104.58	201.25	12	71.17	33.40	9.64	49.95	92.38	12	18.50	11.69	3.37	11.07	25.93
		Hutan Rawa Sekunder	1	198.00	-	-	-	-	1	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Riau	Hutan Lahan Kering Primer	10	291.00	54.04	17.09	252.34	329.66	10	159.70	48.08	15.20	125.30	194.10	10	18.90	19.52	6.17	4.94	32.86
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	225.67	74.12	10.59	204.38	246.96	49	120.16	49.61	7.09	105.91	134.41	49	17.39	12.40	1.77	13.82	20.95
		Hutan Rawa Primer	8	277.00	84.18	29.76	206.62	347.38	8	157.38	37.55	13.28	125.98	188.77	8	27.00	18.74	6.63	11.33	42.67
		Hutan Rawa Sekunder	110	227.06	95.57	9.11	209.00	245.12	110	120.13	61.60	5.87	108.49	131.77	110	9.88	9.85	0.94	8.02	11.74
25	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	24	206.75	64.18	13.10	179.65	233.85	24	125.54	40.70	8.31	108.36	142.73	24	26.25	15.63	3.19	19.65	32.85
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	163.95	55.85	12.81	137.03	190.87	19	91.42	33.91	7.78	75.08	107.76	19	15.11	10.54	2.42	10.02	20.19
26	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	42	192.76	66.97	10.33	171.89	213.63	42	113.33	45.27	6.99	99.23	127.44	42	18.05	14.22	2.19	13.61	22.48
		Hutan Lahan Kering Sekunder	40	160.68	59.63	9.43	141.60	179.75	40	77.65	45.65	7.22	63.05	92.25	40	12.03	13.77	2.18	7.62	16.43
27	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	121	187.42	50.92	4.63	178.26	196.59	121	113.38	38.09	3.46	106.53	120.24	121	18.19	13.30	1.21	15.80	20.58
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	159.85	48.39	5.22	149.47	170.22	86	91.01	33.80	3.64	83.77	98.26	86	15.95	9.62	1.04	13.89	18.02
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	38	222.03	71.64	11.62	198.48	245.57	38	130.71	50.78	8.24	114.02	147.40	38	29.13	16.84	2.73	23.59	34.67
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	150.38	59.38	7.48	135.43	165.34	63	80.65	40.04	5.04	70.57	90.73	63	11.46	10.26	1.29	8.88	14.04
29	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	14	206.86	56.62	15.13	174.16	239.56	14	133.71	45.37	12.13	107.52	159.91	14	35.07	14.96	4.00	26.43	43.71
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	174.64	31.86	6.79	160.51	188.76	22	111.64	25.16	5.36	100.48	122.79	22	22.55	10.50	2.24	17.89	27.20
30	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	16	231.19	65.29	16.32	196.39	265.98	16	143.00	52.53	13.13	115.01	170.99	16	29.69	18.46	4.61	19.85	39.52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	46	170.72	62.79	9.26	152.07	189.36	46	94.96	41.87	6.17	82.52	107.39	46	15.02	12.02	1.77	11.45	18.59
		Hutan Rawa Sekunder	4	106.75	86.78	43.39	-	244.84	4	65.00	83.49	41.75	-	197.86	4	3.25	5.25	2.63	-	11.61
31	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	20	194.30	48.93	10.94	171.40	217.20	20	116.40	29.82	6.67	102.44	130.36	20	21.75	11.17	2.50	16.52	26.98
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	166.90	84.84	13.25	140.12	193.68	41	77.73	53.13	8.30	60.96	94.50	41	9.32	9.73	1.52	6.25	12.39
		Hutan Rawa Primer	1	301.00	-	-	-	-	1	207.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	21	167.81	101.93	22.24	121.41	214.21	21	94.14	59.11	12.90	67.24	121.05	21	14.38	11.90	2.60	8.96	19.80
32	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	26	253.92	43.03	8.44	236.54	271.30	26	160.50	43.92	8.61	142.76	178.24	26	35.65	17.96	3.52	28.40	42.91
		Hutan Lahan Kering Sekunder	61	202.79	75.55	9.67	183.44	221.14	61	116.33	57.96	7.42	101.48	131.17	61	17.90	14.33	1.83	14.23	21.57
		Hutan Rawa Sekunder	6	156.17	88.95	36.32	62.81	249.52	6	90.00	72.65	29.66	13.76	166.24	6	12.83	18.54	7.57	-	32.29

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2023

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

TABEL I.3. DATA POTENSI SUMBER DAYA HUTAN INDONESIA DARI PLOT INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

D. Rata-rata Biomassa Tegakan Pohon Diameter 5 cm up per Provinsi

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	BiomassaTegakan Pohon Diameter 5 Cm up (ton/ha)					
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	Hutan Lahan Kering Primer	36	361,49	158,87	26,48	307,74	415,25
		Hutan Lahan Kering Sekunder	36	200,25	90,50	15,08	169,63	230,87
		Hutan Rawa Primer	1	519,23	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	2	157,12	165,94	117,33	-	1.647,99
		Hutan Mangrove Sekunder	2	19,17	24,90	17,61	-	242,88
2	Bali	Hutan Lahan Kering Primer	11	286,42	73,50	22,16	237,05	335,80
		Hutan Lahan Kering Sekunder	9	122,46	76,60	25,53	63,58	181,34
		Hutan Mangrove Sekunder	2	89,07	24,19	17,10	-	306,38
3	Banten	Hutan Lahan Kering Sekunder	12	271,53	123,97	35,79	192,76	350,30
4	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Primer	26	315,02	111,75	21,92	269,88	360,16
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	266,76	132,04	28,15	208,21	325,30
5	DKI Jakarta	Hutan Mangrove Sekunder	1	99,49	-	-	-	-
6	Gorontalo	Hutan Lahan Kering Primer	22	288,38	75,91	16,18	254,72	322,03
		Hutan Lahan Kering Sekunder	28	213,34	97,63	18,45	175,48	251,20
7	Jambi	Hutan Lahan Kering Primer	21	363,64	144,74	31,58	297,76	429,52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	37	221,59	112,71	18,53	184,02	259,17
		Hutan Rawa Primer	5	280,13	138,43	61,91	108,24	452,02
		Hutan Rawa Sekunder	4	125,88	82,50	41,25	-	257,14
8	Jawa Barat	Hutan Lahan Kering Primer	4	329,13	71,35	35,67	215,60	442,66
		Hutan Lahan Kering Sekunder	27	180,72	96,01	18,48	142,74	218,70
		Hutan Tanaman	5	223,56	126,06	56,38	67,04	380,08
9	Jawa Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	1	201,03	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Sekunder	6	140,95	51,22	20,91	87,20	194,70
		Hutan Mangrove Sekunder	1	15,48	-	-	-	-
10	Jawa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	6	416,15	172,16	70,28	235,48	596,82
		Hutan Lahan Kering Sekunder	51	205,10	127,87	17,91	169,13	241,06
		Hutan Tanaman	1	163,84	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Primer	2	66,71	40,88	28,90	-	433,97
		Hutan Mangrove Sekunder	1	18,16	-	-	-	-
11	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Primer	95	366,32	125,80	12,91	340,69	391,94
		Hutan Lahan Kering Sekunder	127	237,76	112,06	9,94	218,08	257,44
		Hutan Rawa Primer	1	290,63	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	73	208,72	106,12	12,42	183,96	233,48
		Hutan Mangrove Sekunder	24	263,56	214,93	43,87	172,80	-
12	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	7	333,21	123,21	46,57	219,26	447,16
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	188,39	101,35	12,77	162,86	213,91
		Hutan Rawa Sekunder	1	106,33	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Primer	2	166,48	56,71	40,10	-	676,01
		Hutan Mangrove Sekunder	12	155,36	78,93	22,78	105,21	205,51
13	Kalimantan Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	32	325,39	168,96	29,87	264,47	386,30
		Hutan Lahan Kering Sekunder	160	236,11	117,04	9,25	217,84	254,39
		Hutan Rawa Primer	5	248,24	86,39	38,63	140,98	355,51
		Hutan Rawa Sekunder	85	175,04	93,13	10,10	154,95	195,12
		Hutan Mangrove Sekunder	5	219,06	80,41	35,96	119,22	318,90
14	Kalimantan Timur	Hutan Lahan Kering Primer	30	285,65	133,62	24,40	235,76	335,55
		Hutan Lahan Kering Sekunder	214	195,69	102,02	6,97	181,94	209,43
		Hutan Rawa Primer	1	236,83	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	142,85	62,77	18,93	100,68	185,02
		Hutan Mangrove Sekunder	19	89,89	69,32	15,90	56,48	123,30
15	Kalimantan Utara	Hutan Lahan Kering Primer	46	257,58	151,32	22,31	212,64	302,51
		Hutan Lahan Kering Sekunder	55	218,59	106,73	14,39	189,74	247,44
		Hutan Rawa Primer	1	230,70	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	186,39	75,97	22,90	135,36	237,42
		Hutan Mangrove Sekunder	4	200,06	59,46	29,73	105,45	294,67
16	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan Lahan Kering Sekunder	14	129,39	67,83	18,13	90,22	168,56
		Hutan Rawa Sekunder	4	153,32	33,62	16,81	99,82	206,81
		Hutan Mangrove Primer	7	183,61	63,47	23,99	124,91	242,31
		Hutan Mangrove Sekunder	3	114,59	73,06	42,18	-	296,08
17	Kepulauan Riau	Hutan Lahan Kering Sekunder	48	221,36	104,70	15,11	190,95	251,76
		Hutan Mangrove Primer	1	46,14	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Sekunder	4	24,80	17,73	8,87	-	53,02
18	Lampung	Hutan Lahan Kering Primer	27	354,88	125,61	24,17	305,19	404,57
		Hutan Lahan Kering Sekunder	23	252,42	130,69	27,25	195,90	308,93
		Hutan Rawa Sekunder	7	190,92	24,30	9,18	168,45	213,40
19	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	222,24	88,80	23,73	170,97	273,51
		Hutan Lahan Kering Sekunder	81	167,54	84,03	9,34	148,96	186,12
		Hutan Mangrove Primer	3	283,45	65,41	37,76	120,96	445,94
		Hutan Mangrove Sekunder	2	241,42	32,10	22,70	-	529,79
20	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	208,35	55,78	32,20	69,79	346,91
		Hutan Lahan Kering Sekunder	26	183,53	110,40	21,65	138,93	228,12
		Hutan Mangrove Primer	5	217,55	96,08	42,97	98,25	336,85
21	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	61	270,87	103,08	13,20	244,47	297,27
		Hutan Lahan Kering Sekunder	42	158,00	76,83	11,85	134,06	181,94
		Hutan Mangrove Primer	2	145,78	52,97	37,46	-	621,71
		Hutan Mangrove Sekunder	2	86,84	67,89	48,01	-	696,83

I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	BiomassaTegakan Pohon Diameter 5 Cm up (ton/ha)					
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	38	355,30	226,96	36,82	280,70	429,90
		Hutan Lahan Kering Sekunder	74	122,96	79,05	9,19	104,65	141,28
		Hutan Mangrove Primer	2	181,57	35,45	25,06	-	500,04
23	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	96	248,11	110,61	11,29	225,70	270,52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	205,00	118,48	13,33	178,46	231,54
		Hutan Rawa Primer	61	189,31	123,13	15,76	157,78	220,84
		Hutan Rawa Sekunder	35	118,84	82,68	13,98	90,44	147,24
		Hutan Mangrove Primer	7	193,38	90,35	34,15	109,82	276,95
		Hutan Mangrove Sekunder	7	173,30	75,95	28,71	103,06	243,55
		Hutan Lahan Kering Primer	84	287,61	132,21	14,43	258,92	316,30
24	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Sekunder	47	235,55	130,19	18,99	197,33	273,78
		Hutan Rawa Primer	12	226,18	94,58	27,30	166,09	286,28
		Hutan Rawa Sekunder	1	207,09	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Primer	10	260,48	66,47	21,02	212,94	308,03
		Hutan Mangrove Sekunder	7	250,45	61,14	23,11	193,91	307,00
		Hutan Lahan Kering Primer	10	295,56	124,47	39,36	206,52	384,60
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	234,94	109,88	15,70	203,38	266,50
25	Riau	Hutan Rawa Primer	8	288,07	132,34	46,79	177,43	398,71
		Hutan Rawa Sekunder	110	185,41	88,33	8,42	168,71	202,10
		Hutan Mangrove Sekunder	7	69,72	42,89	16,21	30,06	109,39
		Hutan Lahan Kering Primer	24	249,83	113,98	23,27	201,70	297,96
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	145,50	71,86	16,49	110,87	180,14
26	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	42	191,68	110,74	17,09	157,17	226,19
		Hutan Lahan Kering Sekunder	40	128,45	100,01	15,81	96,47	160,44
27	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	121	222,88	102,43	9,31	204,45	241,32
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	179,02	74,06	7,99	163,15	194,90
28	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	38	298,07	118,94	19,29	258,97	337,16
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	150,98	96,97	12,22	126,56	175,40
		Hutan Mangrove Primer	2	184,12	83,46	59,01	-	933,98
		Hutan Mangrove Sekunder	13	130,34	125,02	34,67	54,79	205,89
29	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	14	327,80	122,35	32,70	257,15	398,44
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	218,83	84,16	17,94	181,52	256,15
		Hutan Mangrove Primer	2	58,09	40,69	28,77	-	423,69
		Hutan Lahan Kering Primer	16	342,88	149,52	37,38	263,20	422,55
30	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	201,35	101,75	15,00	171,14	231,57
		Hutan Rawa Sekunder	4	91,31	64,80	32,40	-	194,42
		Hutan Lahan Kering Primer	20	266,19	103,57	23,16	217,72	314,67
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	152,48	100,75	15,73	120,68	184,28
31	Sumatera Barat	Hutan Rawa Primer	1	451,90	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	21	182,53	116,13	25,34	129,67	235,39
		Hutan Mangrove Primer	10	221,95	30,02	9,49	200,48	243,42
		Hutan Mangrove Sekunder	3	152,41	141,93	81,94	-	504,98
		Hutan Lahan Kering Primer	26	372,39	117,65	23,07	324,87	419,91
32	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Sekunder	61	244,83	135,96	17,41	210,01	279,65
		Hutan Rawa Sekunder	6	168,05	130,23	53,16	31,38	304,71
		Hutan Mangrove Sekunder	4	59,59	34,47	17,24	4,74	114,45
		Hutan Mangrove Sekunder	4	59,59	34,47	17,24	4,74	114,45

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2022



PERENCANAAN KAWASAN HUTAN



TABEL II.1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN/REVISI/REVIEW RKTP S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2023

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum Menyusun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
1	Aceh		√/D							
2	Sumatera Utara				√					Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022
3	Sumatera Barat				√				√	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020
4	Jambi		√/F							
5	Riau		√/D							
6	Kepulauan Riau		√/D							
7	Bengkulu				√	√				Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013
8	Kepulauan Bangka Belitung				√	√				Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014
9	Sumatera Selatan		√/D							
10	Lampung		√/D							
11	Banten			√						

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum Menyusun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
12	DKI Jakarta		√/D							
13	Jawa Barat				√		√			Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014
14	Jawa Tengah				√				√	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023
15	D.I. Yogyakarta				√		√			Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012
16	Jawa Timur				√	√				Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013
17	Bali				√	√				Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014
18	Nusa Tenggara Barat				√	√				Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
19	Nusa Tenggara Timur				√	√				Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
20	Kalimantan Barat				√	√				Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum Menyusun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
21	Kalimantan Selatan				√				√	Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2023
22	Kalimantan Tengah		√/D							
23	Kalimantan Timur				√				√	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012 sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018
24	Kalimantan Utara				√					Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 14 Tahun 2023, tanggal 28 Juni 2023
25	Sulawesi Utara				√	√				Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
26	Gorontalo				√		√			Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum Menyusun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
27	Sulawesi Tengah				✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013, tanggal 8 November 2013
28	Sulawesi Selatan				✓		✓			Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018
29	Sulawesi Barat				✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
30	Sulawesi Tenggara				✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015
31	Maluku Utara				✓	✓				Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
32	Maluku				✓					Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022
33	Papua				✓					Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023
34	Papua Barat				✓					Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum Menyusun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
35	Papua Barat Daya		√/F							
36	Papua Tengah	√								
37	Papua Pegunungan	√								
38	Papua Selatan	√								
	Jumlah	3	9	1	25	12*	4	0	4	
1.	Tahun 2021	-	12	2	20	16	2	-	2	
2.	Tahun 2022	-	10	1	23	16	1	1	2	
3.	Tahun 2023	3	9	1	25	12	4	0	4	

Catatan :

*untuk Provinsi yang sudah disahkan melalui Pergub setelah Tahun 2021, Penyusunan RKTPnya sudah mengakomodir Dinamika Pembangunan Kehutanan dan perkembangan kebijakan2 serta sudah mengacu pada Peraturan Perundangan terbaru.

Perkembangan Penyusunan RKTP dan Review /Revisi RKTP sampai dengan Bulan Desember 2023 sudah mengalami penambahan bila dibandingkan dengan Perkembangan Penyusunan RKTP dan Review /Revisi RKTP sampai dengan 2022

Sumber: Sumber: Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2023

TABEL II.2. PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP S.D. DESEMBER 2023

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN		PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN		
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3									
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KSAPKA	18.462	3.331	3.568	2.613	2.630	3.028	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		HL	64.654	67.488	18.224	60.590	35.010	7.864			
		HPT	4.517	5.496	5.743	654	960	10.113			
		HP	91.903	55.402	1.137	66.685	41.656	5.456			
		HPK	-	-	2.603	-	-	-			
		JUMLAH	179.536	131.717	31.275	130.542	80.256	26.461			
2	SUMATERA UTARA	KSAPKA	-	4.850	-	-	-	1.140	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan mengenai kawasan hutan provinsi Sumatera Utara Nomor SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014, menindaklanjuti keputusan MA no 47P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013		
		HL	50.783	461.527	10.857	104.444	208.305	8.598			
		HPT	104.210	319.449	2.291	3.467	176.722	2.326			
		HP	141.270	447.156	21.577	28.504	222.009	5.830			
		HPK	-	36.302	704	70.947	35.680	-			
		JUMLAH	296.263	1.269.284	35.429	207.362	642.716	17.894			
3	SUMATERA BARAT	KSAPKA	4.852	7.560	882	-	1.070	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.304/Menhut-II/2011, tanggal 9-6-2011 dan SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15/03/2012		
		HL	86.339	97.563	3.650	87.456	50.887	3.412			
		HPT	23.606	25.709	6.098	21.541	21.293	6.098			
		HP	97.062	50.204	1.045	33.621	36.230	253			
		HPK	4.330	30.350	1.869	4.595	16.806	143			
		JUMLAH	216.189	211.386	13.544	147.213	126.286	9.906			
4	RIAU	KSAPKA	4.577	25.469	5.521	2.186	-	5.796	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau.		
		HL	16.864	32.256	12.331	17.636	-	5	2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016		
		HPT	597.466	546.252	8.875	481.978	173.039	4.846	3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menlhk/Sejen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menlhk/Sejen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016		
		HP	296.400	327.677	19.491	11.493	84.446	905	4. Persub S.438/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.04/2016 tanggal 25 April 2016		
		HPK	172.400	2.599.042	696	204.250	1.445.889	-	5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menlhk/Sejen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016.		
		JUMLAH	1.087.707	3.530.696	46.914	717.543	1.703.374	11.552	6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/IK.		
5	JAMBI	KSAPKA	-	1.582	-	-	336	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS;		
		HL	-	303	-	271	-	-			
		HPT	63.411	5.010	-	1.323	167	-			
		HP	8.834	100.152	10.908	18.935	13.545	-			
		HPK	-	-	-	-	-	-			
		JUMLAH	72.245	107.047	10.908	20.529	14.048	-			

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)					PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)					KETERANGAN		
			PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN		PENUNJUKAN BARU		PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN			PENUNJUKAN BARU	
			4	5	6	7	8	9	4	5	6	7		8	9
1	2	3											10		
6	SUMATERA SELATAN	KS/AKPA	607	22.145	6.207	607	21.903	7.624	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCL S; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Setjen/PLA.04/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 254/ORI-SRT/II/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI, persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha)						
	HL	55.562	25.653	2.224	8.436	7.071	1.891								
	HPT	23.838	9.432	1.493	24.099	1.912	1.493								
	HP	-	88.932	36.054	6.970	31.106	30.183								
	HPK	2.818	264.388	1.485	4.187	177.541	-								
		JUMLAH	82.825	410.550	47.463	44.299	239.533	41.191							
7	BENGKULU	KS/AKPA	9.607	9.875	-	221,05	435,33	-	1. Usulan Gubernur Bengkulu melalui beberapa surat, antara lain: Nomor 522/011/DLHK/2019 tanggal 8 Januari 2019, surat Nomor 522/758/DLHK/2019 tanggal 17 Desember 2019, surat Nomor Surat 522/328/DLHK/2020 6 April 2020, Surat Nomor 522/328/DLHK/2020 tgl 5 Juli 2021. 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.340 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Hektare), Perubahan Antar Fungsi Pokok kawasan Hutan Seluas ± 20.272 Ha (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Hektare) Dan Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Satu Hektare) Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu tanggal 25 Mei 2023.						
	HL	48.173	2.709	-	19.939,57	72,74	-								
	HPT	2.723	35.969	-	332,69	928,46	-								
	HP	-	2.949	-	-	255,66	-								
	HPK	-	10.360	-	-	647,65	-								
		JUMLAH	60.503	61.861	-	20.493,31	2.339,84	-							
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.798/Menhut-II/2012, tanggal 27-12-2012						
9	KEP. BANGKA BELITUNG	KS/AKPA	772	420	-	190	-	-							
	HL	-	33.012	1.993	2.529	-	1.993								
	HPT	-	-	-	-	-	-								
	HP	8.589	100.158	1.225	8.159	19.131	1.225								
		HPK	-	-	-	-	-	-							
		JUMLAH	9.361	133.590	3.218	10.878	19.131	3.218							
10	KEP. RIAU	KS/AKPA	3.120	12.943	3	4014	1.571	-	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 3. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Setjen/PLA.06/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCL S Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018; 4. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.764/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Gunung Jantan Belina Menjadi Bukan Kawasan Hutan Yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas Serta Bernilai Strategis Seluas ± 15 Ha (Lima Belas Hektare) Di Kabupaten Karimun Dalam Rangka Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Pada Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.						
	HL	13.197	36.317	2.085	11.733	5.178	2.108								
	HPT	11.374	114.252	282	25.807	67.243	-								
	HP	163	6.461	-	720	8949	262								
	HPK	30.869	362.981	-	104.688	256.152	-								
		JUMLAH	58.723	532.954	2.370	146.962	339.093	2.370							
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan						

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							10
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
14	DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KSA/KPA Darat	3.613	7.352	5.328	617		5.328	Terdapat Usulan sesuai Surat Gubernur NTT, Nomor : 1. Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013, tgl 11-10-2013 2. Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013, tgl 20-11-2013 3. Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tgl 5-6-2014 4. Surat Gubernur No. BU.52203/DISHUT/2015, tgl 15-4-2015 Update per 31 Des 2015 adalah Review RTRW NTT dalam tahap finalisasi Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2016, 11 Mei 2016
		KSA/KPA Air	-	1.963					
		HL	-	74.606	5.064				
		HPT	-	23.800	34				
		HP	6.263	59.939	14.092	3.499		551	
		HPK	11.472	45.535	-	8.052		35	
		JUMLAH	21.348	213.195	24.518	12.168		5.897	
		HL	198.125	220.648	77.186	66.048		11.811	
		HPT	235.863	637.048	51.984	149.567		29.156	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalbar
		HP	126.769	1.064.863	87.434	41.681		2.977	
		HPK	111.339	211.200	5.768	77.007		20.253	
		JUMLAH	672.096	2.133.759	222.372	334.303		-	
21	KALIMANTAN TENGAH	KSA/KPA	148.512	38.856	15.169	48.412		52.386	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31-5-2011 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalteng
		HL	180.947	5.426	50.472	33.116		13.601	
		HPT	636.399	124.183	17.933	86.977		9.968	
		HP	2.401.681	840.773	40.234	402.043		3.179	
		HPK	533.117	1.913.076	820.907	119.118		2.720	
		JUMLAH	3.900.656	2.922.314	944.715	689.666		204	
22	KALIMANTAN SELATAN	KSA/KPA	4.991,64	691,84	-	4.209,57		1.168,656	1. Usulan Gubernur melalui beberapa surat antara lain: a) Nomor 600/102/PRP/DPUPR tanggal 31 Januari 2022; b) Nomor 600/0279/PRP/DPUPR tanggal 6 Juni 2022; c) Nomor 600/0577/PRP/DPUPR tanggal 31 Agustus 2022; d) Nomor 600/0869/PRP/DPUPR tanggal 27 Oktober 2022; e) Nomor 600/0894/PRP/DPUPR tanggal 8 November 2022. 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.16/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 26.070 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Hektare), Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 3.934 Ha (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Hektare), Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 6.254 Ha (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Hektare) Dalam Rangka Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 Januari 2023.
		HL	-	827,26	-	-		1.398,60	
		HPT	-	171,90	-	-		213,99	
		HP	-	30.998,18	-	5.978,15		118,24	
		HPK	-	631,24	-	-		23.822,90	
		JUMLAH	4.991,64	33.320,42	-	10.187,72		516,34	
								26.070,07	

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN		PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN		
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3								10	
23	KALIMANTAN UTARA	KSAKPA	-	33.105,65	-	-	-	-	-	-	1. Usulan Gubernur Kalimantan Utara melalui beberapa surat, antara lain: a) Nomor 600/0242/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 27 Februari 2020; b) Nomor 600/1235/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 5 April 2021; c) Nomor 600/1585/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 30 April 2021; d) Nomor 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021; e) Nomor 600/3852/DISHUT/GUB tanggal 06 Nopember 2023.
		HL	-	34.312,01	-	-	-	-	-	-	2. Telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Timdu (field study).
		HPT	-	191.520,43	-	-	-	-	-	-	3. Telah dilakukan pembahasan hasil kunjungan lapangan.
		HP	-	235.594,73	-	-	-	-	-	-	4. Telah dilakukan rapat penyusunan dan penetapan Kriteria dan Indikator RTRWP Kalimantan Utara.
		HPK	-	44.466,02	-	-	-	-	-	-	5. Telah dilakukan rapat persiapan pembahasan per lokus usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam rangka review RTRWP Kalimantan Utara
		JUMLAH	-	538.998,84	-	-	-	-	-	-	1. Usulan Gubernur Kalimantan Timur melalui beberapa surat, antara lain : a) 522/6071/EK tanggal 3 November 2021; b) 650/1121/PR-KASIPTR tanggal 9 November 2022; c) 650/6506/BID-PR tanggal 18 April 2023; d) 500.4.3.5/11359/6506/BID-PR tanggal 23 Juni 2023.
24	KALIMANTAN TIMUR	KSAKPA	2.325,70	59.452,30						2. Telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Timdu (field study).	
		HL	107.634,63	23.860,19						3. Telah dilakukan pembahasan hasil kunjungan lapangan dan penyusunan Kriteria dan Indikator RTRWP Kalimantan Timur.	
		HPT	-	145.308,12	-					5. Telah dilakukan pembahasan lokus usulan.	
		HP	4.916,41	269.172,27						6. Telah dilakukan Uji Konsistensi.	
		HPK	-	117.536,62						7. Telah dilakukan pembahasan lokus usulan pasca uji konsistensi.	
		APL		15.095,66						8. Telah dilaksanakan penyusunan laporan dan buku lokus penelitian terpadu.	
		JUMLAH	114.876,74	615.329,50	15.095,66						
25	SULAWESI UTARA	KSAKPA	793	12.421		465	182			Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov.Sulut	
		HL	6.457	15.278	1.423	296	521	290			
		HPT		16.545	1.166		5.264				
		HP		3.821			904				
		HPK		526			166				
		JUMLAH	7.250	48.591	2.589	761	7.037	290			
26	SULAWESI TENGAH	KSAKPA	-	71.581	57	1933	293	-		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.452/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2020 tanggal 30 November 2020	
		HL	36.825	49.854	53	11.805	6.254	53			
		HPT	6.005	58.793	1.535	66	8.042	1535			
		HP	-	7.652	-	23107	966	-			
		HPK	-	54.328	103	17707	6.003	-			
		JUMLAH	42.830	242.207	1.749	54.618	21.558	1.588			
27	SULAWESI SELATAN	KSAKPA	22.595	13.266		24.662	1.645	-		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019	
		HL	76.036	98.388	886	49.291	45.726	170			
		HPT	13.403	50.105	160	10.079	23.683	139			
		HP		32.598	1.314	-	13.719	1.529			
		HPK		9.478		-	6.564	-			
		JUMLAH	112.034	203.836	2.360	84.032	91.337	1.838			

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN		PERUBAHAN FUNGSI		PERUBAHAN PERUNTUKAN		
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	6	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	9	
1	2	3	4	5				7	8		10
28	SULAWESI TENGGARA	KSA/KPA	28.823	8.334	-	-	8.061	-	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011
HL		187.128	30.236	-	-	52.660	-	-	-		
HPT		23.706	29.427	-	-	15.773	-	13.059	-		
HP		61.714	154.376	-	-	34.078	-	52.287	-		
HPK		3.553	87.792	-	-	4.539	-	44.759	-		
		JUMLAH	304.924	310.165	-	-	115.111	110.105	-	-	
29	GORONTALO	KSA/KPA	17.031	-	-	-	15.024	167	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.324/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Gorontalo
HL		8.353	5.550	37	-	28.603	5.095	-	-		
HPT		55.850	22.428	1.550	-	8.265	13.779	1.055	-		
HP		14.161	4.535	2.316	-	3.661	2.055	1.194	-		
HPK		-	3.319	2.048	-	-	1.509	1.538	-		
JUMLAH		95.395	35.832	5.951	-	55.553	22.605	3.787	-		
30	SULAWESI BARAT	KSA/KPA	-	825	-	-	-	825	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.726/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Sulbar
HL		214.184	44.126	-	-	214.184	8.470	-	-		
HPT		80.446	44.566	-	-	37.416	11.671	-	-		
HP		-	48.258	-	-	-	28.618	-	-		
HPK		-	31.085	-	-	-	23.972	-	-		
JUMLAH		294.630	168.860	-	-	251.600	73.556	-	-		
31	MALUKU	KSA/KPA	3.484	17.256	-	-	-	2	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPK RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS
HL		30.670	75.645	6.125	-	-	3.955	2.326	-		
HPT		204.600	117.452	987	-	4.785	11.482	987	-		
HP		41.439	84.196	-	-	12.264	26.863	-	-		
HPK		16.352	1.230.827	578	-	3.619	321.813	-	-		
JUMLAH		296.545	1.525.376	-	-	20.668	364.115	3.313	-		
32	MALUT	KSA/KPA	28.650	1.656	444	-	-	-	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.490/Menhut-II/2012 tanggal 5-9-2012
HL		180.735	56.260	6.017	-	29.001	1.662	2.892	-		
HPT		92.591	77.108	10.065	-	22.994	8.599	710	-		
HP		40.641	136.148	1.122	-	9.585	15.648	1.479	-		
HPK		42.156	679.564	7.071	-	30.642	247.452	-	-		
JUMLAH		384.773	950.736	24.719	-	92.222	273.361	5.081	-		
33	PAPUA	KSA/KPA	8.108	133.814	521	-	763	9.662	521	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua
HL		405.429	269.758	10.661	-	395.176	44.532	7.742	-		
HPT		156.662	80.581	18.189	-	133.115	39.468	18.282	-		
HP		3.570.941	126.766	14.307	-	3.404.532	50.426	14.307	-		
HPK		2.058.356	667.704	4.482	-	1.803.244	232.297	4.406	-		
JUMLAH		6.199.496	1.278.623	48.160	-	5.736.830	376.385	45.258	-		
34	PAPUA BARAT	KSA/KPA	238.324	35.714	4	-	5.835	-	4	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.710/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua Barat
HL		97.990	145.399	1.687	-	8.388	-	59	-		
HPT		92.203	102.674	2.150	-	23.532	44.817	2.633	-		
HP		136.735	132.632	3.080	-	-	61.594	-	-		
HPK		467.507	563.033	16.949	-	400.465	136.634	1.238	-		
JUMLAH		1.032.759	979.452	23.870	-	438.220	243.045	3.934	-		

Sumber: Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Keterangan: pm = pro memory



PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN



TABEL III.1. LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI AIR	KONSERVASI DARAT	JML KK AIR & DARAT	HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Peraliran	Luas Provinsi	Proporsi Luas KH (Darat) (%)	Ket
1	Aceh	580/MEN/LHK/SETJEN/SET.1/12/2018	17/12/2018	0,00	1.058.364,40	1.058.364,40	1.791.677,92	145.178,34	549.794,88	15.374,69	3.550.390,23	3.550.390,23	5.795.600	61,3	
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24/06/2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.795,00	3.055.795,00	7.298.123	41,9	
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15/01/2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.057,00	4.201.289	55,8	
4	Riau	903/MEN/LHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07/12/2016	0,00	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00	8.702.366	62,1	
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29/09/2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00	5.005.816	41,9	
6	Sumatera Selatan	454/Men/LHK/Sejten/PLA.2/6/2016 & 190/Men/LHK/Sejten/PLA.0/4/2018	17 Juni /2016 & 20 April 2018	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.712.819,00	160.996,00	3.407.693,00	3.456.797,00	9.159.243	37,2	
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012;SK.533/MEN/LHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	27-12-2012;25/05/2023	0,00	462.862,36	462.862,36	230.737,69	172.018,85	45.556,91	11.115,35	922.291,16	922.291,16	1.991.933	46,3	Hasil RTRW Bengkulu 2023
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23/08/2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00	3.462.380	29,0	
9	Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27/12/2012	0,00	34.500,00	34.500,00	166.371,00	0,00	442.051,00	693,00	643.615,00	643.615,00	1.642.406	39,2	
10	Kepulauan Riau	76/Men/LHK-II/2015 & 272/Menhut-II/2015 & 6 Juni 2018	06/03/2015 & 6 Juni 2018	0,00	4.734,73	4.734,73	97.362,65	118.832,99	78.830,62	82.071,11	381.832,10	381.832,10	820.172	46,6	
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02/08/2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.475,45	66.401	0,7	
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04/07/2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.865,00	0,00	816.603,00	816.603,00	3.537.776	23,1	
13	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01/10/2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00	3.280.069	19,7	
14	D.I Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29/06/2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52	313.315	5,4	
15	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21/07/2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.361.146,00	4.779.975	28,4	
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15/06/1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00	986.292	20,9	Perhitungan Digital khusus provinsi Banten
17	Bali	433/Kpts-II/1999	15/06/1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01	578.006	22,0	
18	N T B	598/Menhut-II/2009 & 270/MEN/LHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	2 Oktober 2009 & 5 Juni 2017	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	0,00	1.035.838,00	1.046.959,00	1.857.232	55,8	
19	N T T	357/Menhut-II/2016	11/05/2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00	4.871.810	30,5	
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014; 399/MEN/LHK/PTU/PLA.2/10/2020; SK.1067/MEN/LHK/SETJEN/PLA.2/10/2022	02/09/2014; 16/10/2020; 7/10/2022	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.123.714,50	197.918,00	8.195.005,50	8.385.950,50	14.730.700	55,6	Pencabutanblad 1516 (onbudsman)
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25/09/2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00	15.356.450	82,7	
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009; SK.16/MEN/LHK/SETJEN/PLA.0/1/2023; 1301/2023;17/11	23-07-2009; 1301/2023;17/11	0,00	217.944,00	217.944,00	507.248,00	123.940,00	685.270,00	119.285,00	1.653.687,00	1.653.687,00	3.874.423	42,7	

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI AIR	KONSERVASI DARAT	JML KK AIR & DARAT	HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Peraliran	Luas Provinsi	Proporsi Luas KH (Daratan) (%)	Ket
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018 136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020	29 Agustus 2014 & 9 Juni 2018, 13 Februari 2019, 30/12/2020	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.164,45	4.022.075,55	211.575,88	13.831.724,88	13.831.724,88	20.453.434	67,6	SK. 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020 merevisiblad 1916 (ombudsman)
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02/09/2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.636,00	694.939,00	764.739,00	1.385.164	50,2	
25	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014; 452/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2020	29-09-2014; 30-11-2020	340.119,00	646.148,00	986.267,00	1.258.081,00	1.421.375,00	418.489,00	170.505,00	3.914.598,00	4.254.717,00	6.184.129	63,3	
26	Sulawesi Selatan	362/Menhut-II/2014	28/05/2019	606.804,00	231.029,00	837.833,00	1.162.498,00	479.518,00	140.036,00	16.412,00	2.029.493,00	2.636.297,00	4.671.748	43,4	Hasil RTRWP Sulawesi 2019
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09/08/2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00	3.806.770	61,1	Perhitungan Digital
28	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25/05/2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00	1.125.707	73,3	
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29/09/2014	0,00	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.678.718	65,1	
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29/09/2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00	4.691.403	83,4	
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01/05/2013	0,00	218.499,00	218.499,00	584.058,00	668.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00	3.198.250	78,6	
32	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22/09/2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00	9.967.163	88,1	
33	Papua	782/Menhut-II/2012	27/12/2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.499,00	31.903.605	92,1	
	Total			5.321.321,00	22.090.903,76	27.412.224,76	29.520.962,98	26.798.799,89	29.171.184,19	12.761.378,03	120.343.229,85	125.664.549,85	191.357.868,00	62,9	

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan KH, data s.d 31 Desember 2023

TABEL III.2. PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S/D DESEMBER 2023

NO	PROVINSI	TATA BATAS SD TAHUN 2018	TATA BATAS TAHUN 2019 (TORA)	TATA BATAS TAHUN 2020	TATA BATAS TAHUN 2021	TATA BATAS TAHUN 2022	TATA BATAS TAHUN 2023	TATA BATAS SD TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACEH	6.169	184	27	614	-	2.336	9.330
2	SUMATERA UTARA	11.030	392	375	3.232	-	6.674	21.703
3	SUMATERA BARAT	5.504	-	-	-	11	3.802	9.317
4	RIAU	10.995	-	200	511	4.373	9.493	25.573
5	SUMATERA SELATAN	5.966	-	544	757	-	438	7.705
6	BENGKULU	2.153	125	-	-	-	10	2.288
7	LAMPUNG	3.319	-	-	9	-	56	3.384
8	BANGKA BELITUNG	783	605	2	208	-	20	1.618
9	JAMBI	4.537	-	-	-	-	11	4.549
10	KEPULAUAN RIAU	2.062	600	80	-	659	1.881	5.282
11	DI YOGYAKARTA	276	-	-	541	-	-	837
12	BANTEN	47	-	-	-	-	199	246
13	DKI JAKARTA	44	20	-	-	-	-	44
14	JAWA TENGAH	19.067	-	-	-	-	-	19.067
15	JAWA BARAT	20.230	-	-	-	-	-	20.230
16	JAWA TIMUR	19.438	-	-	-	-	-	19.438
17	BALI	1.819	-	-	-	-	-	1.819
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.663	16	-	-	-	29	5.708
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5.721	317	36	1.108	-	1.782	8.964
20	KALIMANTAN BARAT	19.431	561	-	1.217	801	-	22.010
21	KALIMANTAN TENGAH	8.780	1.047	2.411	3.456	2.443	4.713	22.850
22	KALIMANTAN SELATAN	15.188	181	395	-	3.076	-	18.839
23	KALIMANTAN TIMUR	21.047	-	-	868	325	-	22.240
24	KALIMANTAN TIMUR (IKN)	-	-	-	-	199	-	199
25	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	254	-	254
26	SULAWESI UTARA	10.643	-	-	-	-	-	10.643
27	SULAWESI TENGAH	18.589	414	430	2.543	300	799	23.075
28	SULAWESI SELATAN	2.430	1.034	-	959	-	1.733	6.156
29	SULAWESI TENGGARA	10.236	432	340	330	138	230	11.706
30	GORONTALO	7.172	144	8	-	-	12	7.336
31	SULAWESI BARAT	2.351	-	-	-	-	-	2.351

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	TATA BATAS SD TAHUN 2018	TATA BATAS TAHUN 2019 (TORA)	TATA BATAS TAHUN 2020	TATA BATAS TAHUN 2021	TATA BATAS TAHUN 2022	TATA BATAS TAHUN 2023	TATA BATAS SD TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	MALUKU	11.914	756	67	66	64	3.938	16.805
32	MALUKU UTARA	2.687	346	84	283	147	4.834	8.380
33	PAPUA	23.997	350	2.098	2.111	262	2.358	31.177
34	PAPUA BARAT	4.964	637	-	811	-	1.573	7.985
35	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
36	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		284.253	8.160	7.097	19.624	13.052	46.921	379.108

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, data s.d Desember 2023

TABEL III.3. PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN S.D DESEMBER 2023

NO	PROVINSI	SD Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		s.d TAHUN 2023	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	15	919.633	4	6.565	-	-	-	-	13	1.577.929	-	-	32	2.504.127
2	SUMATERA UTARA	41	1.725.266	7	33.442	-	-	-	-	13	133.055	15	126.726	76	2.018.489
3	SUMATERA BARAT	51	1.413.859	-	-	-	-	-	-	3	190.793	4	13.980	58	1.618.632
4	RIAU	47	2.053.586	5	63.416	-	-	3	60.215	11	51.578	42	489.439	108	2.718.234
5	SUMATERA SELATAN	51	2.982.021	-	-	-	-	-	-	17	367.755	3	3.976	71	3.353.752
6	BENGKULU	54	705.348	-	-	-	-	-	-	1	9.304	-	-	55	714.652
7	LAMPUNG	29	603.237	-	-	-	-	-	-	4	282.045	1	9.714	34	894.997
8	BANGKA BELITUNG	87	541.821	-	-	-	-	-	-	9	80.606	1	481	97	622.908
9	JAMBI	47	1.731.662	-	-	-	-	-	-	14	580.941	1	4.806	62	2.317.408
10	KEPULAUAN RIAU	27	104.106	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25.950	35	130.056
11	DI YOGYAKARTA	9	8.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8.861
12	BANTEN	21	202.427	-	-	-	-	-	-	-	-	1	720	22	203.148
13	DKI JAKARTA	4	107.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107.856
14	JAWA TENGAH	138	801.792	-	-	-	-	3	239	1	1	5	140	147	802.172
15	JAWA BARAT	141	952.659	-	-	-	-	4	92	3	596	4	415	152	953.762
16	JAWA TIMUR	146	971.201	-	-	-	-	-	-	7	88.588	2	976	155	1.060.765
17	BALI	25	137.428	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	26	137.431
18	NUSA TENGGARA BARAT	62	1.187.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	1.187.581
19	NUSA TENGGARA TIMUR	135	1.028.056	-	-	7	17.076	4	3.778	-	-	16	1.291	162	1.050.201
20	KALIMANTAN BARAT	162	6.126.338	-	-	2	8.752	10	284.440	22	1.223.087	11	293.971	207	7.936.589
21	KALIMANTAN TENGAH	28	3.885.076	-	-	-	-	1	27.868	16	2.862.409	10	1.747.018	55	8.522.372
22	KALIMANTAN SELATAN	42	1.503.778	-	-	2	5.789	5	13.135	3	38.153	5	266.587	57	1.827.441
23	KALIMANTAN TIMUR	86	7.958.458	-	-	1	11.773	6	576.829	11	381.435	24	1.611.013	128	10.539.509
24	KALIMANTAN UTARA	18	3.418.090	-	-	5	149.265	-	-	13	316.957	11	-	47	3.884.312
25	SULAWESI UTARA	60	381.359	-	-	-	-	-	-	1	26.990	2	293	63	408.642
26	SULAWESI TENGAH	62	2.563.697	-	-	-	-	1	7.290	-	-	2	338.384	65	2.909.371
27	SULAWESI SELATAN	68	2.035.299	-	-	-	-	-	-	1	142	-	-	69	2.035.440
28	SULAWESI TENGGARA	46	3.263.658	-	-	-	-	-	-	-	-	2	112.078	48	3.375.736
29	GORONTALO	32	805.289	-	-	-	-	-	-	2	6.720	-	-	34	812.009
30	SULAWESI BARAT	19	1.061.994	-	-	-	-	-	-	2	14.859	4	49.089	25	1.125.942
31	MALUKU	118	2.668.792	-	-	2	944	-	-	6	61.002	-	-	126	2.730.738
32	MALUKU UTARA	56	1.346.742	-	-	2	71.633	2	15.292	-	-	-	-	60	1.433.667
33	PAPUA	92	24.617.106	-	-	10	72.241	5	287.903	4	1.683.200	2	92.305	113	26.752.754
34	PAPUA BARAT	39	8.121.899	-	-	-	-	-	-	1	27.099	4	1.313.899	44	9.462.897
35	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2058	87.935.975	16	103.423	31	337.473	44	1.277.080	178	10.005.244	186	6.553.514	2.513	106.212.710

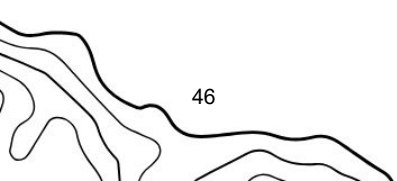
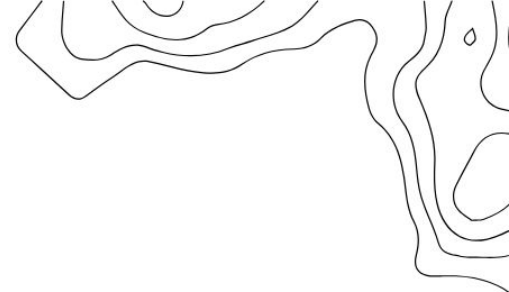
Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2023

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) S/D DESEMBER 2023

No	Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI III	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun																			
				2015			2016			2017			2018			2019			2020		2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	488.082	430.000	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0													
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berlahan tidak produktif	1.127.471	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0	0					696								
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.492	39.000	0	0	0	39.229	0	0	0													
	Jumlah non eksisting	1.676.045	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0					696								
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	420.421	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0		2.772											
5	Permukiman fasos dan fasum	655.879	640.000	0		0																	
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat		360.000	0		0																	
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	2.443.492	590.000	0		0																	
	Jumlah eksisting	3.519.792	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.558	37.755		35.077							
	TARGET IKU	5.195.837	4.139.000		10%	30%	40%			340.000		46.500				184.400							
	REALISASI (APL) PERTAHUN			0	690.614	42.734	268.105			349.973		72.956				95.085							
	REALISASI (APL) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.001.453			1.351.426		1.424.382				1.519.467							
	PROGRES (APL+KH) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.979.560			2.329.533		2.402.489				2.496.879							
	Persen Capaian Progres			0%	17%	18%	48%			56%		58%				60%							

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) S/D DESEMBER 2023 (lanjutan...)

No	Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI III	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun										Total 2015-2024	Persen Capaian Dari Target	SISA TARGET
				2022			2023									
				Perubahan Batas (APL)	Penegasan Trans	Penataan Batas KH Reguler	Update 20% Pelepa san KH	Penega san Trans	RTRW	Peruba-han Batas (APL)	SK Pencad angan HPK TP	SK Pelepa- san dari HPK Tidak Produktif	Persetujuan PB PPTKH			
1	2	3	4	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	488.082	430.000				58.724						0	488.082	114%	0
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.127.471	1.590.000								3.810	965	0	942.688	59%	647.312
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.492	39.000										0	39.229	101%	0
	Jumlah non eksisting	1.676.045	2.059.000				58.724		0	0	3.810	965	0	1.469.999	71%	29%
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	420.421	490.000		1.543			2.495						271.390	55%	218.610
5	Permukiman fasos dan fasum	655.879	640.000													
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	2.443.492	360.000													
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat		590.000													
	Jumlah eksisting	3.519.792	2.080.000	66.266	1.543	31.679		2.495	4.209	107.522			147.087	1.178.824	74%	411.176
	TARGET IKU	5.195.837	4.139.000			94.756							126.268,63			
	REALISASI (APL) PERTAHUN					99.487,7							173.914,3			
	REALISASI (APL) AKUMULASI					1.618.955							1.792.869			
	PROGRES (APL+KH) AKUMULASI					2.596.366							2.916.403	2.920.213		1.277.098
	Persentase Capaian Progres					63%							70%	71%		30%



IV. **PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN**



TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	1	2.725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.725
2	BALI	1	169,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	170
3	BENGKULU	2	1.073,00	1	88,00	-	-	-	-	-	-	3	1.161
4	D I YOGYAKARTA	2	1.901,24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.901
5	GORONTALO	-	-	1	40,84	-	-	-	-	1	6.208,00	2	6.249
6	JABAR	-	-	-	-	-	-	1	75,35	-	-	1	75
7	JABAR dan BANTEN	8	139.736,81	-	-	-	-	-	-	-	-	8	139.737
8	JAMBI	3	73.885,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	73.886
9	JATENG	5	11.139,34	-	-	-	-	-	-	1	11,66	6	11.151
10	JATIM	2	1.959,30	-	-	1	214,12	-	-	-	-	3	2.173
11	KALBAR	4	84.469,50	1	3.923,00	-	-	-	-	-	-	5	88.393
12	KALSEL	21	276.789,19	1	1.239,00	-	-	1	3.865,00	-	-	23	281.893
13	KALTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	405,00	1	405
14	KALTENG	18	1.417.507,00	1	8.670,00	3	38.354,00	10	97.830,98	21	107.218,00	10	45.179,19
15	KALTENG DAN KALSEL	-	-	1	18.198,00	-	-	-	-	-	-	1	18.198
16	KALTIM	7	428.380,00	-	-	1	41.405,54	-	-	-	-	8	469.786
17	KEPULAUAN RIAU	5	45.296,04	1	194,00	1	371,00	-	-	1	10,26	8	45.871
18	LAMPUNG	1	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	102
19	MALUT	3	176.709,76	-	-	1	5.435,00	-	-	-	-	5	193.946
20	NTB	4	83.623,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5	114.824
21	NTT	1	352,62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	353
22	PAPBAR	4	11.806,00	1	1.971,00	1	234,00	-	-	-	-	6	14.011
23	PAPUA	4	374.354,00	1	404,00	-	-	-	-	-	-	5	374.758
24	RIAU	28	648.202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28	648.202
25	SULBAR	2	16.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.240
26	SULSEL	4	48.243,50	1	434,00	-	-	-	-	-	-	5	48.678
27	SULTENG	2	43.387,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43.387
28	SULTRA	3	24.703,15	1	1.905,00	-	-	1	4.033,00	6	14.043,00	11	44.684
29	SULUT	4	29.162,44	-	-	-	-	-	-	1	1.983,00	5	31.145
30	SUMBAR	7	62.794,40	-	-	-	-	-	-	-	-	7	62.794
31	SUMSEL	1	29.924,85	-	-	-	-	-	-	1	60,00	2	29.985
32	SUMUT	22	355.102,84	-	-	2	16.810,00	-	-	-	-	24	371.913
Grand Total		169	4.389.740,07	11	37.066,84	10	102.824	13	105.804	33	129.939	12	88.180
												248	4.853.554

Sumber : Data Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan S/D Desember 2023

**TABEL IV.2. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
(TAHAP SK PELEPASAN/PENEGASAN APL KAWASAN HUTAN)**

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		S/D TAHUN 2023	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ACEH	12	39.376,65	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.376,65
2	SUMATERA UTARA	12	28.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.054,00
3	SUMATERA BARAT	11	18.334,60	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18.334,60
4	RIAU	12	68.812,98	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.812,98
5	SUMATERA SELATAN	33	122.140,80	-	-	-	-	-	-	-	-	33	122.140,80
6	BENGKULU	5	14.327,45	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.327,45
7	LAMPUNG	16	134.147,20	-	-	-	-	-	-	-	-	16	134.147,20
8	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	JAMBI	14	78.412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78.412,53
10	KEPULAUAN RIAU	2	7.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,00
11	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	2	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.950,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2	1.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.137,00
20	KALIMANTAN BARAT	17	28.804,72	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28.804,72
21	KALIMANTAN TENGAH	35	72.582,72	-	-	-	-	-	-	-	-	35	72.582,72
22	KALIMANTAN SELATAN	9	31.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31.916,00
23	KALIMANTAN TIMUR	7	36.600,08	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.600,08
24	KALIMANTAN UTARA	2	3.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.291,00
25	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGAH	18	21.558,15	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21.558,15
27	SULAWESI SELATAN	6	4.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.015,35
28	SULAWESI TENGGARA	21	37.035,71	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37.035,71
29	GORONTALO	4	5.661,30	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.661,30
30	SULAWESI BARAT	3	3.730,78	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.730,78
31	MALUKU	3	5.664,58	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.664,58
32	MALUKU UTARA	14	22.288,91	-	-	-	-	-	-	-	-	14	22.288,91
33	PAPUA	17	92.532,46	-	-	-	-	-	-	-	-	17	92.532,46
34	PAPUA BARAT	8	16.397,74	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16.397,74

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		S/D TAHUN 2023	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	PAPUA TENGAH												
36	PAPUA PEGUNUNGAN												
37	PAPUA SELATAN												
38	PAPUA BARAT DAYA												
	TOTAL	285	897.303	-	-	-	-	-	-	4	2.491	289	899.794

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2023, Data s/d Desember 2023

TABEL IV.3 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN, PERTANIAN

NO	PROVINSI	SD 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		TOTAL SD 2023	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	ACEH	58	265.743,70							1	1.587,79			59	267.331,49
2	SUMATERA UTARA	32	157.113,26											32	157.113,26
3	SUMATERA BARAT	28	169.756,14							1	5.012,49			29	174.768,63
4	RIAU	143	1.571.275,20	8	17.253,65	2	1.906,08			2	121,65	2	3.164,47	157	1.593.721,05
5	SUMATERA SELATAN	50	366.872,81	2	1.570,97							1	823,89	53	369.267,67
6	BENGKULU	11	57.581,25											11	57.581,25
7	LAMPUNG	10	85.277,65							1	250,48			11	85.528,13
8	BANGKA BELITUNG														-
9	JAMBI	44	351.036,98											44	351.036,98
10	KEPULAUAN RIAU	9	65.027,87							1	1.527,78			10	66.555,65
11	DI YOGYAKARTA														-
12	BANTEN														-
13	DKI JAKARTA														-
14	JAWA TENGAH	6	3.680,25	1	3,20	1	1,90	3	37,26	1	1,04	1	625,95	13	4.349,59
15	JAWA BARAT	17	3.275,19	1	11,10									18	3.286,29
16	JAWA TIMUR	33	1.192,17					2	67,49	1	2,91			36	1.262,57
17	BALI	1	62,14											1	62,14
18	NUSA TENGGARA BARAT	4	1.550,22									1	300,49	5	1.850,71
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0,00							1	134,58			1	134,58
20	KALIMANTAN BARAT	26	278.699,27											26	278.699,27
21	KALIMANTAN TENGAH	149	1.167.520,23	7	28.636,42	11	54.712,92	13	86.112,85	35	143.555,44	8	30.965,88	223	1.511.503,74
22	KALIMANTAN SELATAN	22	225.607,90	2	17.706,50			1	3.080,95	3	13.774,40			28	260.171,75
23	KALIMANTAN TIMUR	49	417.594,56							5	54.075,70			54	471.670,26
24	KALIMANTAN UTARA	9	93.452,53					2	9.627,52			1	404,42	12	103.484,47
25	SULAWESI UTARA	1	2.000,00											1	2.000,00
26	SULAWESI TENGAH	10	88.496,90											10	88.496,90
27	SULAWESI SELATAN	5	5.452,64											5	5.452,64
28	SULAWESI TENGGARA	6	42.608,05	1	1.814,40					1	14.953,20			8	59.375,65
29	GORONTALO	6	62.829,68					1	40,76					7	62.870,44
30	SULAWESI BARAT	10	103.776,71											10	103.776,71
31	MALUKU	13	13.044,07									1	1.311,84	14	14.355,91
32	MALUKU UTARA	11	59.949,14					1	694,69					12	60.643,83
33	PAPUA	40	976.416,94	2	21.162,53							1	130,56	43	997.710,03
34	PAPUA BARAT	24	416.811,78	2	15.238,26									26	432.050,04
35	PAPUA TENGAH														-
36	PAPUA PEGUNUNGAN														-
37	PAPUA SELATAN														-
38	PAPUA BARAT DAYA														-
	TOTAL	827	#####	26	103.399,02	14	56.620,90	23	99.661,5	53	234.997,46	16	37.727,50	959	7.586.111,63

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d Desember 2023



PEMBANGUNGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)



TABEL V.1. PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN																							
					SID 2013		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023							
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)						
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1.	Aceh	1. Rancang Bangun 2. Araran Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.1737/VII-WP3H/2013 SK. 292/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2022	31 Desember 2013 6 April 2022	6 6	2.544.205 2.521.333														15	2.487.546							
2.	Sumatera Utara	1. Rancang Bangun 2. Araran Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK. 150/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2023	 21 Februari 2023	35 33 33	3.202.990 3.204.780 3.196.381																33	2.584.840					
3.	Sumatera Barat	1. Rancang Bangun 2. Araran Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK. 447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	 6 Agustus 2021	9 9 11	1.681.204 1.681.204 1.679.564												12	1.521.195									
4.	Riau	1. Rancang Bangun 2. Araran Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.632/VII-WP3H/2010 SK.759/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2023	15 September 2010 11 Juli 2023	38 30	3.634.974 3.661.305							32	3.591.066								32	4.726.990					
5.	Kepulauan Riau	1. Rancang Bangun 2. Araran Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	S.257/VII-WP3H/2010 52/2969/2010 SK.1023/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022	6 Mei 2010 30 September 2015 21 September 2022	6 6	259.617 281.384	295																					
6.	Jambi	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK. 77/Menhut-VII/2010	 10 Pebruari 2010	18 17 17	1.503.320 1.444.198 1.461.000															6	370.398						
7.	Bengkulu	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK. 440/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021	 5 Agustus 2021	5 7 7	462.734 481.195 472.664												7	467.997									
8.	Bangka Belitung	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK. 797/Menhut-VII/2009	 7 Desember 2009	13 13	628.165 641.801																						
9.	Sumatera Selatan	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK. 248/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2022	 21 Maret 2022	20 24 24	2.601.689 2.433.934 2.558.407																						
10.	Lampung	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK. 68/Menhut-II/2010	 28 Januari 2010	12 16 16	501.549 542.705 518.913														16	2.617.888							
11.	DI. Yogyakarta	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK.122/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2018	 5 Maret 2018	1 1	16.359 16.359						1	15.581															
12.	Bali	1. Rancang Bangun 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	 SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018	 12 Februari 2018	3 4 4	106.427 110.310 105.766																						

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					SID 2013		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13.	Nusa Tenggara Barat	1. Rancang Bangun	SK. 337/Menhut-VII/2009	15 Juni 2009	23	908.834																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2. Arahana Pencadangan			23	903.816																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			23	889.210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14.	Nusa Tenggara Timur	1. Rancang Bangun	SK. 664/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017	28 November 2017	17	1.240.787																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2. Arahana Pencadangan			17	1.240.787																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			17	1.240.787																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan			22	1.247.962			22	1.132.925																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15.	Kalimantan Barat	1. Rancang Bangun	SK. 968/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022	6 September 2022	38	6.966.136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2. Arahana Pencadangan			33	6.966.136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			34	6.973.613			34	6.549.542																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		4. Penetapan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16.	Kalimantan Tengah	1. Rancang Bangun	S. 207/VII-WP3/H/2011	11 Februari 2011	31	8.535.128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2. Arahana Pencadangan			34	8.510.524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4. Penetapan			66	17.021.048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17.	Kalimantan Timur	1. Rancang Bangun	SK.1149/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2023	31 Oktober 2023	33	12.486.355																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2. Arahana Pencadangan			36	12.606.634																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4. Penetapan			34	12.567.139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18.	Kalimantan Selatan	1. Rancang Bangun	SK.560/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2023	6 Juni 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2. Arahana Pencadangan			10	1.390.224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			10	1.315.485																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan			10	1.403.761							10	1.487.085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
19.	Gorontalo	1. Rancang Bangun	SK. 363/Menhk/Setjen/PLA.0/7/2021	1 Juli 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2. Arahana Pencadangan			7	620.082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			7	583.290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan			7	581.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20.	Sulawesi Utara	1. Rancang Bangun	SK. 65/Menhut-II/2010	28 Januari 2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2. Arahana Pencadangan			7	974.232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			9	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan			9	429.988			6	435.195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21.	Sulawesi Tengah	1. Rancang Bangun	SK. 395/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2021	19 Juli 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2. Arahana Pencadangan			24	3.549.606																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			21	3.218.226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan			21	3.199.086								21	3.269.484																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22.	Sulawesi Selatan	1. Rancang Bangun	SK. 399/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2021	19 Juli 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2. Arahana Pencadangan			22	1.835.163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			10	2.068.189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan			10	1.814.490			16	1.819.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23.	Sulawesi Tenggara	1. Rancang Bangun	SK.371/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2020	17 September 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		2. Arahana Pencadangan			28	2.083.166																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3. Usulan Penetapan			25	2.137.155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4. Penetapan			25	2.056.922								25	1.984.353																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			SK.459/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2020	11 Desember 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN																	
					SID 2013		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
24.	Sulawesi Barat	1. Rancang Bangun	SK. 799/Menhut-II/2009	7 Desember 2009	11	862.491																
		2. Arahan Pencadangan			11	861.745																
		3. Usulan Penetapan			13	1.099.827																
		4. Penetapan																				
25	Maluku	1. Rancang Bangun	SK. 103/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2023	6 Februari 2023	18	2.246.425																
		2. Arahan Pencadangan			22	2.207.864																
		3. Usulan Penetapan																				
		4. Penetapan																				
26.	Maluku Utara	1. Rancang Bangun	SK. 900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2021	8 Oktober 2021	16	1.730.281									16	2.278.992						
		2. Arahan Pencadangan																				
		3. Usulan Penetapan																				
		4. Penetapan			16	1.768.424																
27	Papua	1. Rancang Bangun	SK. 28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020	10 Januari 2020	56	18.180.146																
		2. Arahan Pencadangan			56	18.239.238																
		3. Usulan Penetapan			56	18.180.201																
		4. Penetapan																				
28	Papua Barat	1. Rancang Bangun	SK. 113/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2022	4 Februari 2022	21	5.388.407																
		2. Arahan Pencadangan			21	5.404.745																
		3. Usulan Penetapan			21	5.404.745																
		4. Penetapan																				

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. Desember 2023

Ket :
Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH
Wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Utara masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur

TABEL V.2. PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN Luas (ha)					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa	KPHL Unit III Aceh	SK. 392/Menhut-II/2013	27/12/2013	406.273	276.118	-	-	-	682.391
2	Sumatera Utara	Mandailing Natal	KPHP Mandailing Natal	SK. 332/Menhut-II/2010	25/05/2010	12.681	14.704	131.781	-	-	159.166
3	Sumatera Utara	Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara	KPHL Unit XXII	SK. 993/Menhut-II/2013	27/12/2013	65.038	-	51.189	-	-	116.227
4	Sumatera Utara	Toba Samosir	KPHL Tobasamosir	SK. 866/Menhut-II/2013	05/12/2013	75.762	5.191	6.294	-	-	87.247
5	Sumatera Barat	Dharmasraya	KPHP Dharmasraya	SK. 695/Menhut-II/2013	21/11/2013	-	17.721	15.829	-	-	33.550
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	KPHP Pesisir Selatan	SK. 696/Menhut-II/2013	21/11/2013	9.091	4.563	46.274	-	-	59.928
7	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar	KPHL Bukit Barisan	SK. 867/Menhut-II/2013	05/12/2013	69.504	16.759	245	-	-	86.508
8	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	SK. 44/Menhut-II/2012	02/02/2012	94.883	5.286	17.383	-	-	117.552
9	Sumatera Barat	Sijunjung	KPHL Sijunjung	SK. 331/Menhut-II/2010	25/05/2010	83.952	40.785	25.755	-	-	150.492
10	Sumatera Barat	Solok	KPHL Solok (unit VI)	SK. 42/Menhut-II/2012	02/02/2012	114.061	3.481	12.804	-	-	130.346
11	Sumatera Selatan	Banyuasin	KPHL Banyuasin	SK. 961/Menhut-II/2013	27/12/2013	69.147	5.660	-	-	-	74.807
12	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Meranti	SK. 689/Menhut-VII/2012	29/11/2012	20.082	134.597	97.588	-	-	252.267
13	Sumatera Selatan	Musi Rawas	KPHP Rawas	SK. 888/Menhut-VII/2012	29/11/2012	-	89.511	32.074	-	-	121.585
14	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat	KPHP Unit XIV Benakat Revisi	SK. 827/Menhut-II/2013	19/11/2013	-	256.594	-	-	-	256.594
15	Sumatera Selatan	Mus Rawas	KPHP Laktian Unit VI	SK. 790/Menhut-II/2009	07/12/2009	-	76.776	-	-	-	76.776
16	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Lalan	SK. 789/Menhut-II/2009	07/12/2009	-	265.953	-	-	-	265.953
17	Kepulauan Riau	Karimun	KPHL Karimun	SK. 442/Menhut-II/2012	09/08/2012	9.605	-	8.002	-	-	17.607
18	Riau	Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru	KPHP Minas Tahura	SK. 765/Menhut-II/2012	26/12/2012	-	140.562	-	-	6.172	146.734
19	Riau	Kampar	KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)	SK. 640/Menhut-II/2011	07/11/2011	24.028	-	119.755	-	-	143.783
20	Riau	Kepulauan Meranti	KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)	SK. 343/Menhut-II/2011	28/06/2011	412	-	69.335	-	-	69.747
21	Riau	Pelawan, Siak	KPHP Tasik Besar Serkap	SK. 509/Menhut-II/2010	21/09/2010	-	491.768	2.660	18.848	-	513.276
22	Kep. Bangka Belitung	Bangka	KPHP Sigambir-Kotawaringin	SK. 962/Menhut-II/2013	27/12/2013	4.769	30.169	-	-	-	34.938
23	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	KPHP Sungai Sembulan	SK. 329/Menhut-II/2010	25/05/2010	5.185	34.228	-	-	-	39.413
24	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	KPHP Rambat Menduyung	SK. 763/Menhut-II/2012	26/12/2012	8.803	50.819	-	-	-	59.622
25	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	KPHP Gunung Duren	SK. 764/Menhut-II/2012	26/12/2012	12.615	45.620	-	-	-	58.235
26	Bengkulu	Bengkulu Utara	KPHP Bengkulu Utara	SK. 995/Menhut-II/2013	27/12/2013	165	9.546	42.640	-	-	52.351
27	Bengkulu	Muko-Muko	KPHP Muko-Muko	SK. 330/Menhut-II/2010	25/05/2010	-	11.937	66.337	-	-	78.274
28	Bengkulu	Rejang Lebong	KPHL Bukit Balai Rejang	SK. 994/Menhut-II/2013	27/12/2013	16.059	-	-	-	-	16.059
29	Jambi	Kerinci	KPHP Kerinci	SK. 960/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	34.250	-	-	-	34.250
30	Jambi	Merangin	KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai	SK. 43/Menhut-II/2012	02/02/2012	36.088	9.944	30.105	-	-	76.137
31	Jambi	Sarolangun	KPHP Limau unit VII	SK. 714/Menhut-II/2011	19/12/2011	54.793	43.807	22.502	-	-	121.102
32	Jambi	Tanjung Jabung Barat	KPHL Sungai Beram Hitam	SK. 787/Menhut-II/2009	07/12/2009	15.965	-	-	-	-	15.965
33	Lampung	Pesawaran	KPHL Pesawaran	SK. 438/Menhut-II/2012	09/08/2012	9.944	1.260	-	-	-	11.204

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN Luas (ha)					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
34	Lampung	Way Kanan	KPHP Bukit Punggur	SK.439/Menhut-II/2012	09/08/2012	19.131	21.995	-	-	-	41.126
35	Lampung	Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus	KPHL Batu Tegi	SK. 650/MenhutII/2010	22/11/2010	58.162	-	-	-	-	58.162
36	Lampung	Lampung Selatan	KPHL Rajabasa (Unit XIV)	SK.367/MenhutII/2011	07/07/2011	5.160	-	-	-	-	5.160
37	Lampung	Lampung Selatan, Lampung Timur	KPHP Gedung Wani (Unit XVI)	SK.427/MenhutII/2011	27/07/2011	-	30.243	-	-	-	30.243
38	Lampung	Lampung Tengah	KPHP Register 47 Way Terusan	SK. 794/MenhutII/2009	07/12/2009	-	12.500	-	-	-	12.500
39	Lampung	Mesuji	KPHP Sungai Buaya	SK.996/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	44.249	-	-	-	44.249
40	Lampung	Tanggamus	KPHL Kotaagung Utara (Unit X)	SK.379/MenhutII/2011	18/07/2011	56.020	-	-	-	-	56.020
41	Lampung	Tulang Bawang, Way Kanan	KPHP Muara Dua	SK.236/MenhutII/2011	10/05/2012	-	49.134	-	-	-	49.134
42	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo	KPHP Yogyakarta	SK. 721/MenhutII/2011	20/12/2011	2.313	13.412	-	-	-	15.725
43	Bali	Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung	KPHL Bali Tengah (Unit II)	SK. 620/MenhutII/2011	01/11/2011	14.651	-	-	-	-	14.651
44	Bali	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	KPHL Bali Timur (Unit III)	SK. 621/MenhutII/2011	01/11/2011	21.891	1.087	-	-	-	22.978
45	Bali	Jembrana, Buleleng, Tabanan	KPHL Bali Barat	SK. 784/MenhutII/2009	07/12/2009	59.848	1.892	1.610	-	-	63.350
46	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu	KPHP Tambora Utara	SK.970/Menhut-II/2013	27/12/2013	-	14.769	12.151	-	-	26.920
47	Nusa Tenggara Barat	Bima dan Kota Bima	KPHP Maria Unit XXIII	SK.752/Menhut-II/2012	26/12/2012	8.515	4.554	14.563	-	-	27.632
48	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHL Ampang	SK.751/Menhut-II/2012	26/12/2012	24.168	8.261	6.252	-	-	38.681
49	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	KPHL Rinjani Barat	SK. 785/MenhutII/2009	07/12/2009	28.911	5.075	6.977	-	-	40.963
50	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	KPHL Tastura	SK.963/Menhut-II/2013	27/12/2013	11.153	5.000	-	-	-	16.153
51	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	KPHL Rinjani Timur	SK.225/MenhutII/2012	04/05/2012	31.987	5.602	-	-	-	37.589
52	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHP Batulanteh (Unit IX)	SK.342/MenhutII/2011	28/06/2011	14.303	14.842	3.631	-	-	32.776
53	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	KPHP Sejong	SK.971/Menhut-II/2013	27/12/2013	15.762	5.274	19.952	-	-	40.988
54	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	KPHP Rote Ndao	SK. 333/MenhutII/2010	25/05/2010	15.509	25.221	-	-	-	40.730
55	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	KPHL Flores Timur	SK.972/Menhut-II/2013	27/12/2013	39.856	1.793	13.759	-	-	55.408
56	Nusa Tenggara Timur	Alor	KPHL Alor Pantar	SK.767/Menhut-II/2012	26/12/2012	59.419	22.938	21.977	-	-	104.334
57	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan	KPHL Mutis Timau (Unit XIX)	SK.417/MenhutII/2012	02/02/2012	97.005	-	18.375	-	-	115.380
58	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	KPHP Manggarai Barat	SK.973/Menhut-II/2013	27/12/2013	27.113	18.613	14.571	-	-	60.297
59	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)	SK.380/MenhutII/2011	18/07/2011	224.522	83.241	150.262	-	-	458.025
60	Kalimantan Barat	Kelapang	KPHP Kendawangan	SK.680/MenhutII/2012	23/11/2012	16.268	162.583	-	-	-	178.851
61	Kalimantan Barat	Sintang	KPHP Sungai Merakai	SK. 791/MenhutII/2009	07/12/2009	10.420	46.473	-	-	-	56.893
62	Kalimantan Timur	Berau	KPHP Berau Barat	SK. 649/MenhutII/2010	22/11/2010	247.025	118.261	410.253	-	-	775.539
63	Kalimantan Utara	Bulungan	KPHP Kayan	SK.223/MenhutII/2012	04/05/2012	168.198	9.776	309.868	-	-	487.842
64	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	KPHP Meratus	SK.768/Menhut-II/2012	26/12/2012	-	274.159	113.329	-	-	387.488
65	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	KPHL Tarakan	SK. 783/MenhutII/2009	07/12/2009	2.400	-	2.223	-	-	4.623
66	Kalimantan Utara	Malinau	KPHP Malinau	SK.224/MenhutII/2012	04/05/2012	220.723	110.518	384.271	-	-	715.512
67	Kalimantan Timur	Paser	KPHP Kendilo	SK.966/MenhutII/2013	27/12/2013	44.152	61.051	34.032	-	-	139.235
68	Kalimantan Selatan	Banjarnegara	KPHP Banjar	SK. 793/MenhutII/2009	07/12/2009	42.090	72.513	25.354	-	-	139.957
69	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	KPHL Hulu Sungai Selatan	SK.750/Menhut-II/2012	26/12/2012	21.221	11.530	52	-	-	32.803
70	Kalimantan Selatan	Kota baru	KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III)	SK.226/MenhutII/2012	04/05/2012	12.863	99.395	-	-	-	112.258

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN Luas (ha)					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
71	Kalimantan Selatan	Tabalong	KPHP Tabalong	SK. 997/Menhut-II/2013	27/12/2013	48.776	44.759	23.822	-	-	117.357
72	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	KPHP Tanah Laut	SK. 440/Menhut-II/2012	09/08/2012	15.862	71.490	5.289	-	-	92.641
73	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	KPHL Gerbang Barito	SK. 964/Menhut-II/2013	27/12/2013	90.361	43.345	20.961	-	-	154.667
74	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	KPHP Gunung Mas	SK. 974/Menhut-II/2013	27/12/2013	57.337	50.107	187.291	-	-	294.735
75	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	KPHP Kota Waringin Barat	SK. 749/Menhut-II/2012	19/12/2011	9.672	257.160	49.303	-	-	316.135
76	Kalimantan Tengah	Lamandau	KPHL Lamandau	SK. 717/Menhut-II/2012	26/12/2012	25.432	19.906	180.951	-	-	226.289
77	Kalimantan Tengah	Kapuas	KPHL Kapuas	SK. 247/Menhut-II/2011	02/05/2011	105.372	-	-	-	-	105.372
78	Kalimantan Tengah	Murung Raya	KPHP Murung Raya	SK. 965/Menhut-II/2013	27/12/2013	103.578	205.729	598.948	-	-	908.255
79	Kalimantan Tengah	Seruyan	KPHP Seruyan (Unit XXI)	SK. 716/Menhut-II/2011	19/12/2011	38.970	6.112	328.827	-	-	373.909
80	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan	KPHP Poigar	SK. 788/Menhut-II/2009	07/12/2009	5.265	19.739	16.594	-	-	41.598
81	Gorontalo	Boalemo	KPHP Bolaemo (Unit V)	SK. 402/Menhut-II/2011	21/07/2011	29.383	12.403	55.140	-	-	96.926
82	Gorontalo	Gorontalo	KPHP Gorontalo	SK. 976/Menhut-II/2013	27/12/2013	13.126	17.781	40.775	-	-	71.682
83	Gorontalo	Gorontalo Utara	KPHP Gorontalo Utara	SK. 766/Menhut-II/2012	26/12/2012	18.632	15.759	71.417	-	-	105.808
84	Gorontalo	Pohuwato	KPHL Unit III Pohuwato	SK. 334/Menhut-II/2010	25/05/2010	59.301	13.605	43.369	-	-	116.275
85	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	KPHP Toji Batunube	SK. 967/Menhut-II/2013	27/12/2013	126.447	55.389	94.800	-	-	276.636
86	Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi, Moutong	KPHP Dampelas Tinombo	SK. 792/Menhut-II/2009	07/12/2009	21.017	10.244	69.651	-	-	100.912
87	Sulawesi Tengah	Banggai	KPHP Balantak	SK. 754/Menhut-II/2012	26/12/2012	30.418	28.049	58.936	-	-	117.403
88	Sulawesi Tengah	Buol	KPHP Pogogul	SK. 756/Menhut-II/2012	26/12/2012	44.257	54.008	101.268	-	-	199.533
89	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu	KPHP Dolego Tanggunung	SK. 755/Menhut-II/2012	26/12/2012	67.794	19.008	57.548	-	-	144.350
90	Sulawesi Tengah	Poso	KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu	SK. 639/Menhut-II/2011	07/11/2011	46.341	28.740	62.349	-	-	137.430
91	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	SK. 968/Menhut-II/2013	27/12/2013	39.921	10.827	61.744	-	-	112.492
92	Sulawesi Barat	Mamuju, Mamasa	KPHL Ganda Dewata	SK. 441/Menhut-II/2012	09/08/2012	157.598	-	-	-	-	157.598
93	Sulawesi Barat	Majene	KPHL Malunda	SK. 753/Menhut-II/2012	26/12/2012	45.109	-	6.962	-	-	52.071
94	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)	SK. 340/Menhut-II/2011	27/06/2011	33.218	-	4.744	-	-	37.962
95	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHL Mamasa Barat (Unit VII)	SK. 341/Menhut-II/2011	27/06/2011	17.352	-	36.203	-	-	53.555
96	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	KPHL Unit II Lariang	SK. 60/Menhut-II/2011	28/02/2011	34.512	2.394	21.010	-	-	57.916
97	Sulawesi Barat	Mamuju, Mamuju Tengah	KPHP Budong-Buddong	SK. 998/Menhut-II/2013	27/12/2013	5.463	36.461	86.172	-	-	128.096
98	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	KPHL Mapili	SK. 651/Menhut-II/2010	22/11/2010	53.485	-	23.711	-	-	77.196
99	Sulawesi Tenggara	Bombana	KPHP Tina Orima bombana	SK. 426/Menhut-II/2011	27/07/2011	23.659	74.514	17.953	-	-	116.126
100	Sulawesi Tenggara	Buana	KPHP Unit III Lakompa	SK. 795/Menhut-II/2009	07/12/2009	12.432	11.880	6.288	-	-	30.600
101	Sulawesi Tenggara	Buana	KPHL Peropa-Ea Gantara	SK. 975/Menhut-II/2013	27/12/2013	15.157	-	2.571	-	-	17.728
102	Sulawesi Tenggara	Konawe	KPHL Konawe	SK. 762/Menhut-II/2012	26/12/2012	96.941	8.018	35.668	-	-	140.627
103	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan, Kota Kendari	KPHP Unit XXIV Gularaya	SK. 61/Menhut-II/2011	28/02/2011	41.405	89.343	3.671	-	-	134.419
104	Sulawesi Selatan	Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, Jeneponto	KPHP Jeneberang (Unit IX)	SK. 715/Menhut-II/2011	19/12/2011	60.451	45.471	54.932	-	-	160.854
105	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	KPHL Larona Maili (Unit I)	SK. 722/Menhut-II/2011	20/12/2011	156.593	6.391	79.008	-	-	241.992
106	Sulawesi Selatan	Wajo	KPHP Awota	SK. 979/Menhut-II/2013	27/12/2013	5.539	13.532	-	-	-	19.071
107	Maluku Utara	Halmahera Selatan	KPHP Bacan	SK. 969/Menhut-II/2013	27/12/2013	62.836	7.760	70.212	-	-	140.808

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN Luas (ha)					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
108	Maluku Utara	Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan	KPHP Gunung Sinopa	SK. 337/Menhut-II/2010	25/05/2010	21.056	9.604	13.917	-	-	44.577
109	Maluku	Buru	KPHP Wae Apu	SK. 770/Menhut-II/2012	26/12/2012	73.478	62.921	96.033	-	-	232.432
110	Maluku	Maluku Tengah	KPHP Wae Sapalewa	SK. 336/Menhut-II/2010	25/05/2010	4.545	34.609	27.903	-	-	67.057
111	Maluku	Buru, Buru Selatan	KPHP Wae Tina	SK. 977/Menhut-II/2013	27/12/2013	51.599	86.938	65.847	-	-	204.384
112	Maluku	Seram Bagian Timur	KPHP Wae Bubi	SK. 978/Menhut-II/2013	27/12/2013	12.666	11.059	42.739	-	-	66.464
113	Papua Barat	Sorong Selatan	KPHP Sorong Selatan	SK. 771/Menhut-II/2012	26/12/2012	121.361	73.189	88.710	-	-	283.260
114	Papua Barat	Kota Sorong	KPHL Kota Sorong (remu)	SK. 999/Menhut-II/2013	27/12/2013	6.602	-	6.173	-	-	12.775
115	Papua Barat	Sorong	KPHP Sorong	SK. 701/Menhut-II/2010	20/12/2010	11.789	111.444	100.136	-	-	223.369
116	Papua	Biak Numfor	KPHL Biak Numfor	SK. 648/Menhut-II/2010	22/11/2010	120.340	30.527	55.149	-	-	206.016
117	Papua	Keerom	KPHP Keerom Revisi	SK. 828/Menhut-II/2013	19/11/2013	49.196	30.330	93.930	-	-	173.456
118	Papua	Sarmi dan Jayapura	KPHP Mamberamo Revisi	SK. 829/Menhut-II/2013	19/11/2013	50.492	46.105	159.217	-	-	255.814
119	Papua	Waropen	KPHP Waropen	SK. 760/Menhut-II/2012	26/12/2012	83.372	97.691	5.899	-	-	186.962
120	Papua	Kepulauan Yapen	KPHP Yapen	SK. 786/Menhut-II/2009	07/12/2009	15.100	90.767	-	-	-	105.867

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Penbentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2023

TABEL V.3. PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
1	2	3	4	5	6
1	TN BALI BARAT	Bali	SK.780/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	19.002,00
2	TN UJUNG KULON	Banten	SK.775/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	122.956,00
3	TN BERBAK	Jambi	SK.774/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	62.700,00
4	TN GUNUNG HALIMUN SALAK	Jawa Barat	SK.776/Menhut-II/200	07 Desember 2009	113.357,00
5	TN ALAS PURWO	Jawa Timur	SK.801/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	43.420,00
6	TN MERU BETIRI	Jawa Timur	SK.779/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	58.000,00
7	TN TANJUNG PUTING	Kalimantan Tengah	SK.777/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	415.040,00
8	TN KUTAI	Kalimantan Timur	SK.778/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	198.629,00
9	TN GUNUNG RINJANI	Nusa Tenggara Barat	SK.781/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	41.330,00
10	TN BUNAKEN	Sulawesi Utara	SK.782/Menhut-II/2009	07 Desember 2009	89.065,00
11	TN BOGANI NANI WARTABONE	Sulawesi Utara dan Gorontalo	SK.716/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	287.115,00
12	TN BUKIT DUA BELAS	Jambi	SK.720/Menhut -II/2010	29 Desember 2010	60.500,00
13	TN GUNUNG MERAPI	Jawa Tengah	SK.713/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	6.410,00
14	TN BALURAN	Jawa Timur	SK.718/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	25.000,00
15	TN DANAU SENTARUM	Kalimantan Barat	SK.715/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	132.000,00
16	TN GUNUNG PALUNG	Kalimantan Barat	SK.721/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	90.000,00
17	TN WAY KAMBAS	Lampung	SK.712/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	130.000,00
18	TN LAIWANGI WANGGAMETI	Nusa Tenggara Timur	SK.714/Menhut II/2010	29 Desember 2010	47.014,00
19	TN MANUPEU TANAH DARU	Nusa Tenggara Timur	SK.719/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	87.984,00
20	TN BANTIMURUNG BULUSARUNG	Sulawesi Selatan	SK.717/Menhut-II/2010	29 Desember 2010	43.750,00
21	TN GUNUNG MERBABU	Jawa Tengah	SK.751/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.725,00
22	TN KARIMUNJAWA	Jawa Tengah	SK.749/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	111.625,00
23	TN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	Kalimantan Barat	SK.750/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	181.090,00
24	TN KAYAN MENTARANG	Kalimantan Utara	SK.752/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	1.360.500,00
25	TN MANUSELA	Maluku	SK.756/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	189.000,00
26	TN AKETAJAWE LOLOBATA	Maluku Utara	SK.757/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	167.300,00
27	TN KELIMUTU	Nusa Tenggara Timur	SK.754/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	5.356,50
28	TN KOMODO	Nusa Tenggara Timur	SK.753/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	173.000,00
29	TN RAWA AOPA WATUMOHAI	Sulawesi Tenggara	SK.755/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	105.194,00
30	TN SEMBILANG	Sumatera Selatan	SK.748/Menhut-II/2011	30 Desember 2011	202.896,31
31	TN GUNUNG CIREMAI	Jawa Barat	SK.790/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	15.500,00
32	TN SEBANGAU	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	568.700,00
33	TN LORENTZ	Papua	SK.792/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	2.354.644,00
34	TN WASUR	Papua	SK.793/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	413.810,00
35	TN BUKIT TIGAPULUH	Riau	SK.789/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	144.223,00
36	TN TESSO NILO	Riau	SK.788/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	38.576,00
37	TN SIBERUT	Sumatera Barat	SK.787/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	190.500,00

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
38	TN BATANG GADIS	Sumatera Utara	SK.786/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	72.150,00
39	RAWA SINGKIL	Aceh	SK.980/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	102.500
40	NANTU	Gorontalo	SK.990/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	31.215
41	GUNTUR - PAPANDAYAN	Jawa Barat	SK.984/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	15.318
42	GUNUNG MELINTANG	Kalimantan Barat	SK.987/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	25.127
43	TAMBORA	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	78.116
44	RUTENG	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	32.248
45	JAYAWIJAYA	Papua	SK.991/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	800.000
46	KERUMUTAN	Riau	SK.981/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	120.000
47	TOWUTI	Sulawesi Selatan	SK.989/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	185.000
48	ARAU HILIR	Sumatera Barat	SK.982/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	105.375
49	DANGKU BENTAYAN	Sumatera Selatan	SK.983/Menhut-II/2013	27 Desember 2013	89.574
50	BEDUGUL SANGEH	Bali	SK.475/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	3.635
51	KINTAMANI	Bali	SK.476/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	2.649
52	BUKIT KABA	Bengkulu	SK.469/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	15.133
53	CILACAP	Jawa Tengah	SK.472/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	982
54	PATI BARAT	Jawa Tengah	SK.471/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	1.426
55	KUALA LUPAK	Kalimantan Selatan	SK.466/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	4.008
56	LAMANDAU	Kalimantan Tengah	SK.474/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	61.425
57	PARAWEN	Kalimantan Tengah	SK.473/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	5.855
58	ARFAK	Papua Barat	SK.458/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	68.325
59	BOLMALIT MAGHLIT	Papua Barat	SK.450/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	9.194
60	GUNUNG MEJA SIDI KAIRONI	Papua Barat	SK.457/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	968
61	SORONG KLAMONO	Papua Barat	SK.456/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	2.990
62	WAIGEO	Papua Barat	SK.459/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	264.073
63	BUKIT RIMBANG BUKIT Baling	Riau	SK.468/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	142.156
64	GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU	Riau	SK.467/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	99.858
65	BAKIRIANG	Sulawesi Tengah	SK.461/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	17.479
66	GUNUNG TINOMBALA	Sulawesi Tengah	SK.464/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	38.608
67	GUNUNG DAKO	Sulawesi Tengah	SK.465/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	21.659
68	MOROWALI	Sulawesi Tengah	SK.460/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	216.908
69	PAMONA	Sulawesi Tengah	SK.462/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	35.125
70	PANGI BINANGGA	Sulawesi Tengah	SK.463/Menhk/Sejten/PLA.06/2016	17 Juni 2016	70.997
71	BARUMUN	Sumatera Utara	SK.694/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	02 September 2016	36.261
72	LINGGA ISAQ	Aceh	SK.747/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	86.634
73	PULAU WEH	Aceh	SK.746/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	6.481
74	ENGGANO	Bengkulu	SK.723/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	9.281
75	JAKARTA	Jakarta	SK.731/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	242
76	DURIAN LUNCUK	Jambi	SK.735/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	111
77	HUTAN BAKAU PANTAI TIMUR	Jambi	SK.736/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	4.872

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
78	BURANGRANG TANGKUBAN PERAHU	Jawa Barat	SK.740/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	4.772
79	SIMPANG TILU	Jawa Barat	SK.739/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	23.356
80	DATARAN TINGGI YANG	Jawa Timur	SK.726/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	12.865
81	KAWAH IJEN	Jawa Timur	SK.725/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	2.575
82	GUNUNG NYIUT	Kalimantan Barat	SK.738/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	91.759
83	MUARA KENDAWANGAN	Kalimantan Barat	SK.737/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	147.614
84	HARLU	Kalimantan Timur	SK.744/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	3.681
85	MUARA KAMAN SEDULANG	Kalimantan Timur	SK.728/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	65.445
86	KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung	SK.732/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	13.365
87	GUNUNG SAHUWAI	Maluku	SK.729/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	32.476
88	TALIABU	Maluku	SK.730/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	13.114
89	GUNUNG TUNAK	Nusa Tenggara Barat	SK.742/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	2.225
90	MOYO	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	30.945
91	GUNUNG MUTIS	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	12.315
92	CYCLOOPS YOUTEFA	Papua	SK.727/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	33.289
93	LAMBUSANGO	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	28.595
94	PEROPA	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	44.012
95	TANGKOKO	Sulawesi Utara	SK.748/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	8.545
96	PADANG SUGIHAN	Sumatera Selatan	SK.743/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	88.148
97	SICKE CIKE	Sumatera Utara	SK.724/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	6.144
98	YOGYAKARTA	Yogyakarta	SK.749/Menhk/Sejten/PLA.09/2016	20 September 2016	632
99	SANGIANG	Nusa Tenggara Barat	SK.421/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	11.546
100	SEMONGKAT	Nusa Tenggara Barat	SK.418/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1.783
101	SURANADI	Nusa Tenggara Barat	SK.420/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	448
102	TALIWANG	Nusa Tenggara Barat	SK.419/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	6608,2
103	ALE AISIO	Nusa Tenggara Timur	SK.429/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	9.825,00
104	CAMPLONG	Nusa Tenggara Timur	SK.428/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1.015
105	KATERI	Nusa Tenggara Timur	SK.427/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	7.945,32
106	NDETA KILIKIMA	Nusa Tenggara Timur	SK.423/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1.847
107	RIUNG	Nusa Tenggara Timur	SK.426/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	11.829
108	TELUK KUPANG	Nusa Tenggara Timur	SK.431/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	67.628
109	TELUK MAUMERE	Nusa Tenggara Timur	SK.425/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	9.013,00
110	TUTI ADAGAE	Nusa Tenggara Timur	SK.422/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	7.700
111	WAE WUUL	Nusa Tenggara Timur	SK.424/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	1484,84
112	IWATU ATA	Nusa Tenggara Timur	SK.430/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	4898,8
113	NABIRE-TANJUNG WIAJ	Papua	SK.432/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	4.462
114	DOLOK SURUNGAN	Sumatera Utara	SK.414/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	22241
115	DOLOK TINGGI RAJA	Sumatera Utara	SK.413/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	408,00
116	HOLIDAY RESORT	Sumatera Utara	SK.415/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	2.100
117	KARANG GADING DAN LANGKAT TIMUR LAUT	Sumatera Utara	SK.410/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	13.474
118	SIBOLANGIT	Sumatera Utara	SK.411/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	596
119	SIJABA HUTAGINJANG	Sumatera Utara	SK.417/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	416,00

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
120	SIPIROK	Sumatera Utara	SK.412/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	15.330,00
121	TAMAN BURU PULAU PINI	Sumatera Utara	SK.416/MENLHK/SETJEN/PLA.08/2017	21 Agustus 2017	8.325,00
122	JHANTOI	Aceh	SK.123/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	19.487,00
123	PULAU BANYAK	Aceh	SK.124/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	205.720,24
124	PANTAI PANJANG	Bengkulu	SK.127/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	1.559,00
125	SEBLAT	Bengkulu	SK.126/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	8.138,75
126	SABLOKARE	Jawa Tengah	SK.130/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	292,00
127	BAUNG-ABANG-TRETES	Jawa Timur	SK.134/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	266,00
128	NUSA BARUNG-WATANGAN-CURAH MANIS	Jawa Timur	SK.131/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	7.655,34
129	PICIS-SIGOGOR-NGLIRIP-MANGGIS-BESOWO	Jawa Timur	SK.135/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	245,00
130	PULAU SAOBI	Jawa Timur	SK.133/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	436,83
131	PULAU SEMPU	Jawa Timur	SK.132/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	977,00
132	KELAM KOMPLEK	Kalimantan Barat	SK.137/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	1.334,00
133	KEPULAUAN KARIMATA	Kalimantan Barat	SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	190.745,00
134	MANDOR-PASI	Kalimantan Barat	SK.138/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	6.064,00
135	TANAH LAUT-GUNUNG KENTAWAN	Kalimantan Selatan	SK.140/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	8.404,17
136	TANJUNG KELUANG	Kalimantan Tengah	SK.139/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	2.478,17
137	KO MARA	Sulawesi Selatan	SK.144/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	10.196,00
138	MARIO	Sulawesi Selatan	SK.143/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	5.334,00
139	BUTON UTARA	Sulawesi Tenggara	SK.142/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	91.025,00
140	IMANGOLO	Sulawesi Tenggara	SK.141/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	4.567,31
141	LIMA PULUH KOTO	Sumatera Barat	SK.125/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	10.829,00
142	GUMAI PASEMAH	Sumatera Selatan	SK.128/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	46.122,60
143	GUNUNG RAYA	Sumatera Selatan	SK.129/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2018	05 Maret 2018	44.996,11
144	PEWOBA	Jawa Tengah	SK.301/MENLHK/SETJEN/PLA.07/2018	05 Juli 2018	382,00
145	BAWEAN - NOKO NUSA	Jawa Timur	SK.299/MENLHK/SETJEN/PLA.07/2018	05 Juli 2018	4.561,00
146	PELANGAN	Nusa Tenggara Barat	SK.302/MENLHK/SETJEN/PLA.07/2018	05 Juli 2018	2.600,00
147	TN ZAMRUD	Riau	SK.204/MENLHK/SETJEN/PLA.03/2019	06 Maret 2019	31.480,00
148	TAHURA BUNDER	Yogyakarta	SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.05/2019	21 Mei 2019	771,32
149	TAHURA PUCUT MEURAH INTAN	Aceh	SK. 293/MENLHK/SETJEN/PLA.04/2022	06 April 2022	6.200,00
TOTAL					12.774.532,40

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. 31 Desember 2023

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

TABEL V.4. DAFTAR KPH BERLEMBAGA DAN UNIT-UNIT YANG DINAUNGI

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
Aceh	1	KPH WILAYAH I	UNIT I UNIT XV	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 tahun 2024
	2	KPH WILAYAH II	UNIT II	
	3	KPH WILAYAH III	UNIT X	
	4	KPH WILAYAH IV	UNIT XI	
	5	KPH WILAYAH V	UNIT III	
	6	KPH WILAYAH VI	UNIT VI UNIT VII	
	7	KPH WILAYAH VII	UNIT IV UNIT V	
	8	KPH WILAYAH VIII	UNIT VIII UNIT IX	
	9	KPH WILAYAH IX	UNIT XII UNIT XIII	
	10	KPH WILAYAH X	UNIT XIV	
Bengkulu	1	KPHL Bengkulu Selatan	UNIT V	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
	2	KPHL Bukit Balai Rejang	UNIT VII	
	3	KPHL Bukit Daun	UNIT III	
	4	KPHL Kaur	UNIT VI	
	5	KPHL Seluma	UNIT IV	
	6	KPHP Bengkulu Utara	UNIT II	
	7	KPHP Muko Muko	UNIT I	
Jambi	1	KPHP BATANGHARI	UNIT XI UNIT XII	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 tahun 2017
	2	KPHP Bungo	UNIT II UNIT III	
	3	KPHP HILIR SAROLANGUN	UNIT VIII	
	4	KPHP Kerinci	UNIT I	
	5	KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	UNIT VII	
	6	KPHP Merangin	UNIT IV UNIT V UNIT VI	
	7	KPHP MUARO JAMBI	UNIT XIII	
	8	KPHP TANJUNG JABUNG BARAT	UNIT XV UNIT XVI UNIT XVII	
	9	KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR	UNIT XIV	
	10	KPHP Tebo Barat	UNIT IX	
	11	KPHP Tebo Timur	UNIT X	
Kepulauan Bangka	1	KPHL Belantu Mendanau	UNIT X	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017
	2	KPHP Bubus Panca	UNIT III	
	3	KPHP Gunung Duren	UNIT XIII	
	4	KPHP Jebu Bembang Antan	UNIT II	
	5	KPHP Muntai Palas	UNIT VIII	
	6	KPHP Rambat Menduyung	UNIT I	
	7	KPHP Sigambir Kotawaringin	UNIT IV	
	8	KPHP Sungai Sembulan	UNIT V	
Kepulauan Riau	1	KPHL Unit II Batam	UNIT II	Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2017
	2	KPHP Unit I Karimun	UNIT I	
	3	KPHP Unit III Lingga	UNIT III	
	4	KPHP Unit IV Bintan Tanjungpinang	UNIT IV	
	5	KPHP Unit V Natuna	UNIT V	
	6	KPHP Unit VI Anambas	UNIT VI	
Lampung	1	KPH Batu Serampok	UNIT XIII	Peraturan Gubernur Lampung No. 59 Tahun 2021
	2	KPH Way Pisang	UNIT XIV	
	3	KPH Batu Tegi	UNIT IX	
	4	KPH Gunung Balak	UNIT XV	
	5	KPH Kota Agung Utara	UNIT X	
	6	KPH Liwa	UNIT II	
	7	KPH Pematang Neba	UNIT XI	
	8	KPH Pesawaran	UNIT XII	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	9	KPH Way Waya	UNIT VII	
	10	KPH Tangkit Tebak	UNIT VIII	
	11	KPH Bukit Punggur	UNIT III	
	12	KPH Gedong Wani	UNIT XVI	
	13	KPH Muara Dua	UNIT IV	
	14	KPH Pesisir Barat	UNIT I	
	15	KPH Sungai Buaya	UNIT V	
	16	KPH Way Terusan	UNIT VI	
Riau	1	KPHP Minas Tahura	UNIT IX	Peraturan Gubernur Riau No. 76 Tahun 2017
	2	KPH Bagan Siapi Api	UNIT I UNIT II UNIT III UNIT XII	Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017
	3	KPH Bengkalis Pulau	UNIT IV UNIT V UNIT VI	
	4	KPH Hutan Mandah	UNIT XXVI UNIT XXVII	
	5	KPH Indragiri	UNIT XXIX UNIT XXVIII UNIT XXX	
	6	KPH Kampar Kiri	UNIT XVIII	
	7	KPH Mandau	UNIT VII UNIT VIII UNIT X	
	8	KPH Rokan	UNIT XI UNIT XIII UNIT XIV	
	9	KPH Singingi	UNIT XXXI UNIT XXXII	
	10	KPH Sorek	UNIT XIX UNIT XX UNIT XXI	
	11	KPH Suligi-Batu Gajah	UNIT XV UNIT XVI UNIT XVII	
	12	KPH Tasik Besar Serkap	UNIT XXII	
	13	KPH Tebing Tinggi	UNIT XXIII UNIT XXIV UNIT XXV	
	1	KPH Agam Raya	UNIT III	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
	2	KPH Bukit Barisan	UNIT IV	
	3	KPH Dharmasraya	UNIT VIII	
	4	KPH Hulu Batanghari	UNIT VII	
	5	KPH Lima Puluh Kota	UNIT II	
	6	KPH Mentawai	UNIT X UNIT XI	
	7	KPH Pasaman Raya	UNIT I	
	8	KPH Sijunjung	UNIT V	
	9	KPH Solok	UNIT VI	
	10	KPHP Pesisir Selatan	UNIT IX	
Sumatera Selatan	1	KPH Wilayah I Meranti	UNIT IV	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
	2	KPH Wilayah II Lalan - Mendis	UNIT II UNIT III	
	3	KPH Wilayah III Palembang-Banyuasin	UNIT I	
	4	KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Riding	UNIT XXIII UNIT XXIV	
	5	KPH Wilayah IX Suban Jeriji	UNIT XIV	
	6	KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji	UNIT XXI UNIT XXII	
	7	KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura	UNIT XV UNIT XX	
	8	KPH Wilayah VII Mekakau - Saka	UNIT XIX UNIT XVI	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
			UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	9	KPH Wilayah VIII Semendo	UNIT XIII	
	10	KPH Wilayah X Dempo	UNIT XII	
	11	KPH Wilayah XI Kikim - Pasemah	UNIT IX	
			UNIT X	
			UNIT XI	
	12	KPH Wilayah XII Benakat	UNIT VII	
	13	KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong	UNIT VI	
			UNIT VIII	
	14	KPH Wilayah XIV Rawas	UNIT V	
Sumatera Utara	1	KPH Wilayah I Stabat	UNIT I	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2023
			UNIT V	
	2	KPH Wilayah II Pematang Siantar	UNIT IX	
			UNIT VI	
			UNIT XII	
	3	KPH Wilayah III Kisaran	UNIT III	
			UNIT X	
			UNIT XIII	
	4	KPH Wilayah IV Balige	UNIT XIV	
			UNIT XXI	
	5	KPH Wilayah IX Panyabungan	UNIT XXIX	
	6	KPH Wilayah V Aek Kanopan	UNIT VII	
			UNIT XXII	
			UNIT XXIII	
	7	KPH Wilayah VI Sipirok	UNIT XXVI	
	8	KPH Wilayah VII Gunung Tua	UNIT XI	
			UNIT XXXI	
	9	KPH Wilayah VIII Kotanopan	UNIT XXX	
	10	KPH Wilayah X Padang Sidempuan	UNIT XXVIII	
			UNIT XXVII	
Yogyakarta	11	KPH Wilayah XI Pandan	UNIT XXIV	Peraturan Gubernur DIY Nomor. 96 Tahun 2015
			UNIT XXV	
	12	KPH Wilayah XII Tarutung	UNIT XVI	
			UNIT XX	
	13	KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul	UNIT XIX	
			UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	14	KPH Wilayah XIV Sidikalang	UNIT VIII	
			UNIT XV	
	15	KPH Wilayah XV Kabanjahe	UNIT II	
			UNIT IV	
	16	KPH Wilayah XVI Gunung Sitoli	UNIT XXXII	
			UNIT XXXIII	
Kalimantan Barat	1	BKPH Yogyakarta	-	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2020
	2	KPH Bengkayang	UNIT II	
	3	KPH Kapuas Hulu Selatan	UNIT XXI	
	4	KPH Kapuas Hulu Timur	UNIT XX	
	5	KPH Kapuas Hulu Utara	Unit XVIII	
			Unit XIX	
	6	KPH Kayong	UNIT XXV	
	7	KPH Ketapang Selatan	UNIT XXIX	
			UNIT XXX	
			UNIT XXXI	
			UNIT XXXII	
	8	KPH Ketapang Utara	UNIT XXVI	
			UNIT XXVII	
			UNIT XXVIII	
Yogyakarta	9	KPH Kubu Raya	UNIT XXXIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2020
	10	KPH Landak	UNIT VI	
			UNIT VII	
			UNIT VIII	
Yogyakarta	11	KPH Melawi	UNIT XIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 40 Tahun 2020
			UNIT XXII	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
			UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
	11	KPH Mempawah	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun
	12	KPH Sambas	UNIT I	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun
	13	KPH Sanggau Barat	UNIT III	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun
			UNIT V	2020
	14	KPH Sanggau Timur	UNIT IV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 Tahun
			UNIT XI	2020
	15	KPH Sekadau	UNIT XII	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun
	16	KPH Sintang Timur	UNIT XIV	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun
Kalimantan Selatan			UNIT XV	2020
			UNIT XVI	
			UNIT XVII	
	17	KPH Sintang Utara	UNIT IX	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun
			UNIT X	2020
			Unit XXXIV	
	1	KPH Balangan	UNIT VIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0102 Tahun
	2	KPH Cantung	UNIT II	2018
	3	KPH Sengayam	UNIT IV	
	4	KPH Hulu Sungai	UNIT IX	
	5	KPH Kayu Tangi	UNIT I	
Kalimantan Tengah	6	KPH Kusan	UNIT VI	
	7	KPH Pulau Laut Sebuk	UNIT III	
	8	KPH Tabalong	UNIT V	
			UNIT X	
	9	KPH Tanah Laut	UNIT VII	
	1	KPHL Gerbang Barito	UNIT IX	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun
	2	KPHL Kapuas - Kahayan	UNIT IV	2017
			UNIT XXXII	
			UNIT XXXIII	
	3	KPHP Barito Hilir	UNIT VII	
			UNIT XIV	
	4	KPHP Barito Hulu	UNIT V	
	5	KPHP Barito Tengah	UNIT VI	
			UNIT VIII	
	6	KPHP Kahayan Hilir	UNIT XXXI	
	7	KPHP Kahayan Hulu	UNIT XV	
			UNIT XVI	
	8	KPHP Kahayan Tengah	UNIT III	
			UNIT XIII	
			UNIT XVIII	
	9	KPHP Kapuas Hulu	UNIT X	
			UNIT XII	
	10	KPHP Kapuas Tengah	UNIT XI	
	11	KPHP Katingan Hilir	UNIT XXX	
	12	KPHP Katingan Hulu	UNIT XVII	
	13	KPHP Kotawaringin Barat	UNIT XXII	
			UNIT XXVI	
	14	KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah	UNIT XIX	
			UNIT XX	
	15	KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hilir	UNIT XXIX	
			UNIT XXVII	
			UNIT XXVIII	
	16	KPHP Murung Raya	UNIT I	
			UNIT II	
	17	KPHP Seruyan Hulu	UNIT XXI	
	18	KPHP Sukamara - Lamandau	UNIT XXIII	
			UNIT XXIV	
			UNIT XXV	
Kalimantan Timur	1	KPHP Manubar	UNIT XVII	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 39 Tahun 2019
	2	KPHP Bengalon	UNIT XXVII	
	3	KPHP Berau Barat	UNIT XII	
	4	KPHP Berau Utara	UNIT XIV	
	5	KPHP Berau Tengah	UNIT XV	
	6	KPHP Berau Pantai	UNIT XVI	
	7	KPHL Balikpapan	UNIT XXX	
	8	KPHP Bongan	UNIT XXXII	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	9	KPHP Delta Mahakam	UNIT XXIX	
	10	KPHP Sub Das Belayan	UNIT XXVI	
	11	KPHL Batu Rook	UNIT XXII	
	12	KPHP Batu Ayau	UNIT XXIII	
	13	KPHP Mook Manor Bulatn	UNIT XXV	
	14	KPHP Damai	UNIT XXIV	
	15	KPHP Meratus	UNIT XXXI	
	16	KPHP Telake	UNIT XXXIII	
	17	KPHP Kendilo	UNIT XXXIV	
	18	KPHP Kelinjau	UNIT XIX	
	19	KPHP Santan	UNIT XXVII	
Kalimantan Utara	1	KPH Bulungan	UNIT IX UNIT XIII	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2018
	2	KPH Malinau	UNIT II UNIT X UNIT XI UNIT XX UNIT XXI	
	3	KPH Nunukan	UNIT I UNIT III UNIT IV	
	4	KPH Tana Tidung	UNIT V UNIT VII	
	5	KPH Tarakan	UNIT VI UNIT VIII	
Gorontalo	1	KPH Wil. I dan Wil. II Gorontalo Barat	UNIT I UNIT II	Peraturan Gubernur Gorontalo No. 60 Tahun 2017
	2	KPH Wil. III Pahuwato	UNIT III	
	3	KPH Wil. IV Gorontalo Utara	UNIT IV	
	4	KPH Wil. V Boalemo	UNIT V	
	5	KPH Wil. VI Gorontalo	UNIT VI	
	6	KPH Wil. VII Bone Bolango dan	UNIT VII	
Maluku	1	KPH Ambon	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017
	2	KPH Buru	UNIT II	
	3	KPH Buru Selatan	UNIT I UNIT III	
	4	KPH Kepulauan Aru	UNIT XXI UNIT XXII	
	5	KPH Kota Tual	UNIT XV	
	6	KPH Maluku Barat Daya	UNIT XIX UNIT XX	
	7	KPH Maluku Tengah	UNIT IX UNIT VI UNIT VII UNIT VIII	
	8	KPH Maluku Tenggara	UNIT XVI	
	9	KPH Maluku Tenggara Barat/ KPH Kep. Tanimbar	UNIT XVII UNIT XVIII	
	10	KPH Seram Bagian Barat	UNIT IV UNIT V	
	11	KPH Seram Bagian Timur	UNIT X UNIT XI UNIT XII	
Maluku Utara	1	KPH Halmahera Barat	UNIT III	Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 44 Tahun 2017
	2	KPH Halmahera Selatan	UNIT XII UNIT XIII UNIT XIV	
	3	KPH Halmahera Tengah	UNIT VI UNIT VII	
	4	KPH Halmahera Timur	UNIT IV UNIT V UNIT VIII	
	5	KPH Halmahera Utara	UNIT II	
	6	KPH Kepulauan Sula	UNIT XV	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	7	KPH Pulau Morotai	UNIT I	
	8	KPH Pulau Taliabu	UNIT XVI	
	9	KPH Ternate-Tidore	UNIT XI	
	10	KPH Tidore Kepulauan	UNIT IX	
Sulawesi Barat			UNIT X	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016
	1	KPH Bonehau Kalumpang	UNIT XII	
			UNIT XIII	
	2	KPH Budong-Budong	UNIT V	
	3	KPH Karama	UNIT VI	
	4	KPH Karossa	UNIT IV	
	5	KPH Lariang	UNIT II	
	6	KPH Malunda	UNIT X	
	7	KPH Mamasa Barat	UNIT VII	
	8	KPH Mamasa Tengah	UNIT VIII	
	9	KPH Mamasa Timur	UNIT IX	
	10	KPH Mapilli	UNIT XI	
Sulawesi Selatan	11	KPH Pasangkayu	UNIT I	Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021
	12	KPH Sarudu	UNIT III	
	1	KPH AJATAPPARENG	UNIT II	
	2	KPH ANGKONA	UNIT XIV	
	3	KPH AWOTA	UNIT XVII	
	4	KPH BALIASE	UNIT XI	
	5	KPH BIALO	UNIT XXII	
	6	KPH BILA	UNIT III	
	7	KPH BULUSARAUNG	UNIT I	
	8	KPH CENRANA	UNIT XVIII	
	9	KPH JENEBERANG	UNIT XX	
	10	KPH KALAENA	UNIT XIII	
	11	KPH KAMBUNO	UNIT XII	
	12	KPH KELARA	UNIT XXI	
	13	KPH LAMASI	UNIT VIII	
	14	KPH LARONA	UNIT XV	
	15	KPH LATIMOJONG	UNIT IX	
	16	KPH MATA ALLO	UNIT V	
	17	KPH RONGKONG	UNIT X	
	18	KPH SADDANG I	UNIT VI	
	19	KPH SADDANG II	UNIT VII	
	20	KPH SAWITTO	UNIT IV	
	21	KPH SELAYAR	UNIT XXIV	
	22	KPH TANGKA	UNIT XXIII	
	23	KPH ULUBILA	UNIT XIX	
	24	KPH WALANAE	UNIT XVI	
Sulawesi Tengah	1	KPH Balantak	UNIT XVIII	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018
			UNIT XX	
	2	KPH Banawa Lalundu	UNIT VII	
	3	KPH Dampelas Tinombo	UNIT III	
			UNIT IV	
	4	KPH Dolago Tanggunung	UNIT V	
			Unit VI	
			Unit IX	
	5	KPH Gunung Dako	UNIT II	
	6	KPH Kulawi	UNIT VIII	
	7	KPH Pogogul	UNIT I	
	8	KPH Pulau Peling	UNIT XXI	
	9	KPH Sintuwu Maroso	UNIT X	
Sulawesi Tenggara			UNIT XI	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2017
			UNIT XII	
	10	KPH Sivia Patuju	UNIT XVI	
			UNIT XVII	
	11	KPH Toili Baturube	UNIT XIX	
	12	KPH Tepe Asa Moroso	UNIT XIV	
	13	KPH Tepo Asa Aroa	UNIT XIII	
			UNIT XV	
	1	KPH UNIT I KAPONTORI	UNIT I	
	2	KPH UNIT II LASALIMU	UNIT II	
	3	KPH UNIT III LAKOMPA	UNIT III	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	4	KPH UNIT IV KATONDOKI	UNIT IV	
	5	KPH UNIT IX PULAU KABAENA	UNIT IX	
	6	KPH UNIT V WAKONTI	UNIT V	
	7	KPH UNIT VI PULAU MUNA	UNIT VI	
	8	KPH UNIT VII PEROPA EA	UNIT VII	
	9	KPH UNIT VIII GANTARA	UNIT VIII	
	10	KPH UNIT X TINA ORIMA	UNIT X	
	11	KPH UNIT XI MEKONGGA SELATAN	UNIT XI	
	12	KPH UNIT XII LADONGI	UNIT XII	
	13	KPH UNIT XIII MEKONGGA UTARA	UNIT XIII	
	14	KPH UNIT XIV UEESI	UNIT XIV	
	15	KPH UNIT XIX LAIWOI UTARA	UNIT XIX	
	16	KPH UNIT XV ALAAHA	UNIT XV	
	17	KPH Unit XVI Patampanza Selatan	UNIT XVI	
	18	KPH UNIT XVII PATAMPANUA UTARA	UNIT XVII	
	19	KPH UNIT XVIII LAIWOI BARAT	UNIT XVIII	
	20	KPH UNIT XX LAIWOI TENGAH	UNIT XX	
	21	KPH UNIT XXI LAIWOI TENGGARA	UNIT XXI	
	22	KPH UNIT XXII LAIWOI	UNIT XXII	
	23	KPH UNIT XXIII PULAU WAWONII	UNIT XXIII	
	24	KPH UNIT XXIV GULARAYA	UNIT XXIV	
	25	KPH UNIT XXV WAKATOBI	UNIT XXV	
Sulawesi Utara	1	KPH Model Unit IV Poigar	Unit IV	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 52 Tahun 2017
	2	KPH Unit I Bolaang Mongondow dan	UNIT I	
	3	KPH UNIT II BOLAANG MONGONDOW	UNIT II	
	4	KPH UNIT III KEP. SANGIHE, KEP.	UNIT III	
	5	KPH UNIT V MINAHASA, MINAHASA	UNIT V	
	6	KPH UNIT VI MANADO, MINAHASA	Unit VI	
Bali	1	KPH BALI BARAT	UNIT I	Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019
	2	KPH BALI SELATAN	UNIT IV	
	3	KPH BALI TIMUR	UNIT III	
	4	KPH BALI UTARA	UNIT II	
Nusa Tenggara Barat	1	Balai KPH Ampang Plampang	UNIT XIII UNIT XIV	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 30 Tahun 2019
	2	Balai KPH Ampang Riwo	UNIT XV	
	3	Balai KPH Batulante	UNIT IX	
	4	Balai KPH Brang Beh	UNIT XI	
	5	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	UNIT VII UNIT VIII	
	6	Balai KPH Madapangga Rompu Waworada	UNIT XX UNIT XXI	
	7	Balai KPH Maria Donggomassa	UNIT XXII UNIT XXIII	

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

Provinsi	No.	KPH	Unit KPH	SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
	8	Balai KPH Orong Telu	UNIT X	
	9	Balai KPH Pelangan Tastura	UNIT II	
			UNIT III	
	10	Balai KPH Rinjani Barat	UNIT I	
	11	Balai KPH Rinjani Timur	UNIT IV	
	12	Balai KPH Ropang	UNIT XII	
	13	Balai KPH Sejong Mataiyang	UNIT V	
			UNIT VI	
	14	Balai KPH Tambora	UNIT XVII	
			UNIT XVIII	
	15	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	UNIT XIX	
			UNIT XVI	
Nusa Tenggara Timur	1	KPH Wilayah Kabupaten Alor	UNIT X	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 90 Th. 2016
	2	KPH WILAYAH KABUPATEN BELU	XXII	
	3	KPH Wilayah Kabupaten Ende	UNIT VI	
	4	KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur	UNIT VIII	
	5	KPH Wilayah Kabupaten Kupang	UNIT XVII	
	6	KPH Wilayah Kabupaten Lembata	UNIT IX	
	7	KPH Wilayah Kabupaten Malaka	UNIT XIX	
	8	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai	UNIT II	
	9	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	UNIT I	
	10	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	UNIT III	
	11	KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo	UNIT V	
	12	KPH Wilayah Kabupaten Ngada	UNIT IV	
	13	KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao	UNIT XVI	
	14	KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	UNIT XV	
	15	KPH Wilayah Kabupaten Sikka	VII	
	16	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat	UNIT XII	
	17	KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	UNIT XI	
	18	KPH Wilayah Kabupaten Sumba	UNIT XIII	
	19	KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah	XX	
	20	KPH Wilayah Kota Kupang	UNIT XVIII	
	21	KPH Wilayah Timor Tengah Utara	UNIT XXI	
	22	UPT - KPH Wilayah Kabupaten Sumba	UNIT XIV	
Papua	1	KPHP Unit XXIII Sarmi	UNIT XXIII	Peraturan Gubernur Papua No. 31 Tahun 2017
	2	KPHP UNIT LIII Boven Digoel	UNIT LIII	
	3	KPHL Unit XX Biak Numfor	UNIT XX	
	4	KPHP Unit XVII Waropen	Unit XVII	
	5	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen	UNIT XIX	
	6	KPHP Unit XXIX Keerom	Unit XXIX	
	7	KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI -	Unit XXI	
	8	KPHL Unit II Nabire	UNIT II	
	9	KPHL Unit VI Mimika	UNIT VI	
	10	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	UNIT XXVIII	
	11	KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	UNIT XXXV	
	12	KPHL Unit XLII Jayawijaya	UNIT XLII	
	13	KPHL Unit XLII Lani Jaya	UNIT LVII	
	14	KPHP Unit XLIII Nduga	UNIT XLIII	
Papua Barat	1	KPHL Unit I Pegunungan Arfak	UNIT I	Peraturan Gubernur Papua Barat No. 11 Tahun 2023
	2	KPHP Unit II Manokwari Selatan	UNIT II	
	3	KPHL Unit III Manokwari	UNIT III	
	3	KPHP Unit IV Teluk Wondama	UNIT IV	
	4	KPHP Unit V Kaimana	UNIT V	
	6	KPHP Unit VI Fakfak	UNIT VI	
	7	KPHP Unit VII Teluk Bintuni	UNIT VII	

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d. Desember 2023

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

TABEL V.5. PENETAPAN FASILITASI KPH

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	UNIT I	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	568.250
2	Aceh	UNIT II	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	253.948
3	Aceh	UNIT IV	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	402.986
4	Aceh	UNIT V	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	290.162
5	Aceh	UNIT VI	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	310.552
6	Sumatera Utara	UNIT XVI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	72.166
7	Sumatera Utara	UNIT XVII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	86.555
8	Sumatera Utara	UNIT XVIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.415
9	Sumatera Utara	UNIT XX	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.931
10	Sumatera Utara	UNIT XXIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	64.937
11	Sumatera Utara	UNIT XXIV	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.347
12	Sumatera Utara	UNIT XXV	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	60.396
13	Sumatera Utara	UNIT XXVI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	174.395
14	Sumatera Utara	UNIT XXVII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	38.071
15	Sumatera Utara	UNIT XXVIII	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	127.758
16	Sumatera Utara	UNIT XXXI	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	270.460
17	Sumatera Selatan	UNIT II	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.486
18	Sumatera Selatan	UNIT XII	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	26.052
19	Sumatera Selatan	UNIT XIII	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.431
20	Sumatera Selatan	UNIT XIV	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.044
21	Sumatera Selatan	UNIT XV	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	94.847
22	Sumatera Selatan	UNIT XVI	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	29.706
23	Kep. Riau	UNIT III	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	98.752
24	Kep. Riau	UNIT IV	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.756
25	Riau	UNIT V	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	23.438
26	Riau	UNIT VII	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	102.958
27	Riau	UNIT XIV	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	67.118
28	Riau	UNIT XX	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.458
29	Riau	UNIT XXI	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	124.109
30	Riau	UNIT XXX	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	150.718
31	Riau	UNIT XXXI	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	88.870
32	Kep. Bangka Belitung	UNIT II	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.539
33	Kep. Bangka Belitung	UNIT III	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	89.310
34	Kep. Bangka Belitung	UNIT VIII	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	171.189
35	Kep. Bangka Belitung	UNIT X	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	97.508
36	Bengkulu	UNIT III	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	96.125
37	Bengkulu	UNIT IV	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	82.242
38	Bengkulu	UNIT V	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.686
39	Bengkulu	UNIT VI	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	78.232
40	Jambi	UNIT IX	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	142.967
41	Jambi	UNIT X	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	103.650
42	Lampung	UNIT II	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	42.074
43	Lampung	UNIT VII	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.337
44	Lampung	UNIT VIII	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	21.117
45	Lampung	UNIT XV	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	24.285
46	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVI	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	25.422
47	Nusa Tenggara Barat	UNIT XX	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	45.663
48	Nusa Tenggara Timur	UNIT II	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.736
49	Nusa Tenggara Timur	UNIT III	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	50.952
50	Nusa Tenggara Timur	UNIT IV	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.734
51	Nusa Tenggara Timur	UNIT IX	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	49.182
52	Nusa Tenggara Timur	UNIT V	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	32.791
53	Nusa Tenggara Timur	UNIT VI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	57.740
54	Nusa Tenggara Timur	UNIT VII	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	36.999
55	Nusa Tenggara Timur	UNIT XI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.647
56	Nusa Tenggara Timur	UNIT XX	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	69.461
57	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXI	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	105.632
58	Nusa Tenggara Timur	UNIT XXII	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.537

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
59	Kalimantan Barat	UNIT XXIII	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	189.599
60	Kalimantan Barat	UNIT XXIV	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	179.461
61	Kalimantan Barat	UNIT XXV	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	318.717
62	Kalimantan Utara	UNIT VII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	120.789
63	Kalimantan Timur	UNIT XXIX	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.314
64	Kalimantan Timur	UNIT XXVI	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	979.933
65	Kalimantan Timur	UNIT XXVII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	263.467
66	Kalimantan Timur	UNIT XXX	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	15.130
67	Kalimantan Timur	UNIT XXXII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	333.166
68	Kalimantan Timur	UNIT XXXIII	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	255.245
69	Kalimantan Selatan	UNIT IX	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	62.186
70	Kalimantan Selatan	UNIT VI	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	262.919
71	Kalimantan Tengah	UNIT III	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	59.185
72	Kalimantan Tengah	UNIT V	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	334.069
73	Kalimantan Tengah	UNIT XIV	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	48.400
74	Kalimantan Tengah	UNIT XXIX	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	200.518
75	Kalimantan Tengah	UNIT XXXI	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	378.819
76	Sulawesi Utara	UNIT VI	SK.625/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	27.101
77	Gorontalo	UNIT VII	SK.639/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	35.784
78	Sulawesi Tengah	UNIT II	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	162.785
79	Sulawesi Tengah	UNIT VII	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	109.923
80	Sulawesi Tengah	UNIT XIV	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	190.830
81	Sulawesi Tengah	UNIT XXI	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	117.079
82	Sulawesi Barat	UNIT IV	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	63.110
83	Sulawesi Barat	UNIT VI	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	156.917
84	Sulawesi Tenggara	UNIT V	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	12.179
85	Sulawesi Tenggara	UNIT VI	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	73.726
86	Sulawesi Tenggara	UNIT XI	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	46.580
87	Sulawesi Tenggara	UNIT XII	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.088
88	Sulawesi Tenggara	UNIT XIII	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	125.717
89	Sulawesi Tenggara	UNIT XIV	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	163.744
90	Sulawesi Tenggara	UNIT XIX	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	113.580
91	Sulawesi Tenggara	UNIT XXV	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.022
92	Sulawesi Selatan	UNIT X	SK.616/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	20.901
93	Maluku Utara	UNIT IV	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	199.327
94	Maluku Utara	UNIT IX	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	17.998
95	Maluku Utara	UNIT XVI	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	168.726
96	Maluku	UNIT I	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	144.539
97	Maluku	UNIT XIV	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	10.288
98	Maluku	UNIT XVI	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	11.836
99	Maluku	UNIT XVIII	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	132.339
100	Maluku	UNIT XXI	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	70.159
101	Maluku	UNIT XXII	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	132.116
102	Papua Barat	UNIT I	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	192.142
103	Papua Barat	UNIT IV	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.738
104	Papua Barat	UNIT XV	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	640.508
105	Papua Barat	UNIT XVI	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	209.554
106	Papua	UNIT II	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	359.135
107	Papua	UNIT LI	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	666.097
108	Papua	UNIT VI	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	273.223
109	Papua	UNIT X	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	627.940
110	Papua	UNIT XLII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	139.928
111	Papua	UNIT XLIII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	257.531
112	Papua	UNIT XXII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	185.260
113	Papua	UNIT XXVIII	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	47.726
114	Papua	UNIT XXXV	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14 Desember 2015	299.129
115	Sumatera Barat	UNIT I	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	323.501
116	Sumatera Barat	UNIT III	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	62.368
117	Sumatera Utara	UNIT I	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	69.878
118	Sumatera Utara	UNIT II	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	80.002
119	Sumatera Utara	UNIT XII	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	56.223
120	Sumatera Utara	UNIT XV	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	89.851
121	Kalimantan Selatan	UNIT XIX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	32.419
122	Kalimantan Selatan	UNIT XX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	27.076

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
123	Kalimantan Selatan	UNIT XXI	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	44.592
124	Kalimantan Selatan	UNIT XXII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	91.392
125	Kalimantan Selatan	UNIT XXIII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	206.254
126	Kalimantan Selatan	UNIT XXIV	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	407.604
127	Kalimantan Barat	UNIT I	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	127.794
128	Kalimantan Barat	UNIT VIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	94.544
129	Kalimantan Barat	UNIT XIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	56.013
130	Kalimantan Barat	UNIT XV	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	207.079
131	Kalimantan Barat	UNIT XVI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	324.662
132	Kalimantan Barat	UNIT XXX	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	70.458
133	Kalimantan Barat	UNIT XXXI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	261.701
134	Kalimantan Barat	UNIT XXXIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	318.804
135	Kalimantan Timur	UNIT XXII	SK.835/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	658.129
136	Kalimantan Selatan	UNIT VIII	SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	141.349
137	Maluku Utara	UNIT XII	SK.838/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	170.442
138	Sulawesi Utara	UNIT V	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	13.356
139	Sulawesi Utara	UNIT VIII	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	27.101
140	Sulawesi Utara	UNIT IX	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	13.272
141	Sulawesi Barat	UNIT IX	SK.840/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	51.086
142	Sulawesi Selatan	UNIT V	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	143.751
143	Sulawesi Selatan	UNIT VI	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	59.954
144	Sulawesi Selatan	UNIT VII	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	130.508
145	Nusa Tenggara Barat	UNIT VI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	32.340
146	Nusa Tenggara Barat	UNIT VII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	40.645
147	Nusa Tenggara Barat	UNIT VIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	44.461
148	Nusa Tenggara Barat	UNIT X	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	55.226
149	Nusa Tenggara Barat	UNIT XI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	64.134
150	Nusa Tenggara Barat	UNIT XII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	74.733
151	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	33.610
152	Nusa Tenggara Barat	UNIT XV	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	42.630
153	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIX	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	44.082
154	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	43.399
155	Maluku	UNIT V	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	92.002
156	Maluku	UNIT XII	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	193.041
157	Maluku	UNIT XV	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	10.067
158	Papua	UNIT III	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	194.846
159	Papua	UNIT XXIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	122.820
160	Papua	UNIT XXV	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	354.901
161	Papua	UNIT XLVII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	461.382
162	Papua	UNIT XLVIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	573.543
163	Papua	UNIT XLIX	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	539.996
164	Papua	UNIT LIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	649.375
165	Papua	UNIT LVI	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	363.877
166	Kep. Riau	UNIT II	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	32.472
167	Kep. Riau	UNIT V	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	61.403
168	Jambi	UNIT VIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	110.327
169	Jambi	UNIT XII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	79.305
170	Jambi	UNIT XIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	103.528
171	Jambi	UNIT XIV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	80.852
172	Jambi	UNIT XV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	91.626
173	Jambi	UNIT XVI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	122.504
174	Kep. Bangka Belitung	UNIT VI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	27.199
175	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIV	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	116.160
176	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVII	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	113.398
177	Gorontalo	UNIT II	SK.848/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	90.644
178	Sulawesi Tengah	UNIT III	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	134.726
179	Sulawesi Tengah	UNIT V	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	111.273
180	Sulawesi Tengah	UNIT VIII	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	220.766
181	Papua Barat	UNIT VI	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	225.183
182	Papua Barat	UNIT XII	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	256.207

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
183	Riau	UNIT I	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	110.513
184	Riau	UNIT II	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	141.080
185	Riau	UNIT III	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	1.313.825
186	Riau	UNIT IV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	80.347
187	Riau	UNIT VI	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	224.663
188	Riau	UNIT XII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	149.905
189	Riau	UNIT XV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	87.370
190	Riau	UNIT XIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	35.000
191	Riau	UNIT XXIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	69.397
192	Riau	UNIT XXV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	67.827
193	Riau	UNIT XXVII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	42.898
194	Riau	UNIT XXVIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	231.490
195	Riau	UNIT XXIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	61.182
196	Riau	UNIT XXXII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	96.697
197	Lampung	UNIT XI	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	47.746
198	Lampung	UNIT XIII	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	8.025
199	Kalimantan Tengah	UNIT IV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	7.804
200	Kalimantan Tengah	UNIT VII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	158.785
201	Kalimantan Tengah	UNIT X	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	244.231
202	Kalimantan Tengah	UNIT XI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	274.875
203	Kalimantan Tengah	UNIT XVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	681.864
204	Kalimantan Tengah	UNIT XVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	140.418
205	Kalimantan Tengah	UNIT XIX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	366.726
206	Kalimantan Tengah	UNIT XXIV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	92.242
207	Kalimantan Tengah	UNIT XXV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	157.199
208	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	302.601
209	Kalimantan Tengah	UNIT XXVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	144.535
210	Kalimantan Tengah	UNIT XXX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	217.832
211	Sulawesi Tenggara	UNIT VIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	18.588
212	Sulawesi Tenggara	UNIT XVI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	126.917
213	Sulawesi Tenggara	UNIT XX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	230.547
214	Sulawesi Tenggara	UNIT XXI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09 November 2016	65.901
215	Gorontalo	UNIT I	SK.472/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	52.326
216	Kalimantan Selatan	UNIT II	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	209.297
217	Kalimantan Selatan	UNIT IV	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	141.553
218	Kalimantan Selatan	UNIT X	SK.469/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	117.914
219	Kalimantan Tengah	UNIT I	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	1.063.147
220	Kalimantan Tengah	UNIT VI	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	180.311
221	Kalimantan Tengah	UNIT VIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	107.713
222	Kalimantan Tengah	UNIT XII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	184.028
223	Kalimantan Tengah	UNIT XIII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	182.947
224	Kalimantan Tengah	UNIT XV	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	203.828
225	Kalimantan Tengah	UNIT XX	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	189.920
226	Kalimantan Tengah	UNIT XXXII	SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	185.915
227	Lampung	UNIT I	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	39.001
228	Lampung	UNIT XIV	SK.473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	9.866
229	Maluku Utara	UNIT I	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	150.493
230	Maluku Utara	UNIT II	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	103.970
231	Maluku Utara	UNIT V	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	78.287
232	Maluku Utara	UNIT VI	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	72.706
233	Maluku Utara	UNIT VII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	93.115
234	Maluku Utara	UNIT VIII	SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	37.199
235	Maluku Utara	UNIT III	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	165.028
236	Maluku Utara	UNIT IX	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	8.477
237	Maluku Utara	UNIT XIV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	190.756
238	Maluku Utara	UNIT XV	SK.728/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	97.118

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
239	Nusa Tenggara Barat	UNIT II	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	18.022
240	Nusa Tenggara Barat	UNIT XVII	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	32.245
241	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXI	SK.471/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	20.900
242	Sulawesi Tengah	UNIT X	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	88.200
243	Sulawesi Tengah	UNIT XIII	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	170.930
244	Sulawesi Tengah	UNIT XVI	SK.476/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	211.056
245	Sulawesi Tengah	UNIT XII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	92.179
246	Sulawesi Tengah	UNIT XV	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	156.582
247	Sulawesi Tengah	UNIT XVIII	SK.735/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	179.581
248	Sumatera Utara	UNIT III	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	28.145
249	Sumatera Utara	UNIT IX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	9.740
250	Sumatera Utara	UNIT XI	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	42.052
251	Sumatera Utara	UNIT XIII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	54.720
252	Sumatera Utara	UNIT XXX	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	120.968
253	Sumatera Utara	UNIT XXXII	SK.475/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017	07 September 2017	143.895
254	Sumatera Utara	UNIT IV	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	42.717
255	Sumatera Utara	UNIT VII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	32.287
256	Sumatera Utara	UNIT VIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	49.236
257	Sumatera Utara	UNIT X	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	4.884
258	Sumatera Utara	UNIT XIX	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	19.808
259	Sumatera Utara	UNIT V	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	37.771
260	Sumatera Utara	UNIT VI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.638
261	Sumatera Utara	UNIT XXI	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	38.277
262	Sumatera Utara	UNIT XXXIII	SK.723/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	109.733
263	Sumatera Barat	UNIT VII	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	182.908
264	Sumatera Barat	UNIT X	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	123.467
265	Sumatera Barat	UNIT XI	SK.724/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	134.750
266	Sumatera Selatan	UNIT IX	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	33.553
267	Sumatera Selatan	UNIT X	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	39.912
268	Sumatera Selatan	UNIT XI	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	40.701
269	Sumatera Selatan	UNIT XVII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	43.001
270	Sumatera Selatan	UNIT XVIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	50.894
271	Sumatera Selatan	UNIT VIII	SK.725/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	6.504
272	Kalimantan Timur	UNIT XIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	324.054
273	Kalimantan Timur	UNIT XV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	326.041
274	Kalimantan Timur	UNIT XVI	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	142.933
275	Kalimantan Timur	UNIT XVII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	239.921
276	Kalimantan Timur	UNIT XVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	673.912
277	Kalimantan Timur	UNIT XIX	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	928.748
278	Kalimantan Timur	UNIT XXIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	201.533
279	Kalimantan Timur	UNIT XXIV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	534.036
280	Kalimantan Timur	UNIT XXV	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	410.598
281	Kalimantan Timur	UNIT XXVIII	SK.726/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	296
282	Kalimantan Utara	UNIT I	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	47.189
283	Kalimantan Utara	UNIT II	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	357.466
284	Kalimantan Utara	UNIT III	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	178.204
285	Kalimantan Utara	UNIT IV	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	400.454
286	Kalimantan Utara	UNIT V	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	42.817
287	Kalimantan Utara	UNIT VIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	197.730
288	Kalimantan Utara	UNIT XI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	606.599
289	Kalimantan Utara	UNIT XIII	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	211.140
290	Kalimantan Utara	UNIT XX	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	560.400
291	Kalimantan Utara	UNIT XXI	SK.727/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	448.602
292	Sulawesi Utara	UNIT III	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	26.605
293	Sulawesi Utara	UNIT I	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	143.923
294	Sulawesi Utara	UNIT II	SK.729/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	138.402
295	Sulawesi Barat	UNIT I	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	23.729
296	Sulawesi Barat	UNIT III	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	71.611
297	Kepulauan Riau	UNIT VI	SK.731/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	22.832
298	Jambi	UNIT II	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.460
299	Jambi	UNIT III	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	69.492
300	Jambi	UNIT IV	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	50.930
301	Jambi	UNIT V	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	53.412
302	Jambi	UNIT XI	SK.732/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	103.979

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
303	Kep. Bangka Belitung	UNIT VII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	45.497
304	Kep. Bangka Belitung	UNIT XII	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	47.750
305	Kep. Bangka Belitung	UNIT IX	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	55.249
306	Kep. Bangka Belitung	UNIT XI	SK.733/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	30.848
307	Nusa Tenggara Timur	UNIT XV	SK.734/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	9.970
308	Riau	UNIT XVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	62.723
309	Riau	UNIT VIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	105.279
310	Riau	UNIT X	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	64.885
311	Riau	UNIT XI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	29.812
312	Riau	UNIT XIII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	72.739
313	Riau	UNIT XVII	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	27.330
314	Riau	UNIT XXVI	SK.736/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017	29 Desember 2017	117.912
315	Bali	UNIT I	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	38.537
316	Bali	UNIT II	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	35.317
317	Bali	UNIT III	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	20.808
318	Bali	UNIT IV	SK.83/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	10.738
319	Maluku	UNIT IV	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	140.952
320	Maluku	UNIT IX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	79.987
321	Maluku	UNIT VI	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	127.944
322	Maluku	UNIT VIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	94.957
323	Maluku	UNIT XI	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	136.401
324	Maluku	UNIT XIII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	36.529
325	Maluku	UNIT XIX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	45.765
326	Maluku	UNIT XVII	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	70.874
327	Maluku	UNIT XX	SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	64.272
328	Nusa Tenggara Timur	UNIT XII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	7.544
329	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	26.165
330	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVIII	SK.84/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	1.499
331	Papua	UNIT I	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	144.178
332	Papua	UNIT IV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	317.151
333	Papua	UNIT IX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	266.595
334	Papua	UNIT L	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	309.709
335	Papua	UNIT LII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	500.736
336	Papua	UNIT LIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	248.976
337	Papua	UNIT LV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	937.070
338	Papua	UNIT V	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	194.489
339	Papua	UNIT VII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	671.385
340	Papua	UNIT VIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	234.635
341	Papua	UNIT XI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	224.416
342	Papua	UNIT XII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	401.950
343	Papua	UNIT XIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	631.259
344	Papua	UNIT XIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	199.047
345	Papua	UNIT XL	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	382.624
346	Papua	UNIT XLI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	291.032
347	Papua	UNIT XLIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	880.620
348	Papua	UNIT XLV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	644.413
349	Papua	UNIT XLVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	449.718
350	Papua	UNIT XV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	472.706
351	Papua	UNIT XVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	314.572
352	Papua	UNIT XVIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	270.629
353	Papua	UNIT XXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	236.940
354	Papua	UNIT XXVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.063
355	Papua	UNIT XXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	359.330
356	Papua	UNIT XXX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	150.238
357	Papua	UNIT XXXI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	312.293
358	Papua	UNIT XXXII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	270.264
359	Papua	UNIT XXXIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.459
360	Papua	Unit XXXIV	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	23.502
361	Papua	UNIT XXXIX	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	219.484
362	Papua	UNIT XXXVI	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	88.547
363	Papua	UNIT XXXVII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	112.039
364	Papua	UNIT XXXVIII	SK.87/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	333.836

V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		
			NO SK	TANGGAL	LUAS (ha)
1	2	3	4	5	6
365	Papua Barat	UNIT III	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	235.899
366	Papua Barat	UNIT IX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	242.559
367	Papua Barat	UNIT VII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	130.809
368	Papua Barat	UNIT VIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	122.666
369	Papua Barat	UNIT X	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	337.794
370	Papua Barat	UNIT XI	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	302.888
371	Papua Barat	UNIT XIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	260.558
372	Papua Barat	UNIT XIV	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	288.745
373	Papua Barat	UNIT XIX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	235.427
374	Papua Barat	UNIT XVII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	159.489
375	Papua Barat	UNIT XVIII	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	230.695
376	Papua Barat	UNIT XX	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	399.415
377	Papua Barat	UNIT XXI	SK.86/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	390.140
378	Sulawesi Barat	UNIT XIII	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	42.321
379	Sulawesi Selatan	UNIT II	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	69.848
380	Sulawesi Selatan	UNIT III	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	71.518
381	Sulawesi Selatan	UNIT IV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	72.999
382	Sulawesi Selatan	UNIT IX	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	457.738
383	Sulawesi Selatan	UNIT V	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	78.271
384	Sulawesi Selatan	UNIT VI	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	113.056
385	Sulawesi Selatan	UNIT VII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	55.103
386	Sulawesi Selatan	UNIT VIII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	119.445
387	Sulawesi Selatan	UNIT X	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	162.840
388	Sulawesi Selatan	UNIT XI	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	241.946
389	Sulawesi Selatan	UNIT XII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	64.592
390	Sulawesi Selatan	UNIT XIII	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	134.513
391	Sulawesi Selatan	UNIT XIV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	76.962
392	Sulawesi Selatan	UNIT XV	SK.82/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	30.216
393	Sulawesi Tenggara	UNIT I	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	13.793
394	Sulawesi Tenggara	UNIT II	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	48.282
395	Sulawesi Tenggara	UNIT IV	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	15.701
396	Sulawesi Tenggara	UNIT IX	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	46.315
397	Sulawesi Tenggara	UNIT XV	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	93.115
398	Sulawesi Tenggara	UNIT XVII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	105.549
399	Sulawesi Tenggara	UNIT XVIII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	167.626
400	Sulawesi Tenggara	UNIT XXIII	SK.81/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	21 Januari 2019	36.562
401	Kalimantan Barat	UNIT II	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	145.558
402	Kalimantan Barat	UNIT III	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	123.612
403	Kalimantan Barat	Unit IV	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	266.183
404	Kalimantan Barat	UNIT IX	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	135.282
405	Kalimantan Barat	UNIT V	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	111.392
406	Kalimantan Barat	Unit VI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	55.343
407	Kalimantan Barat	Unit VII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	104.987
408	Kalimantan Barat	Unit XI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	68.505
409	Kalimantan Barat	UNIT XII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	132.425
410	Kalimantan Barat	Unit XIV	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	107.644
411	Kalimantan Barat	UNIT XVII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	323.684
412	Kalimantan Barat	UNIT XX	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	474.145
413	Kalimantan Barat	Unit XXI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	438.927
414	Kalimantan Barat	Unit XXII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	277.427
415	Kalimantan Barat	UNIT XXIX	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	180.331
416	Kalimantan Barat	UNIT XXVI	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	258.733
417	Kalimantan Barat	UNIT XXVII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	326.132
418	Kalimantan Barat	UNIT XXVIII	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	96.919
419	Kalimantan Barat	Unit XXXIV	SK.176/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	83.478
420	Sulawesi Tengah	UNIT XVII	SK.177/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2020	04 Januari 2020	185.813

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2023

VI. **PENGUNAAN KAWASAN HUTAN**



TABEL VI.1. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLOKASI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2023

NO	PROVINSI	S/D 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	8	59.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.181,68	9	67.026,68
2	SUMATERA UTARA	15	129.497,43	-	-	1	13.216,91	1	4,21	4	27.445,07	2	21.392,68	23	191.556,30
3	SUMATERA BARAT	3	4.720,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.720,53
4	RIAU	8	413.967,37	2	32.094,00	1	1,78	1	12,79	2	9,59	2	1.893,52	16	447.979,05
5	JAMBI	50	234.515,57	3	122,87	2	14,03	1	7,20	-	-	1	4,26	57	234.663,93
6	SUMATERA SELATAN	42	218.944,42	5	828,67	-	-	1	3,75	2	11,71	1	4,34	51	219.792,89
7	BENGKULU	4	5.352,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.352,04
8	LAMPUNG	1	8.574,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.355,17	2	16.929,36
9	BANGKA BELITUNG	7	20.100,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20.100,72
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	14	9.909,06	1	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9.911,51
13	JAWA TENGAH	19	24.867,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	24.867,40
14	DIYOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	26	69.979,52	2	228,47	-	-	-	-	2	4.593,58	-	-	30	74.801,56
16	BANTEN	3	1.790,65	1	114,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.905,11
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	14	124.635,99	2	3.797,44	-	-	-	-	-	-	1	13.755,67	17	142.189,10
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	9	39.639,29	-	-	-	-	-	-	3	20.583,19	-	-	12	60.222,48
21	KALIMANTAN TENGAH	96	1.657.339,51	4	8.781,10	2	1.426,91	1	1.201,66	4	8.915,88	7	38.679,96	114	1.716.345,02
22	KALIMANTAN SELATAN	19	97.475,65	1	480,85	-	-	-	-	-	-	2	4.007,37	22	101.963,87
23	KALIMANTAN TIMUR	108	407.241,53	2	4.076,28	2	3.550,75	5	23.651,40	4	6.884,13	3	16.455,20	124	461.859,29
24	KALIMANTAN UTARA	24	113.115,92	2	4.401,81	-	-	-	-	1	4.076,07	-	-	27	121.593,80
25	SULAWESI UTARA	7	52.736,61	-	-	-	7.417,46	-	-	1	1.830,62	1	12.998,88	11	74.983,57
26	SULAWESI TENGAH	20	106.269,37	-	-	-	-	-	984,00	1	67,87	1	10.864,15	23	118.185,39
27	SULAWESI SELATAN	7	59.767,79	-	-	-	-	-	17.239,28	-	-	-	-	8	77.007,07
28	SULAWESI TENGGARA	21	90.722,57	-	-	1	3.066,36	2	160,75	1	14,12	3	1.511,98	28	95.475,78
29	GORONTALO	7	30.357,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30.357,24
30	SULAWESI BARAT	1	33,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,55
31	MALUKU	18	13.435,45	-	-	1	15,49	-	-	1	12,25	1	1.121,11	21	14.584,30
32	MALUKU UTARA	84	310.017,80	-	-	-	-	3	6.769,20	3	10.238,59	6	25.865,64	96	352.891,23
33	PAPUA	7	78.491,94	3	29.384,47	-	-	-	-	1	3.776,73	-	-	11	111.653,14
34	PAPUA BARAT	28	106.772,48	-	-	-	-	-	-	2	99,21	1	418,64	31	107.290,33
35	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PAPUA PEGUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,67	2	7,67
TOTAL		670	4.490.116,57	28	84.312,87	12	28.709,69	17	50.034,24	32	88.558,61	34	164.510,25	795	4.906.249,90

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2023

TABEL VI.2 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG)

NO	PROVINSI	S/D 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	1	10,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,72
2	SUMATERA UTARA	1	344,00	1	5.110,72	-	-	-	-	2	133,90	-	-	4	5.588,62
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	1	3.185,46	-	-	-	-	1	679,00	2	3.864,46
4	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SUMATERA SELATAN	2	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	99,30
7	LAMPUNG	1	164,00	-	-	-	-	-	-	1	50,00	-	-	2	214,00
8	BENGKULU	1	1.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.081,00
9	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	4	112,00	-	-	-	-	-	-	1	19,90	-	-	5	131,90
13	JAWA TENGAH	2	50,27	-	-	-	-	1	493,46	-	-	1	1,00	4	544,73
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	2	17,54	-	-	-	-	1	1.303,00	-	-	-	-	3	1.320,54
16	BANTEN	2	8,76	-	-	-	-	1	7,95	-	-	-	-	3	16,71
17	BALI	1	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,28
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	1	8.009,33	-	-	1	26,16	2	8.035,49
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	1	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,50
20	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.412,65	1	1.412,65
21	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,01	1	6,08	2	7,09
22	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.419,84	-	-	1	1.419,84
23	KALIMANTAN TIMUR	1	23.870,28	-	-	-	-	-	-	2	1.375,66	-	-	3	25.245,94
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.079,33	-	-	1	3.079,33
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,02	-	-	1	4,02
28	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,57	1	3,57
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	1	71,40	1	4,15	-	-	2	75,55
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52,51	1	52,51
33	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.985,59	-	-	1	31.985,59
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		18	25.783,15	2	5.113,22	1	3.185,46	5	9.885,14	12	38.073,40	7	2.180,37	45	84.221,34

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SD 31 Desember 2023

TABEL VI.3 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBAH)

NO	PROVINSI	SID 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	1	335,71	-	-	2	444,42	3	780,13
2	SUMATERA UTARA	3	251,7	1	484,51	2	256,46	1	27,87	-	-	1	1,89	8	795,90
3	SUMATERA BARAT	7	1.283,75	1	348,62	-	-	1	3,30	-	-	1	153,89	10	1.789,56
4	RIAU	10	5.349,94	5	1.070,84	1	3,30	2	1.054,30	10	3.201,59	9	174,38	37	10.854,35
5	JAMBI	19	3.137,66	1	822,18	2	978,46	3	649,63	4	197,99	9	2.175,94	38	7.961,86
6	SUMATERA SELATAN	32	5.289,33	3	343,94	5	15.463,05	12	4.580,19	7	1.130,21	15	5.290,16	74	32.096,88
7	BENGKULU	3	2.114,65	1	700,00	1	570,37	-	-	2	408,90	-	-	7	3.793,92
8	LAMPUNG	7	202,42	-	-	-	-	1	45,01	-	-	-	-	8	247,43
9	BANGKA BELITUNG	16	4.378,20	5	590,43	3	244,22	7	1.085,68	1	6,09	7	1.490,67	39	7.795,29
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	1	67,85	1	70,14	1	1.078,11	1	56,66	4	1.272,76
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	14	996,26	10	195,47	9	167,80	13	202,56	7	315,50	4	736,78	57	2.614,38
13	JAWA TENGAH	12	357,99	2	113,13	2	7,95	3	6,15	3	166,20	1	118,41	23	769,83
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	16	1.401,45	2	536,43	2	8,01	3	56,74	6	544,93	2	101,66	31	2.649,22
16	BANTEN	1	62,71	-	-	-	-	2	54,07	-	-	-	-	3	116,78
17	BALI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	6.417,30	1	482,49	1	51,13	-	-	2	1.160,23	1	64,59	6	8.175,74
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2	83,00	-	-	-	-	-	-	1	5,08	1	668,19	4	756,27
20	KALIMANTAN BARAT	6	1.300,10	-	-	-	-	3	859,22	7	4.716,34	2	1.182,78	18	8.058,44
21	KALIMANTAN TENGAH	53	39.789,09	7	8.158,99	10	3.676,52	10	8.600,05	28	15.295,46	45	43.754,44	153	119.276,55
22	KALIMANTAN SELATAN	53	13.363,05	14	4.774,61	12	3.062,35	12	3.146,00	21	14.960,53	26	22.150,17	138	61.456,71
23	KALIMANTAN TIMUR	73	96.334,59	8	5.414,89	16	6.962,14	18	12.897,16	16	14.819,86	31	68.027,93	162	204.456,57
24	KALIMANTAN UTARA	5	8.130,33	3	2.504,81	-	-	2	986,38	4	3.048,65	3	673,82	17	15.343,99
25	SULAWESI UTARA	7	2.329,70	1	99,99	1	187,91	-	-	2	410,85	1	99,05	12	3.127,50
26	SULAWESI TENGAH	5	2.824,02	4	2.240,12	6	3.675,95	9	1.988,08	8	2.344,33	21	12.428,81	53	25.481,31
27	SULAWESI SELATAN	15	767,39	4	1.674,18	1	8.151,95	-	-	2	13,78	3	3.875,98	25	14.483,28
28	SULAWESI TENGGARA	33	14.711,57	6	1.859,47	6	6.737,03	12	14.066,49	14	2.775,23	24	8.528,77	95	48.678,56
29	GORONTALO	1	999,35	1	93,70	-	-	1	789,28	2	1.228,31	-	-	5	3.110,64
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	1	603,50	-	-	-	-	1	603,50
31	MALUKU	1	4,94	-	-	-	-	1	716,79	2	28,52	2	572,50	6	1.322,75
32	MALUKU UTARA	19	10.125,29	7	2.698,22	5	1.644,34	8	2.572,06	9	5.306,80	24	12.043,54	72	34.390,25
33	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.808,81	-	-	1	3.808,81
34	PAPUA BARAT	2	20,44	2	121,63	1	603,24	2	64,79	3	1.077,93	1	210,80	11	2.098,83
35	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,70	2	10,70
TOTAL		417	221.799,68	89	35.328,65	87	52.522,03	129	55.441,15	163	78.050,24	237	185.026,24	1.124	628.178,68

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SD 31 Desember 2023

TABEL VI.4. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S/D DESEMBER 2023

NO	PROVINSI	S/D 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	7	1.007,18	2	31,02	-	-	-	-	2	228,90	2	388,10	13	1.655,20
2	SUMATERA UTARA	53	5.702,89	6	264,08	9	556,79	4	711,53	5	532,30	4	76,37	81	7.843,97
3	SUMATERA BARAT	18	654,19	5	382,45	-	-	2	72,10	3	64,56	2	26,24	30	1.199,54
4	RIAU	5	12.927,79	1	133,74	2	52,52	1	67,60	1	90,50	2	356,47	12	13.628,62
5	JAMBI	2	198,55	-	-	1	71,91	2	59,43	-	-	-	-	5	329,89
6	SUMATERA SELATAN	13	237,30	2	243,22	1	317,27	1	102,51	6	209,53	2	878,37	25	1.988,20
7	BENGKULU	10	332,34	2	143,81	2	148,82	-	-	-	-	3	55,99	17	680,96
8	LAMPUNG	4	127,40	-	-	2	190,30	2	93,66	4	85,88	-	-	12	497,24
9	BANGKA BELITUNG	5	86,38	-	-	-	-	-	-	-	-	3	52,87	8	139,25
10	KEPULAUAN RIAU	8	364,80	2	76,68	3	20,43	1	286,81	1	10,86	-	-	15	759,58
11	DKI JAKARTA	3	16,22	-	-	-	-	-	-	1	9,91	-	-	4	26,13
12	JAWA BARAT	29	1.640,53	5	226,91	3	54,65	3	14,75	11	1.520,91	4	392,67	55	3.850,42
13	JAWA TENGAH	38	6.143,16	4	252,88	4	71,35	3	84,38	3	555,60	2	40,02	54	7.147,39
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	1	42,45	-	-	-	-	-	-	1	42,45
15	JAWA TIMUR	16	632,35	3	277,65	5	532,26	5	871,74	6	658,16	7	622,76	42	3.594,93
16	BANTEN	3	227,85	-	-	-	-	-	-	1	0,94	-	-	4	228,79
17	BALI	17	101,87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,49	18	102,36
18	NUSA TENGGARA BARAT	14	927,95	1	14,22	-	-	-	-	-	-	1	459,38	16	1.401,55
19	NUSA TENGGARA TIMUR	9	201,77	1	0,66	1	55,69	2	126,69	-	-	-	-	13	384,81
20	KALIMANTAN BARAT	6	12.022,82	3	902,20	-	-	3	51,06	1	46,96	-	-	13	13.023,04
21	KALIMANTAN TENGAH	1	152,13	4	3.114,27	2	257,53	1	223,80	5	882,81	2	42,67	15	4.673,21
22	KALIMANTAN SELATAN	4	255,56	1	46,72	1	826,84	-	-	2	321,62	-	-	8	1.450,74
23	KALIMANTAN TIMUR	8	154,26	1	105,60	-	-	2	147,51	5	484,18	2	13,99	18	905,54
24	KALIMANTAN UTARA	5	2.427,82	2	7,64	2	14,57	5	1.882,34	2	245,64	-	-	16	4.578,01
25	SULAWESI UTARA	3	14,03	-	-	-	-	1	340,25	2	516,88	1	67,10	7	938,26
26	SULAWESI TENGAH	17	1.214,54	3	19,78	2	86,78	2	240,01	2	153,76	4	1.756,11	30	3.470,99
27	SULAWESI SELATAN	11	1.104,37	1	47,97	1	3,11	1	0,62	2	39,17	1	80,45	17	1.275,69
28	SULAWESI TENGGARA	5	144,71	-	-	3	2.049,74	-	-	2	58,42	3	630,50	13	2.883,37
29	GORONTALO	4	205,75	1	0,48	1	57,71	-	-	2	28,17	2	10,88	10	302,99
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18,39	1	480,13	2	498,52
31	MALUKU	2	86,40	-	-	1	94,84	1	53,18	6	1.363,52	-	-	10	1.597,94
32	MALUKU UTARA	1	11,72	1	14,86	1	7,03	-	-	-	-	1	190,84	4	224,45
33	PAPUA	8	1.844,28	-	-	2	72,04	1	10,32	1	76,97	-	-	12	2.003,61
34	PAPUA BARAT	2	6.372,63	-	-	1	11,45	-	-	1	5,40	-	-	4	6.389,48
35	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		331	57.541,53	51	6.306,85	51	5.596,09	43	5.440,28	78	8.209,95	50	6.622,40	604	89.717,09

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

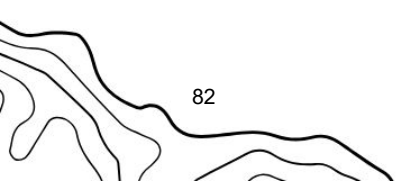
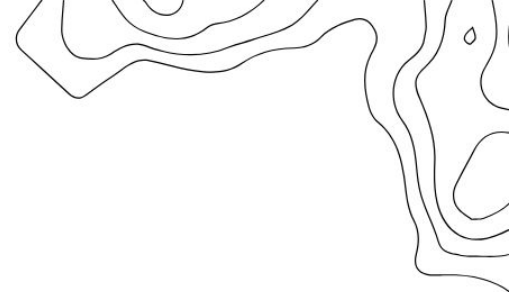
Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SD 31 Desember 2023

TABEL VI.5 PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

PROVINSI	S/D 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
BALI	1	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,50
BANTEN	1	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,01
DKI JAKARTA	2	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,87	3	10,04
JAWA BARAT	71	7.214,32	2	39,51	3	46,53	2	24,30	2	41,90	2	31,13	82	7.397,68
JAWA TENGAH	37	1.779,03	-	-	-	-	5	84,39	-	-	-	-	42	1.863,42
JAWA TIMUR	45	3.942,46	-	-	-	-	5	274,75	1	53,09	-	-	51	4.270,30
LAMPUNG	9	355,96	1	209,99	-	-	1	100,40	2	73,92	-	-	13	740,27
SUMATERA UTARA	1	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104,00
Grand Total	167	13.419,46	3	249,50	3	46,53	13	483,83	5	168,91	3	36,99	194	14.405,23

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2023



VII. KOMISI PENILAI AMDAL, AUDIT DAN DOKUMEN LINGKUNGAN



TABEL VII.1. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN (UKL-UPL) TAHUN 2013-2023

No	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Survei Seismik	Rekomendasi	21	7	3	5	3	5	4	-	-	-
		SKIL	21	7	3	6	4	5	4	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-	-	-	4	12	12
2	Pemboran	Rekomendasi	20	-	8	6	3	6	4	-	-	-
		SKIL	20	-	8	6	4	6	6	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-	-	-	5	20	34
3	Ketenagalistrikan	Rekomendasi	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
		SKIL	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-	-	-	1	35	75
4	Normalisasi Sungai	Rekomendasi	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		SKIL	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Kabel Laut	Rekomendasi	3	3	4	-	9	3	3	-	-	-
		SKIL	3	3	4	-	4	0	0	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
6	Pipa Minyak dan/atau Gas	Rekomendasi	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
		SKIL	3	-	-	1	1	2	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-	-	-	-	10	74
7	Pelabuhan	Rekomendasi	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SKIL	3	-	-	-	-	-	-	2	5	28
		PKPLH	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Tambang	Rekomendasi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11
		PKPLH	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
9	Pekerjaan Umum	Rekomendasi	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10	Industri	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	1	32	80
11	LB3	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10
12	SPBU	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	1	18	84
13	Fuel Terminal Bahan Bakar/DPPU	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	15	102	9
14	Perkebunan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	Kerutanan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
16	Kesehatan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
17	Pariwisata	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
18	Bandara	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Geothermal	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Jembatan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

No	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Kawasan Industri											1
22	Peternakan											1
23	Pipa											1
24	Tumbuhan dan Satwa Liar											6
	JUMLAH	51	0	11	18	13	16	18	12	0	0	
	Rekomendasi	51	2	11	18	15	13	14	11	4	10	
	SKIL									33	247	
	PKPLH											478

Keterangan:

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

PKPLH : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2023

TABEL VII.2 DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN (AMDAL) TAHUN 2013-2023

No.	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Minyak dan Gas (Migas)	SKKL 20	20	6	8	7	8	16	16	65	45	41
		SKIL 24	26	15	16	15	14	17	21	-	-	3
2	Limbah B3	SKKL 6	6	2	1	5	4	8	4	9	11	14
		DELH										2
		SKIL 6	6	3	4	3	6	0	1	-	-	
3	Ketenagalistrikan	SKKL 2	3	1	2	3	3	4	3	8	28	60
		DELH										4
		SKIL 2	4	4	2	3	3	0	0	-	-	
4	Pertambangan	SKKL 2	5	2	-	1	4	2	2	2	30	67
		DELH										1
		SKIL 2	5	4	2	2	12	2	2	-	-	
5	Pelabuhan	SKKL 2	3	2	4	19	3	6	6	-	7	23
		DELH										4
		SKIL 2	3	2	5	20	0	0	0	-	-	
6	Bandara	SKKL 2	5	-	1	4	1	4	6	-	1	3
		DELH										
7	Kereta Api	SKKL 1	1	-	2	-	1	-	-	-	0	1
		DELH										
		SKIL 1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	
8	Nuklir	SKKL -	-	-	1	-	-	-	-	-	0	
		DELH										
		SKIL -	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
9	Bendungan	SKKL 1	-	-	1	-	-	-	-	-	0	
		DELH										
		SKIL 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
10	Pekerjaan Umum	SKKL 1	-	-							6	5
		DELH									4	
11	Normalisasi Sungai	SKKL -	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		DELH										13
		SKIL -	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Geothermal (Panas Bumi)	SKKL -	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
		DELH										
		SKIL -	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
13	Jembatan	SKKL 1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	3
		DELH										1
		SKIL 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Reklamasi	SKKL -	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1
		DELH										
		IL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	JENIS KEGIATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Sistem Komunikasi/kabel laut	SKKL DELH IL	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
16	Kawasan Industri	SKKL DELH SKIL	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
17	Kehutanan	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
18	perkebunan	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	6	32
19	Kesehatan	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
20	Industri	SKKL DELH IL	-	-	-	-	-	-	-	4	18	36
21	Pariwisata	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
22	Pemboran	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
23	SPBU	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
24	FT/DPPU	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
25	Survei Seismik	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26	Transportasi	SKKL DELH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	JUMLAH	SKKL SKIL	37 41	47 55	20 36	39 47	24 37	40 19	39 25	93 -	161 -	357 -

Keterangan:

SKKL : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2023

TABEL VII.3 PERKEMBANGAN PENERAPAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Audit						
		s/d Tahun 2018	s/d Tahun 2019	s/d Tahun 2020	s/d Tahun 2021	s/d Tahun 2022	s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	7	
1.	Audit Lingkungan Hidup Wajib karena Ketidaktaatan	2	2	2	2	3	4	
2.	Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala	16	23	32	47	55	62	

Keterangan: Audit: Pihak yang diaudit

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2023

TABEL VII.4 PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT PERMASALAHAN DOKUMEN LINGKUNGAN

No	Jenis Kegiatan	s/d Tahun 2015	s/d Tahun 2016	s/d Tahun 2017	s/d Tahun 2018	s/d Tahun 2019	s/d Tahun 2020	s/d Tahun 2021	s/d Tahun 2022	s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
A.	Jumlah Kegiatan Penilaian DEL/IDPLH									
1.	Penerapan kebijakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan	6	32	33	37	41	49	61	70	77
B.	Jumlah Kasus dan Permasalahan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan									
1.	Penanganan permasalahan dokumen lingkungan dan Persetujuan lingkungan				17	21	28	34	35	38

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2023

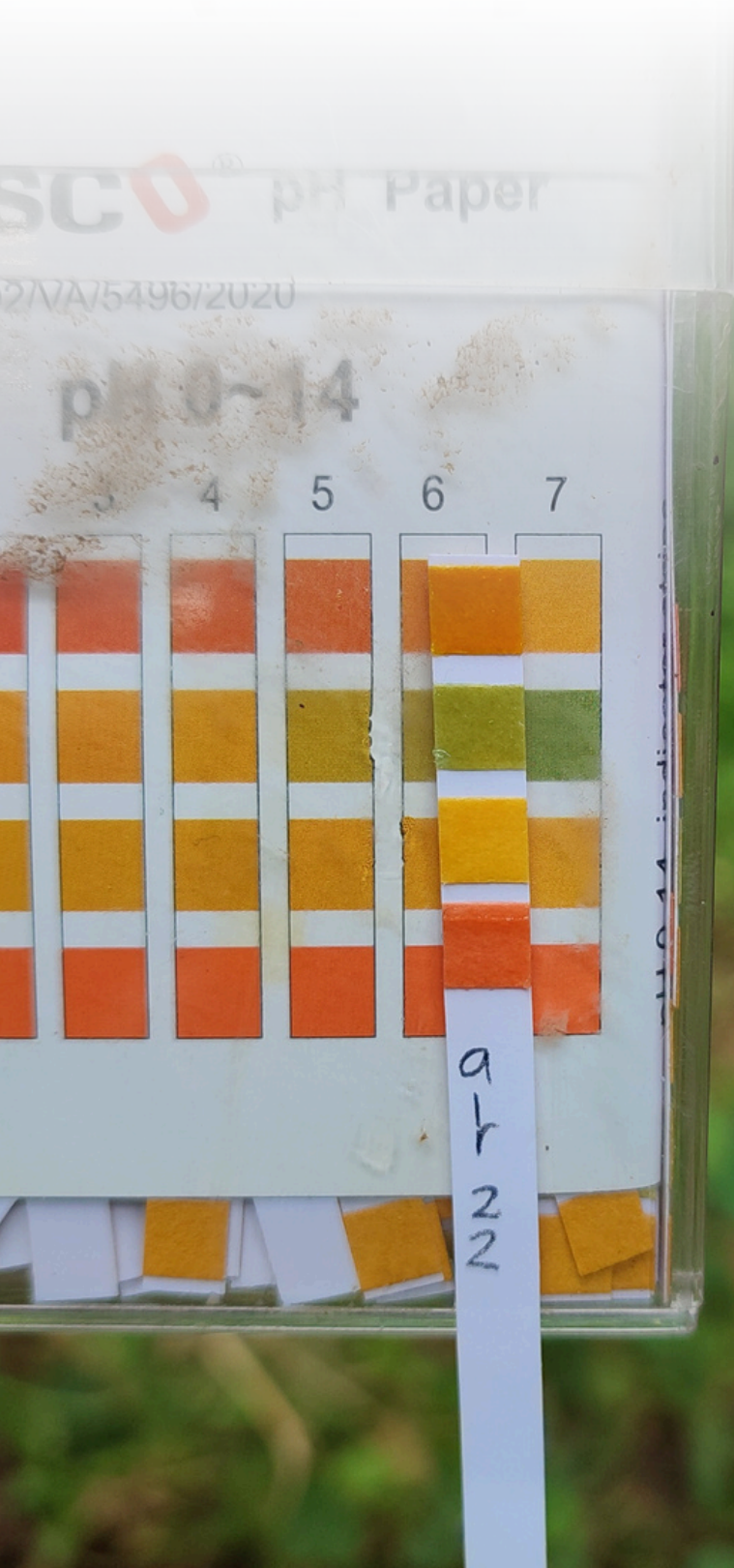
TABEL VII.5 DAFTAR JUMLAH KOMISI PENILAI AMDAL DI INDONESIA

No	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Jumlah KPA berlisensi	237	249	249	249	249	247	247	247	247

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2023

VIII.

KLHS DAN EKOREGION



-5°18'32,215"S 119°43'5

Altitude:

Speed:0

TABEL VIII.1. STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW

No.	Provinsi	Status
1	Sumatera Utara	Sudah Validasi
2	Sumatera Barat	Sudah Validasi
3	Riau	Sudah Validasi
4	Kepulauan Riau	Sudah Validasi
5	Jambi	Sudah Validasi
6	Bangka Belitung	Sudah Validasi
7	Sumatera Selatan	Sudah Validasi
8	Bengkulu	Sudah Validasi
9	Lampung	Sudah Validasi
10	Banten	Sudah Validasi
11	DKI Jakarta	Sudah Validasi
12	Jawa Barat	Sudah Validasi
13	Jawa Tengah	Sudah Validasi
14	Jawa Timur	Sudah Validasi
15	DI Yogyakarta	Sudah Validasi
16	Kalimantan Barat	Sudah Validasi
17	Kalimantan Tengah	Sudah Validasi
18	Kalimantan Selatan	Sudah Validasi
19	Kalimantan Timur	Sudah Validasi
20	NTB	Sudah Validasi
21	NTT	Sudah Validasi
22	Bali	Sudah Validasi
23	Sulawesi Selatan	Sudah Validasi
24	Sulawesi Tengah	Sudah Validasi
25	Sulawesi Tenggara	Sudah Validasi
26	Gorontalo	Sudah Validasi
27	Maluku	Sudah Validasi
28	Maluku Utara	Sudah Validasi
29	Papua	Sudah Validasi
30	Papua Barat	Sudah Validasi

TABEL VIII.2. STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJPD

No.	Provinsi	Status
1	Sulawesi Tenggara	Sudah Terbit Surat Validasi
2	Gorontalo	Sudah Terbit Surat Validasi
3	Maluku	Sudah Terbit Surat Validasi
4	Sumatera Selatan	Sudah Terbit Surat Validasi
5	Sulawesi Tengah	Sudah Terbit Surat Validasi
6	DKI Jakarta	Sudah Terbit Surat Validasi
7	Bangka Belitung	Sudah Terbit Surat Validasi
8	Sumatera Utara	Sudah Terbit Surat Validasi
9	Riau	Sudah Terbit Surat Validasi
10	Bengkulu	Sudah Terbit Surat Validasi
11	Lampung	Sudah Terbit Surat Validasi
12	Jawa Tengah	Sudah Terbit Surat Validasi
13	Papua Barat Daya	Sudah Terbit Surat Validasi
14	Kalimantan Barat	Sudah Terbit Surat Validasi
15	Kalimantan Utara	Sudah Terbit Surat Validasi
1	Sumatera Barat	Proses Persetujuan Validasi
2	Banten	Proses Persetujuan Validasi
3	Jawa Barat	Proses Persetujuan Validasi
4	DIY	Proses Persetujuan Validasi
5	Jawa Timur	Proses Persetujuan Validasi
6	Bali	Proses Persetujuan Validasi
7	NTB	Proses Persetujuan Validasi
8	NTT	Proses Persetujuan Validasi
9	Kalimantan Tengah	Proses Persetujuan Validasi
10	Kalimantan Selatan	Proses Persetujuan Validasi
11	Kalimantan Timur	Proses Persetujuan Validasi
12	Sulawesi Selatan	Proses Persetujuan Validasi

TABEL VIII.3. STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD

No.	Provinsi	Status
1	DKI Jakarta	Sudah Terbit Surat Validasi
1	Sumatera Selatan	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
2	Lampung	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
3	Bangka Belitung	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
4	Jawa Tengah	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
5	DIY	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
6	Sulawesi Tenggara	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
7	Sulawesi Tengah	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
8	Gorontalo	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)
9	Sulawesi Utara	Proses Penyusunan (Sudah Asistensi Pembahasan)

TABEL VIII.4. DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A.	Ekoregion Jawa				
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
6.	D.I. Yogyakarta	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B.	Ekoregion Sumatera				
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	Sudah ditetapkan Perda No. 2 Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022
3.	Jambi	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
5.	Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
7.	Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
8.	Lampung 10	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
9.	Kepulauan Riau	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kepulauan Bangka Belitung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses penyusunan	Proses Penetapan
C. Ekoregion Kalimantan					
1.	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan dan proses reuiu 5 tahunan
2.	Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	-
3.	Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
4.	Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan tapi dilakukan review di tahun 2022 dan akan di revisi di 2023
5.	Kalimantan Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses penyusunan	Proses penetapan
D. Ekoregion Sulawesi					
1.	Sulawesi Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses Penyusunan	Proses penetapan
2.	Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Sulawesi Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan Perda Prov. Sulteng No. 5 Tahun 2021
4.	Sulawesi Tenggara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
6.	Sulawesi Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses penyusunan	Proses penetapan
E.	Ekoregion Bali Nusatenggara				
1.	Bali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses penyusunan	Proses penetapan
2.	Nusa Tenggara Barat	Sedang dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Belum disusun	-
3.	Nusa Tenggara Timur	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
F.	Ekoregion Maluku				
1.	Maluku Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Maluku	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
G.	Ekoregion Papua				
1.	Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
2.	Papua	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sedang disusun	*disarankan untuk susun kembali karena ada pemekaran DOB
3.	Papua Pegunungan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Papua Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Papua Barat Daya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	Papua Selatan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

Catatan : RPPLH Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor- 2023

TABEL VIII. 5 DATA DAN INFORMASI PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A.	Ekoregion Jawa				
1.	Kota Tangerang Selatan - Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Kota Cilegon - Banten	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
3.	Kota Bandung - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses penyusunan	-
4.	Kab. Bandung - Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Kab. Sukabumi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Kab. Bogor - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
7.	Kota Cimahi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
8.	Kota Depok - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
9.	Kota Bekasi-Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
10.	Kab. Karawang-Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
11.	Kota Tasikmalaya-Jawa Barat	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
12.	Kab. Kebumen - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Proses penetapan
13.	Kota Semarang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
14.	Kab. Pemalang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Perda Kab. Pemalang No. 9 Tahun 2021

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
15.	Kab. Wonogiri - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
16.	Kab. Grobogan - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Perda Kab. Grobogan No. 3 Tahun 2022
17.	Kab. Klaten - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Purworejo – Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
19.	Kab. Banjarnegara-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
20.	Kab. Banyumas - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
21.	Kab. Batang- Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
22.	Kab. Blora - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Boyolali - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
24.	Kab. Brebes - Jawa Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
25.	Kab. Cilacap - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
26.	Kab. Demak - Jawa Tengah	Sedang Dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
27.	Kab. Jepara- Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
28.	Kab. Karanganyar-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses Penyusunan	-
29.	Kab. Kendal - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
30.	Kota Magelang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
31.	Kota Pekalongan-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
32.	Kota Salatiga - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
33.	Kota Surakarta - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
34.	Kota Tegal - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
35	Kab. Kudus-Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
36	Kab. Magelang-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
37	Kab. Pati - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
38	Kab. Pekalongan-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
39	Kab Purbalingga-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
40	Kab Purworejo-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
41	Kab. Rembang-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
42	Kab. Semarang-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
43	Kab. Sragen-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
44	Kab. Sukoharjo-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
45	Kab. Tegal-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
46	Kab. Temanggung-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	-
47.	Kab. Wonosobo-Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
48.	Kota Yogyakarta - DIY	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
49.	Kota Bantul – DIY	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses Penyusunan	-
50.	Kota Surabaya - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	Proses Penetapan
51.	Kota Blitar - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
52.	Kab. Malang - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
53.	Kab. Bojonegoro - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
54.	Kab. Tuban - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
55.	Kab. Pasuruan - Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
B.	Ekoregion Sumatera				
1.	Kab. Aceh Utara- NAD	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	
2.	Kota Banda Aceh - NAD	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Aceh Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	-
4.	Kab. Aceh Jaya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Kab. Pidie	Sudah disusun	Sudah disusun dan proses verifikasi	Belum disusun	-
6.	Kab. Bireuen	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
7.	Kota Langsa	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kab. Nagan Raya	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kota Subulussalam	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kab. Aceh Besar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	-
11.	Kab Aceh Barat Daya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Aceh Tengah	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	-
13.	Kab. Bener Meriah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kab. Aceh Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Proses Penetapan
15.	Kab. Simuelue	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan proses verifikasi	Belum disusun	-
16.	Kota Sabang	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Pidie Jaya	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kota Lhokseumawe	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
19.	Kab. Aceh Tamiang	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
20.	Kab. Aceh Tenggara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
21.	Kab. Gayo Lues	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
22.	Kab. Singkil	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Aceh Selatan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kab. Langkat-Sumut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
25.	Kota Medan-Sumut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
26.	Kota Batam-Kep. Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
27.	Kab. Bintan-Kep. Riau	Sedang dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
28.	Kabupaten Pelalawan-Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
29.	Kota Pekanbaru-Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
30.	Kota Dumai-Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
31.	Kab. Kuantan Singingi-Riau	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
32.	Kab. Kampar-Riau	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
33.	Kab. Pasaman-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
34.	Kab. Padang panjang-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
35.	Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
36.	Kota Solok-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Diverifikasi	Proses Penyusunan	-
37.	Kab. Solok-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
38.	Kab. Merangin-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
39.	Kota Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
40.	Kab. Muaro Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
41.	Kab. Batanghari-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
42.	Kab. Ogan Komering Ulu-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
43	Kota Palembang-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
44.	Kab. Muara Enim-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah Disusun	Belum disusun	-
45.	Kab. Musi Banyuasin-Sumsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
45.	Kab. Banyuasin-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah Disusun	Sudah Disusun	Sudah ditetapkan
46.	Kab. Belitung-Kep. Babel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
47.	Kab. Belitung Timur-Kep. Babel	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
48.	Kota Bandar Lampung-Lampung	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
49.	Kab. Lampung Tengah-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan proses verifikasi	Belum disusun	-
50.	Kota Metro - Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
51.	Kab. Tanggamus-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
52.	Kab. Lampung Barat-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
53.	Kab. Lampung Timur	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
54.	Kab. Way Kanan - Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
55.	Kab. Mesuji – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
56.	Kab. Tulang Bawang – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
57.	Kab. Tulang Bawang Barat – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
58.	Kab. Lampung Utara – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
59.	Kab. Pesisir Barat – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
60.	Kab. Pesawaran – Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
61.	Kab. Pringsewu – Lampung	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
62.	Kab. Lampung Selatan - Lampung	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
63.	Kab. Bengkulu Tengah- Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
64.	Kota Tanjungpinang- Kepulauan Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses penyusunan	-
65.	Kab. Karo – Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
66.	Kab. Siak – Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-
67.	Kab. Pelalawan - Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-
68	Kab. Rokan Hulu - Riau	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Belum Verifikasi	Belum disusun	-
69.	Kab. Aceh Tengah - Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	-
70.	Kab. Aceh Barat - Aceh	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	-
71.	Kota Tanjung Pinang - Kepri	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses Penyusunan	-
72.	Kab. Kepahiang - Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
73.	Kab. Rejang Lebong - Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
74.	Kab. Lebong - Bengkulu	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
75.	Kota Bengkulu - Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
76.	Kab. Bengkulu Selatan - Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
77.	Kota Payakumbuh - Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah Disusun Sudah Diverifikasi	Belum disusun	-
78.	Kab. Padang Pariaman - Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
79.	Kab. Solok Selatan - Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	-
80.	Kab. Agam - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
81.	Kab. Pasaman - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
82.	Kota Pariaman - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
83.	Kab. Pesisir Selatan - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
84.	Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
85.	Kab. Sijunjung - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
86.	Kota Padang - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
87.	Kota Bukittinggi - Sumatera Barat	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
88.	Kab. Bangka - Bangka Belitung	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Anggaran Tahun 2024

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
89.	Kota Pangkal Pinang- Bangka Belitung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
90.	Kab. Bangka Tengah - Bangka Belitung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
C.	Ekoregion Kalimantan				
1.	Kota Tarakan -Kalimantan Utara	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
2.	Kab. Bulungan -Kalimantan Utara	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
3.	Kab. Nunukan-Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
4.	Kota Banjarbaru -Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
5.	Kab. Tanah Laut-Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
6.	Kota Pontianak-Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Proses penyusunan	-
7.	Kab. Kubu Raya-Kalimantan Barat	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kota Samarinda-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	*proses verifikasi ke KLHK
9.	Kota Balikpapan-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
10.	Kab. Mahakam Ulu-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah Disusun	Belum disusun	-
11.	Kab. Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
12.	Kab. Banjar-Kalimantan Selatan	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
13.	Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
14.	Kota Palangkaraya-Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kab. Kapuas -Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kab. Lamandau -Kalimantan Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
17.	Kab. Gunung Mas -Kalimantan Tengah	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
19.	Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
20.	Kab. Balangan - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	-
21.	Kab. Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	-
22.	Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	-
23.	Kab. Kota Baru - Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah diverifikasi	Sudah disusun	-
24.	Kota Bontang - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
25.	Kab. Kutai Timur - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
26.	Kab. Paser - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan Perbaikan	Belum disusun	-
27.	Kab. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
28.	Kab. Berau - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
29.	Kab. Kutai Barat - Kalimantan Timur	Belum dilaksanakan	Belum Disusun	Belum disusun	-
30.	Kab. Mahulu - Kalimantan Timur	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
D.	Ekoregion Sulawesi				
1.	Kab. Banggai Kepulauan-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan Sudah diverifikasi	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Kab. Tojo Una-Una-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Palu - Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Sudah disusun	Proses penetapan
4.	Kab. Donggala - Sulteng	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	
5.	Kab. Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Kota Gorontalo	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Kab. Gorontalo Utara	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Kab. Pohuwato - Gorontalo	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
9.	Kab. Konawe Selatan - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
10.	Kab. Bombana - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
11.	Kab. Kolaka Timur - Sultra	Sedang dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
12.	Kota Kendari - Sultra	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
13.	Kab. Buton - Sultra	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Proses penyusunan	-
14.	Kota Manado - Sulut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kota Makassar - Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kab. Gowa - Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Belum disusun	-
17.	Kab. Maros – Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Pangkajene Kepulauan – Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah diverifikasi	Proses Penyusunan	Pembahasan DPRD
19.	Kota Tomohon	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Sudah Perda	No: 1/ 2022 tgl 30 Juni 2022
20.	Kab. Sigi	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
21.	Kab. Donggala	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
22.	Kab. Parigi Moutong	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
23.	Kab. Poso	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kab. Morowali Utara	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
25.	Kab. Morowali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
26.	Kab. Tojo Una-una	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
27.	Kab. Banggai	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
28.	Kab. Banggai Kepulauan	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
29.	Kab. Banggai Laut	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
30.	Kab. Toli-Toli	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
31.	Kab. Buol	Sudah dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
32.	Kab. Pare-pare, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Sudah Disusun	Perda No. 9 Tahun 2022
33.	Kab. Pinrang, Sulsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
34.	Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
35.	Kab. Bone, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
36.	Kab. Bulukumba, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
37.	Kab. Bantaeng, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
38.	Kab. Toraja Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	SUDAH PERDA TAPI TIDAK MELALUI PROSES VERIFIKASI
39.	Kab. Kepulauan Selayar, Sulsel	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun Sudah Verifikasi	Proses penyusunan	-
E.	Ekoregion Bali Nusatenggara				
1.	Kab. Sabu Raijua-NTT	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Manggarai Barat-NTT	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Alor-NTT	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Kab. Belu-NTT	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
5.	Kab. Buleleng - Bali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Belum disusun	-
6.	Kab. Badung - Bali	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Kab. Sumbawa Barat - NTB	Sedang dilaksanakan	Proses Penyusunan	Belum disusun	-
F.	Ekoregion Maluku				
1.	Kab. Morotai-Malut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Halmahera Utara-Malut	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
E.	Ekoregion Papua				
1.	Kota Jayapura- Papua	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun dan sudah verifikasi	Proses Penyusunan	-
2.	Kab. Sorong Selatan- Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kab. Manokwari Selatan- Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-

Catatan : RPPLH Kab/Kota disusun oleh Pemerintah Kab/Kota, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor- 2023

IX. DUKUNGAN MANAJEMEN

**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KEHUTANAN**



TABEL IX.1. REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH

UNIT KERJA		GOLONGAN																	KET				
No.		IV				III				II				I				JUMLAH					
		L	P	JML		L	P	JML		L	P	JML		L	P	JML		L		P	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
I	Sekretariat Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	8	7	15	25	25	50	6	6	12	-	-	-	-	39	38	77						
II	Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	7	8	15	32	33	65	-	3	3	-	-	-	-	39	44	83						
III	Direktorat inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	7	6	13	23	14	37	-	5	5	-	-	-	-	30	25	55						
IV	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9	3	12	38	22	60	4	1	5	1	-	1	1	52	26	78						
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebiasaan Wilayah dan Sektor	6	6	12	14	10	24	3	4	7	-	-	-	-	23	20	43						
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	6	10	15	14	29	4	4	8	-	-	-	-	23	24	47						
	JUMLAH	41	36	77	147	118	265	17	23	40	1	-	1	206	177	383							
1.	BPKH Wil. I Medan	3	-	3	19	10	29	10	9	19	-	-	-	-	32	19	51						
2.	BPKH Wil. II Palembang	4	-	4	16	9	25	4	6	10	-	-	-	-	24	15	39						
3.	BPKH Wil. III Pontianak	4	-	4	16	10	26	6	2	8	-	-	-	-	26	12	38						
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	2	1	3	24	12	36	7	4	11	-	-	-	-	33	17	50						
5.	BPKH Wil. V Banjarbaru	5	-	5	13	15	28	8	7	15	-	-	-	-	26	22	48						
6.	BPKH Wil. VI Manado	5	-	5	14	7	21	3	4	7	-	-	-	-	22	11	33						
7	BPKH Wil. VII Makassar	3	4	7	18	14	32	6	5	11	-	-	-	-	27	23	50						
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	3	1	4	25	10	35	2	5	7	-	-	-	-	30	16	46						
9.	BPKH Wil. IX Ambon	1	-	1	18	8	26	16	1	17	-	-	-	-	35	9	44						
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	-	1	19	9	28	9	3	12	-	-	-	-	29	12	41						
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	4	6	10	20	29	49	5	2	7	-	-	-	-	29	37	66						
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	2	-	2	12	12	24	7	3	10	-	-	-	-	21	15	36						
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	2	-	2	14	9	23	3	5	8	-	-	-	-	19	14	33						
14	BPKH Wil. XIV Kupang	3	-	3	16	7	23	4	2	6	-	-	-	-	23	9	32						
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	3	1	4	12	4	16	8	3	11	-	-	-	-	23	8	31						
16	BPKH Wil. XVI Palu	5	-	5	15	11	26	9	3	12	-	-	-	-	29	14	43						
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	4	-	4	13	3	16	12	3	15	-	-	-	-	29	6	35						
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1	1	2	10	6	16	5	3	8	-	-	-	-	16	10	26						
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	5	-	5	13	5	18	4	5	9	-	-	-	-	22	10	32						
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	3	2	5	14	10	24	8	-	8	-	-	-	-	25	12	37						
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	1	3	21	5	26	1	3	4	-	-	-	-	24	9	33						

		GOLONGAN																KET		
No.	UNIT KERJA	IV				III				II				I				JUMLAH		
		L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	JML	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL	
1	2	3	4	5	8	6	7	8		9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
22	BPKH Wil. XXII Kendari	1	-	1	23	15	8		3		3	6		-	-	-	19	11	30	
	Jumlah	66	17	83	570	357	213		81	140	221		-	-	-	-	563	311	874	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Keterangan:

IV L = Gol. IV Laki-laki

IV P = Gol. IV Perempuan

III L = Gol. III Laki-laki

III P = Gol. III Perempuan

II L = Gol. II Laki-laki

II P = Gol. II Perempuan

I L = Gol. I Laki-laki

I P = Gol. I Perempuan

TABEL IX.2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD				TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.	
			L		P	JML		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P		JML	L		P
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27		28
1	2	3																											
A. PUSAT																													
I	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	PNS	3	-	3	6	11	17	19	19	38	6	8	14	4	2	6	1	-	1	-	-	-	79	39	40			
		Upah	-	-	-	-	-	-	10	2	12	1	-	1	10	-	10	-	-	-	1	-	1	24	22	2			
II	Direktorat Rencana, Penggunaan & Pembentukan	PNS	1	1	2	10	13	23	25	25	50	2	5	7	1	-	1	-	-	-	-	-	83	39	44				
		Upah	-	-	-	-	1	1	4	1	5	-	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	11	7	4				
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya	PNS	3	2	5	8	8	16	14	9	23	-	4	4	4	2	6	-	-	-	1	1	55	29	26				
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	10	7	3				
IV	Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan	PNS	2	-	2	9	5	14	25	16	41	4	4	8	8	1	9	1	-	1	1	-	1	76	50	26			
		Upah	-	-	-	-	-	-	13	5	18	4	-	4	13	-	13	-	-	-	-	-	35	30	5				
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan	PNS	-	2	2	6	6	12	12	11	23	3	4	7	1	-	1	-	1	-	-	-	46	23	23				
		Upah	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	8	3	5				
VI	Direktorat Pecegahan Dampak Lingkungan Usaha	PNS	-	1	1	4	5	9	13	11	24	4	6	10	2	-	2	-	-	-	-	-	46	23	23				
		Upah	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	7	4	3				
JUMLAH			9	6	15	43	48	91	108	91	199	19	31	50	20	5	25	3	-	3	1	1	2	385	203	182			
Upah			-	-	-	-	2	2	35	15	50	5	2	7	32	3	35	-	-	1	-	1	95	73	22				
TOTAL PNS+UPAH			9	6	15	43	50	93	143	106	249	24	33	57	52	8	60	3	-	3	2	1	3	480	276	204			
B. DAERAH																													
I	BPKH Wil. I Medan	PNS	-	-	-	4	-	4	14	8	22	5	8	13	8	2	10	-	-	-	-	-	49	31	18				
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	13	8	5				
II	BPKH Wil. II Palembang	PNS	-	-	-	6	1	7	6	5	11	4	5	9	8	4	12	-	-	-	-	-	39	24	15				
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	-	6	-	-	-	-	8	6	2				
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	1	-	1	4	4	8	10	6	16	4	2	6	5	1	6	1	-	1	-	-	38	25	13				
		Upah	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	12	1	13	-	-	-	-	-	16	14	2				
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	PNS	-	-	-	10	2	12	13	13	26	4	6	10	6	2	8	-	-	1	-	1	57	34	23				
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	12	4	16	-	-	-	-	18	13	5				
V	BPKH Wil. V Banjarbaru	PNS	-	-	-	7	-	7	9	11	20	1	4	5	8	3	11	-	-	-	-	-	43	25	18				
		Upah	-	-	-	1	2	3	7	2	9	1	1	2	8	1	9	-	-	-	-	-	23	17	6				
VI	BPKH Wil. VI Manado	PNS	-	-	-	6	-	6	9	7	16	-	3	3	8	-	8	-	-	-	-	-	33	23	10				
		Upah	-	-	-	-	-	-	3	4	7	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	14	9	5				
VII	BPKH Wil. VII Makassar	PNS	-	-	-	4	6	10	13	8	21	4	3	7	6	5	11	-	-	-	-	-	49	27	22				
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	19	14	5				
VIII	BPKH Wil. VIII Denpasar	PNS	-	-	-	3	1	4	15	7	22	2	5	7	11	2	13	-	-	-	-	-	46	31	15				
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	-	1	4	-	4	-	-	-	-	-	10	9	1				
IX	BPKH Wil. IX Ambon	PNS	-	-	-	2	1	3	11	5	16	8	2	10	13	1	14	-	-	-	-	-	43	34	9				
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-	-	-	13	3	16	-	-	-	-	-	24	17	7				
X	BPKH Wil. X Irian Jaya	PNS	-	-	-	4	2	6	14	6	20	2	3	5	9	-	9	-	-	-	-	-	40	29	11				
		Upah	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	7	2	9	1	-	1	-	-	14	10	4				
XI	BPKH Wil. XI Yogyakarta	PNS	-	1	1	4	12	16	12	19	31	5	4	9	7	2	9	1	-	1	-	-	67	29	38				
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10	-	10	1	-	1	-	-	12	12	-				
XII	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	PNS	-	-	-	5	2	7	5	4	9	5	9	14	6	-	6	-	-	-	-	-	36	21	15				
		Upah	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	1	3	7	1	8	-	-	-	-	-	15	12	3				

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN			KET.			
			P			JML			L			P			JML			L			P				JML				L	P	JML
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
XIII	BPKH Wil. XIII	PNS	-	-	-	5	2	7	8	4	12	4	7	11	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	33	19	14				
	Pangkalpinang	Upah	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	1	3	10	2	12	-	-	-	-	-	22	14	8					
	PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	23	9					
XIV	BPKH Wil. XIV Kupang	Upah	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10	2	-	2	7	-	7	-	-	-	-	-	19	15	4					
	PNS	1	-	1	4	1	5	8	3	11	4	3	7	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	31	23	8					
	Upah	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	12	1	13	-	-	-	-	-	-	22	16	6					
XVI	BPKH Wil. XVI Palu	PNS	1	-	1	9	3	12	11	6	17	5	2	7	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	43	30	13				
	Upah	-	-	-	-	-	2	2	13	3	16	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	21	15	6					
	PNS	1	-	1	3	1	4	12	2	14	2	2	4	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	35	29	6					
XVIII	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	Upah	-	-	-	-	-	-	-	4	9	13	-	2	2	11	2	13	-	-	1	-	1	29	16	13					
	PNS	-	-	-	-	1	1	2	10	5	15	4	2	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	26	17	9					
	Upah	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	7	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	14	13	1					
XIX	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	PNS	-	-	-	7	-	7	9	3	12	3	5	8	3	2	5	-	-	-	-	-	-	32	22	10					
	Upah	-	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	-	8	2	10	-	-	-	1	-	1	20	13	7					
	PNS	-	-	-	-	5	4	9	11	7	18	3	-	3	6	1	7	-	-	-	-	-	-	37	25	12					
XX	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	Upah	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	-	2	6	1	7	-	-	-	-	-	-	14	10	4					
	PNS	-	-	-	-	6	1	7	16	4	20	1	2	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	33	24	9					
	Upah	-	-	-	-	-	-	-	4	6	10	2	-	2	9	5	14	-	-	-	-	-	-	26	15	11					
XXII	BPKH Wil. XXII Kendari	PNS	1	-	1	3	2	5	11	6	17	1	2	3	3	1	4	-	-	-	-	-	-	30	19	11					
	Upah	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	1	1	2	7	-	7	-	-	-	-	-	-	18	11	7					
	PNS	5	1	6	110	47	157	236	142	378	73	83	156	137	35	172	2	-	2	1	-	-	1	872	564	308					
JUMLAH			-	-	-	2	5	7	79	71	150	14	8	22	180	28	208	2	-	2	2	-	2	391	279	112					
TOTAL PNS + UPAH			5	1	6	112	52	164	315	213	528	87	91	178	317	63	380	4	-	4	3	-	3	1.263	843	420					

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

TABEL IX.3. PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2023

No	Unit Kerja	PERENCANA		JLH. PERENCANA	SURTA				JLH. SURTA	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				JLH. PEH		PRANATA KOMPUTER				JLH. PRANATA KOMPUTER
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli			Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
I	PUSAT																			
1	Sekretariat Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	12
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah	15	-	15	-	-	2	-	2	3	-	22	-	25	-	-	-	4	-	4
3	Direktorat Pengkutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9	-	9	1	-	4	-	5	6	-	22	-	28	-	-	-	1	-	1
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	1	-	1	1	-	1	-	2	7	-	25	-	32	-	-	-	-	-	-
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebiasaan Wilayah	12	-	12	-	-	9	-	9	7	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PUSAT	44	-	44	2	-	16	-	18	24	-	72	-	96	-	3	-	14	-	17
II	BPKH																			
1	BPKH Wil. I Medan	-	-	-	2	-	2	-	4	11	-	7	-	18	-	2	-	-	-	2
2	BPKH Wil. II Palembang	-	-	-	4	-	1	-	5	9	-	4	-	13	-	-	-	-	-	-
3	BPKH Wil. III Pontianak	-	-	-	2	-	2	-	4	6	-	8	-	14	-	-	-	-	-	-
4	BPKH Wil. IV Samarinda	-	-	-	2	-	2	-	4	8	-	17	-	25	-	-	-	-	-	-
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	-	-	-	1	-	-	-	1	11	-	11	-	22	-	-	-	-	-	-
6	BPKH Wil. VI Manado	-	-	-	-	-	2	-	2	7	-	6	-	13	-	-	-	1	-	1
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	-	-	2	-	1	-	3	11	-	19	-	30	-	-	-	-	-	-
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	-	-	-	3	-	2	-	5	7	-	8	-	15	-	-	-	-	-	-
9	BPKH Wil. IX Ambon	-	-	-	3	-	1	-	4	10	-	5	-	15	-	2	-	-	-	2
10	BPKH Wil. X Jayapura	-	-	-	-	-	2	-	2	10	-	8	-	18	-	-	-	-	-	-
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	-	-	-	1	-	2	-	3	6	-	13	-	19	-	-	-	-	-	-
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	-	-	-	2	-	2	-	4	13	-	6	-	19	-	-	-	-	-	-
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	-	-	-	3	-	3	-	6	7	-	6	-	13	-	-	-	-	-	-
14	BPKH Wil. XIV Kupang	-	-	-	-	-	6	-	6	6	-	7	-	13	-	-	-	1	-	1
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	-	-	-	1	-	2	-	3	9	-	7	-	16	-	-	-	-	-	-
16	BPKH Wil. XVI Palu	-	-	-	2	-	1	-	3	7	-	10	-	17	-	1	-	-	-	1
17	BPKH Wil. XVII Marokwari	-	-	-	2	-	2	-	4	9	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	-	-	-	2	-	3	-	5	4	-	6	-	10	-	1	-	-	-	-
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	9	-	17	-	-	-	-	-	-
20	BPKH Wil. XX Lampung	-	-	-	1	-	2	-	3	4	-	15	-	19	-	-	-	-	-	-
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	15	-	16	-	-	-	-	-	-
22	BPKH Wil. XXII Kendari	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	10	-	13	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	36	-	38	-	74	167	-	199	-	366	-	6	-	2	-	7
	JUMLAH PUSAT + BPKH	44	-	44	38	-	54	-	92	191	-	271	-	462	-	9	-	16	-	24

No	Unit Kerja	ANALIS KEPEG.		JLH. ANALIS KEPEG.		ARSIPARIS			JLH. ARSIPARIS	PRANATA HUMAS CALON AHLI	JUMLAH PRANATA A HUMAS	Perancang Peraturan CALON		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa AHLI / CALON		JUMLAH PENGELOLA PENGADAAN BRG/JASA	TOTAL
		Ahli	Calon Ahli			Terampil	Ahli	Calon Teram				AHLI	CALON	AHLI	CALON		
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
I	PUSAT																
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5	-	5	3	1	-	4	2	2	2	-	-	-	-	-	31
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	48
3	Direktorat Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	45
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kegiatan Wilayah	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31
	JUMLAH PUSAT	5	-	5	5	3	-	8	2	2	2	2	2	-	-	2	194
II	BPKH																
1	BPKH Wil. I Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
2	BPKH Wil. II Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
3	BPKH Wil. III Pontianak	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	20
4	BPKH Wil. IV Samarinda	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	30
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
6	BPKH Wil. VI Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	17
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	35
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	22
9	BPKH Wil. IX Ambon	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	22
10	BPKH Wil. X Jember	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	21
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	25
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
14	BPKH Wil. XIV Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
16	BPKH Wil. XVI Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	18
20	BPKH Wil. XX Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	24
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	18
22	BPKH Wil. XXII Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	16
	JUMLAH	1	-	1	10	1	-	11	2	2	2	9	-	-	-	9	468
	JUMLAH PUSAT + BPKH	6	-	6	15	4	-	19	2	2	2	11	-	-	-	11	662

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

TABEL IX.4. PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	UNIT KERJA	TAHUN 2019										TAHUN 2020					TAHUN 2021					TAHUN 2022					TAHUN 2023										
		LEMHANAS		SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.III	PIM TK.IV	ADUM	JML	LEMHANAS		SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.III	PIM TK.IV	ADUM	JML	LEMHANAS		SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.III	PIM TK.IV	ADUM	JML	LEMHANAS		SPATI	SPAMEN	SPAMA	PIM TK.III	PIM TK.IV	ADUM	JML
A. PUSAT																																					
1	Sekretariat Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH A																																					
B. DAERAH																																					
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPKH WILAYAH V BANJARBARU	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
10	BPKH WILAYAH X PAPUA	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BPKH WILAYAH XI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNG PINANG	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKAL PINANG	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)																																							
		TAHUN 2019								TAHUN 2020								TAHUN 2021								TAHUN 2022								TAHUN 2023							
		LEMHANAS	SPATI	SPAMEN	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML	LEMHANAS	SPATI	SPAMEN	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML	LEMHANAS	SPATI	SPAMEN	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML	LEMHANAS	SPATI	SPAMEN	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML	LEMHANAS	SPATI	SPAMEN	PIM TK.III	PIM TK.IV	JML										
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1										
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-										
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1										
20	BPKH WILAYAH XX LAMPUNG	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
JUMLAH B		-	-	-	7	21	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	7										
JUMLAH A+B		-	-	-	12	27	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	5	7										

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data s.d Desember 2023

**TABEL IX.5. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

I. UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UU Nomor 41	1999	Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
2	UU Nomor 19	2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Masih berlaku
3	UU Nomor 32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masih berlaku dan ada perubahan
4	UU Nomor 11	2020	Cipta Kerja	Sudah tidak berlaku
5	Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2	2022	Cita Kerja	Sudah tidak berlaku pada saat tahun terbit (2023)

II. PERATURAN PEMERINTAH

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PP. Nomor 44	2004	Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
2	PP. Nomor 2	2008	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Dephut	Sudah tidak berlaku
3	PP. Nomor 10	2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
4	PP. Nomor 24	2010	Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	PP. Nomor 60	2012	Perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
6	PP. Nomor 61	2012	Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
7	PP. Nomor 33	2014	Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	Masih berlaku
8	PP. Nomor 104	2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	PP. Nomor 105	2015	Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	PP. Nomor 46	2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Masih berlaku
11	PP. Nomor 46	2017	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Masih Berlaku
12	PP Nomor 22	2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masih Berlaku
13	PP Nomor 23	2021	Penyelenggaraan Kehutanan	Masih Berlaku
14	PP Nomor 45	2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Masih Berlaku

III. PERATURAN PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perpres Nomor 28	2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Masih berlaku
2	Perpres Nomor 88	2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku

IV. INSTRUKSI PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Instruksi Presiden Nomor 10	2011	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
2	Instruksi Presiden Nomor 6	2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
3	Instruksi Presiden Nomor 8	2015	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
4	Instruksi Presiden Nomor 6	2017	Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Izin Baru Hutan Alam primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
5	Instruksi Presiden Nomor 8	2018	Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Sudah tidak berlaku
6	Instruksi Presiden Nomor 5	2019	Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Masih Berlaku

V. PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	683/Kpts-II/1981	1981	Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi	Masih berlaku
2	364/Kpts-II/1990; 519/Kpts/HK.050/7/1990; 23-VII-1990	1990	Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Masih berlaku
3	418/Kpts-II/1993	1993	Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
4	292/Kpts-II/1995	1995	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	250/Kpts-II/1996	1996	Perubahan Kepmenhut No.418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
6	613/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Sudah tidak berlaku
7	333/Kpts-II/1999	1999	Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan	Sudah tidak berlaku
8	32/Kpts-II/2001	2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	70/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Kawasan Lindung Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	146/Kpts-II/2003	2003	Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
11	230/Kpts-II/2003	2003	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku
12	P.31/Menhut-II/2005	2005	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan	Sudah tidak berlaku
13	P.28/Menhut-II/2006	2006	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
14	P.66/Menhut-II/2006	2006	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Huta	Sudah tidak berlaku
15	P.67/Menhut-II/2006	2006	Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan	Sudah tidak berlaku
16	P.26/Menhut-II/2007	2007	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
17	P.62/Kpts-II/2007	2007	Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/2007 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	23/MEN/XI/2007; P.52/Menhut-II/2008	2008	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi	Masih berlaku
19	P.43/Menhut-II/2008	2008	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
20	P.56/Menhut-II/2008	2008	Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan	Masih berlaku dan ada perubahan
21	P.38/Menhut-II/2008	2008	Perubahan Keempat Atas Kepmenhut No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
22	P.53/Menhut-II/2008	2008	Optimalisasi Peruntukan Areal hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
23	P.48/Menhut-II/2009	2009	Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000	Sudah tidak berlaku
24	P.50/Menhut-II/2009	2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
25	P.16/Menhut-II/2009	2009	Perubahan Kelima Atas Kepmenhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
26	P.6/Menhut-II/2009	2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sudah tidak berlaku
27	P.28/Menhut-II/2009	2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata	Masih berlaku
28	P.02/Menhut-II/2010	2010	Informasi Kehutanan	Masih berlaku
29	P.06/Menhut-II/2010	2010	Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Masih berlaku
30	P.32/Menhut-II/2010	2010	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
31	P.33/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
32	P.34/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku

IX. DUKUNGAN MANAGEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
33	P.36/Menhut-II/2010	2010	Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
34	P.42/Menhut-II/2010	2010	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
35	P.47/Menhut-II/2010	2010	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
36	P.17/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
37	P.18/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
38	P.19/Menhut-II/2011	2011	Penataan Batas Areal Kerja izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
39	P.20/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
40	P.41/Menhut-II/2011	2011	Standar Fasilitas Sarand dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
41	P.44/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Kedua Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
42	P.49/Menhut-II/2011	2011	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Sudah tidak berlaku
43	P.50/Menhut-II/2011	2011	Penguahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
44	P.54/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
45	P.38/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
46	P.44/Menhut-II/2012	2012	Penguahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
47	P.41/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
48	P.14/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
49	P.43/Menhut-II/2013	2013	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan	Sudah tidak berlaku
50	P.46/Menhut-II/2013	2013	Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
51	P.47/Menhut-II/2013	2013	Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
52	P.62/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
53	P.16/Menhut-II/2014	2014	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
54	P.25/Menhut-II/2014	2014	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
55	P.27/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
56	P.28/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat	Sudah tidak berlaku
57	P.29/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
58	Peraturan Bersama Tiga Menteri dan Kepala BPN No. 79/2014, No.	2014	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku
59	P.16/MenLHK-II/2015	2015	Perubahan kedua atas Permenhut No.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
60	P.50/Menlhk/Setjen/2016	2016	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
61	P.51/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	Sudah tidak berlaku
62	P.81/Menlhk/Setjen/KUM .1/10/2016	2016	Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Masih berlaku
63	P.93/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
64	P.96/Menlhk/Setjen/Kum .1/11/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
65	P.97/MENLHK/Setjen/Ku m.1/11/2018	2018	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
66	P.22/MENLHK/Setjen/Ku m.1/7/2018	2018	Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
67	P.27/Menlhk/Setjen/Kum .1/7/2018	2018	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
68	P.17/Menlhk/SETJEN/Ku m.1/5/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Sudah tidak berlaku
69	P.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1 /7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
70	P.42/Menlhk/Setjen/Kum .1/8/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 17/Menlhk/Setjen/Kum. 1/5/2018	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
71	P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara	Sudah tidak berlaku
72	P.5/Menlhk/Setjen/Kum. 1/1/2020	2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan	Masih berlaku
73	P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019	2019	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Masih berlaku
74	Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021	2021	Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
75	Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021	2021	Daftar Usaha/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya	Masih berlaku
76	Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2021	2021	Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal, Pelatihan Kompetensi Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal, Pembentukan Lembaga Uji	Masih berlaku
77	Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021	2021	Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Masih berlaku

VI. SK. MENTERI (PIPIB)

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK. 7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	2006	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)	Sudah tidak berlaku
2	SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II)	Sudah tidak berlaku
3	SK. 6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi III)	Sudah tidak berlaku
4	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV)	Sudah tidak berlaku
5	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)	Sudah tidak berlaku
6	SK. 3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VI)	Sudah tidak berlaku
7	SK. 6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)	Sudah tidak berlaku
8	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII)	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
9	SK. 5385/Men-LHK-PKTL/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX)	Sudah tidak berlaku
10	SK. 2300/Men-LHK/PKTL/IPSDH/Pla.1/5/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)	Sudah tidak berlaku
11	SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI)	Sudah tidak berlaku
12	SK.351/MenLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII)	Sudah tidak berlaku
13	SK.6559/MenLHK/IPSDH/PLA.1/12/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)	Sudah tidak berlaku
14	SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV)	Sudah tidak berlaku
15	SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV)	Sudah tidak berlaku
16	SK. 7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019	2019	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
17	SK.851/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020	2020	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I	Sudah tidak berlaku
18.	SK.4945/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020	2020	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II	Sudah tidak berlaku
19	SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021	2021	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam	Sudah tidak berlaku
20	SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021	2021	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam	Sudah tidak berlaku
21	SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022	2022	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan	Sudah tidak berlaku
22	SK.7954/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022	2022	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan	Sudah tidak berlaku pada saat tahun terbit (2023)

VII. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK.91/VII-PW/2006	2006	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
2	P.01/VII-SET/2009	2009	Nama-nama Jabatan dan uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
3	P.02/VII-SET/2009	2009	Prosedur Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
4	P.03/VII-SET/2009	2009	Klasifikasi Arsip/Dokumen Pengukuhan dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	P.01/VII-SET/2010	2010	Peraturan Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
6	P.02/VII-SET/2010	2010	Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
7	P.03/VII-SET/2010	2010	Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014	Sudah tidak berlaku
8	P.04/VII-SET/2010	2010	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2011	Sudah tidak berlaku
9	P.05/VII-SET/2010	2010	Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Penetapan Areal Kerja, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	Sudah tidak berlaku
10	P.06/VII-SET/2010	2010	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
11	P.07/VII-SET/2010	2010	Standar Nomenklatur Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
12	P.08/VII-SET/2010	2010	Standar Biaya dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
13	P.1/VII-SET/2011	2011	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Masih berlaku
14	P.2/VII-SET/2011	2011	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
15	P.3/VII-SET/2011	2011	Perubahan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
16	P.4/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Sudah tidak berlaku
17	P.5/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	P.6/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
19	P.7/VII-SET/2011	2011	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
20	P.8/VII-SET/2011	2011	Standar Kegiatan dan Biaya Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2010	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
21	P.9/VII-SET/2011	2011	Rencana Kerja Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
22	P.1/VII-SET/2012	2012	Penetapan Kinerja Ditjen Planhut Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
23	P.4/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
24	P.5/VII-WP3H/2012	2012	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Sudah tidak berlaku
25	P.6/VII-SET/2012	2012	Rencana Kerja Ditjen Planhut Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
26	P.9/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Menggunakan GPS	Masih Berlaku
27	P.10/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
28	P.11/VII-SET/2012	2012	Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
29	P.13/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan	Sudah tidak berlaku
30	P.14/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menhut kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
31	P.15/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
32	P.16/VII-SET/2012	2012	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perubahan	Sudah tidak berlaku
33	P.17/VII-SET/2012	2012	Pedoman Penyusunan Laporan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
34	P.1/VII-SET/2013	2013	Penetapan Kinerja Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
35	P.2/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan	Masih berlaku
36	P.3/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Masih berlaku
37	P.4/VII-SET/2013	2013	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
38	P.5/VII-SET/2013	2013	Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
39	P.6/VII-SET/2013	2013	Perubahan P.5/VII-SET/2013 tentang Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku

IX. DUKUNGAN MANAGEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
40	P.7/VII-SET/2013	2013	Mekanisme Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Perubahan	Masih berlaku
41	P.1/VII-Set/2014	2014	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
42	P.2/VII-Set/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS	Masih berlaku
43	P.3/VII-IPSDH/2014	2014	Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan	Masih berlaku
44	P.4 /VII/PAKH/2014	2014	petunjuk teknik pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah tidak berlaku
45	P.5/VII-PAKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
46	P.6/VII-PAKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama	Sudah tidak berlaku
47	P.7 /VII-Set/2014	2014	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
48	P.8/VII-Set/2014	2014	Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
49	P.4/PKTL-SET/2015	2015	Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
50	P.5/PKTL-SET/2015	2015	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemegang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang	Masih berlaku
51	P.10/PKTL-SET/2015	2015	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
52	P.1/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2016	2016	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Sudah tidak berlaku
53	P.2/PKTL/SETDIT/OTL.1/3/2016	2016	Nama nama Jabatan dan Uraian Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
54	P.3/SETDIT/PLA.2/9/2016	2016	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
55	P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016	2016	Tentang Nama Jabatan Dan Uraian Jabatan Non Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
56	P.7/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2016	2016	Tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
57	P.8/PKTL/SETDIT/PRO EV/Set.1/ 12/2016	2016	Penetapan Indikator Kinerja Utama	Masih berlaku
58	P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2017	2017	Perjanjian Kinerja	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
59	P.3/PKTL/IPSDH/PLA.1/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi PIPPIB	Masih berlaku
60	P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/2017	2017	Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
61	P.5/PKTL/SETDIT/KUM.1/4/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis Geospasial	Masih berlaku
62	P.9/PKTL/KUH/PLA.2/1/2018	2018	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Batas Pencadangan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif dalam Rangka	Masih berlaku
63	P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/8/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.9/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB)	Sudah tidak berlaku
64	P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun	Sudah tidak berlaku
65	P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.8/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tentang Prosedur Kerja Lingkup Ditjen	Masih berlaku
66	P.12/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Sudah tidak berlaku
67	P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/3/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NO. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi	Sudah tidak berlaku
68	P.2/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Prosedur Kerja Lingkup Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
69	P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018	2018	Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Sudah tidak berlaku
70	P.5/PKTL/SETDIT/Kum.1/8/2018	2018	Petunjuk Teknis Penelitian Tim Terpadu dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak Produktif untuk	Masih berlaku
71	P.3/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Proses Bisnis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Masih berlaku
72	P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018	2018	Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Wilayah Ekoregion	Masih berlaku
73	P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018	2018	Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Sudah tidak berlaku
74	P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No.P.9/PKTL-STE/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019	Sudah tidak berlaku
75	P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019	2019	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
76	P.4/PKTL/SETDIT/PLA.0/8/2019	2019	Sistem Informasi dan Dokumentasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Online	Masih berlaku
77	P.5/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2019	2019	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku

IX. DUKUNGAN MANAGEMEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
78	P.13/PKTL/SETDIT/Keu.0/12/2019	2019	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku
79	P.14/PKTL.SETDIT/Keu.0/12/2019	2019	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Sudah tidak berlaku
80	P.11/PKTL/SET.2/KUM.1/2020	2020	Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku
81	P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021	2021	Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan	Masih berlaku

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d Desember 2022

TABEL IX.6. REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN (Dalam Ribuan Rupiah)

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	JUMLAH PUSAT DAN UPT (Hil)	451.314.101	447.060.836.000	532.555.897.000	411.730.791.000	
I	PUSAT	137.921.527	141.462.000.000	114.473.512.000	114.218.752.000	237.879.302.000
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	61.951.150	72.187.689.000	67.458.562.000	74.638.007.000	94.422.110.000
2	Dit. Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	49.242.011	25.950.713.000	10.910.219.000	7.570.969.000	23.844.930.000
3	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11.984.349	27.001.002.000	10.640.908.000	12.669.996.000	25.509.066.000
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	4.630.325	3.466.891.000	4.872.124.000	5.249.103.000	6.735.200.000
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.748.694	5.987.759.000	9.470.080.000	8.163.418.000	37.721.344.000
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.364.998	6.867.946.000	11.121.619.000	5.927.259.000	49.646.652.000
II	UPT (BPKH)	313.392.574	305.598.836.000	418.082.385.000	297.512.039.000	648.059.332.000
1	BPKH Wilayah I Medan	14.515.385	18.219.092.000	38.142.281.000	14.795.467.000	79.948.002.000
2	BPKH Wilayah II Palembang	13.479.029	16.797.624.000	20.710.588.000	8.770.753.000	11.715.348.000
3	BPKH Wilayah III Pontianak	17.479.195	15.375.284.000	18.091.190.000	19.731.375.000	15.718.584.000
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	16.583.716	13.967.392.000	22.842.372.000	24.636.842.000	22.634.626.000
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	14.553.767	14.929.009.000	16.173.011.000	33.152.567.000	29.696.749.000
6	BPKH Wilayah VI Manado	18.380.925	12.452.729.000	14.685.995.000	10.533.035.000	52.808.626.000
7	BPKH Wilayah VII Makassar	20.324.724	16.098.772.000	22.749.018.000	10.850.584.000	32.582.694.000
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	10.944.681	10.643.214.000	12.514.468.000	8.803.289.000	20.636.532.000
9	BPKH Wilayah IX Ambon	16.996.124	12.602.016.000	15.545.572.000	12.873.024.000	36.818.880.000
10	BPKH Wilayah X Jayapura	15.808.518	42.891.459.000	29.439.864.000	16.132.077.000	27.496.151.000
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	13.538.153	12.622.599.000	19.585.743.000	10.524.632.000	33.690.105.000
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	11.037.814	7.090.533.000	8.057.129.000	9.319.720.000	26.332.016.000
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	11.207.461	8.475.310.000	9.694.576.000	6.445.944.000	13.930.192.000
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	12.506.972	8.860.899.000	27.404.295.000	6.279.773.000	23.273.242.000
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	14.469.640	8.060.023.000	7.939.673.000	6.895.226.000	9.152.605.000
16	BPKH Wilayah XVI Palu	17.371.168	15.601.111.000	31.944.436.000	9.378.922.000	15.157.054.000
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	16.578.627	9.820.837.000	19.943.547.000	9.069.043.000	28.178.972.000
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	6.952.736	7.666.102.000	11.602.922.000	8.175.513.000	35.726.840.000
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	11.357.055	9.566.968.000	12.423.975.000	33.730.414.000	76.925.982.000
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	9.250.784	8.244.843.000	10.084.738.000	7.372.375.000	14.309.274.000
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	15.823.273	23.249.079.000	35.783.026.000	19.826.649.000	31.074.707.000
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	14.232.827	12.363.941.000	12.723.966.000	10.214.815.000	10.252.151.000

Keterangan:

Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp. 17.980.900.000,-, namun sampai dengan Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negara donor (on budget treasury)

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d november 2023

TABEL IX.7. PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	SATKER	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				
		BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	ANGGARAN	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	ANGGARAN	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	ANGGARAN	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	ANGGARAN	BAGIAN ANGGARAN 029		SISA	ANGGARAN	
ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	ANGGARAN			REALISASI	% REALISASI			ANGGARAN	REALISASI			% REALISASI	ANGGARAN			REALISASI	% REALISASI			ANGGARAN
	TOTAL	451.314.101.000	427.599.646.291	9.364	28.714.454.709	447.060.636.000	403.868.153.331	9.034	43.192.682.669	532.555.897.000	414.473.512.000	528.161.819.137	9.917	4.394.077.863	885.938.634.000	814.212.841.087	91.990	2.507.217.427	885.938.634.000	814.212.841.087	91.990	71.725.792.913
	PUSAT	137.921.527.000	124.387.215.883	90.19	13.534.311.117	141.462.000.000	128.176.911.612	90.61	13.385.085.388	114.473.512.000	114.445.489.947	114.445.489.947	99.71	325.022.053	237.879.302.000	202.230.940.016	85.01	1.484.822.066	237.879.302.000	202.230.940.016	85.01	35.648.461.984
1	Sekretariat Ditjen Penologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	61.951.150.000	60.541.811.005	97.73	1.409.338.995	72.187.689.000	63.965.145.231	88.61	8.222.543.769	67.456.562.000	67.456.562.000	67.368.883.213	9.987	89.678.787	74.638.007.000	83.765.338.263	88.71	1.205.753.195	74.638.007.000	83.765.338.263	88.71	10.656.771.737
2	Dit. Perencanaan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembinaan Wilayah Pengelolaan Hutan	49.242.011.000	38.597.495.616	78	10.644.515.384	25.950.713.000	24.400.373.484	94.03	1.550.339.516	10.910.219.000	7.570.969.000	10.791.924.184	9.892	119.294.816	23.844.930.000	19.673.422.611	82.51	28.581.923	23.844.930.000	19.673.422.611	82.51	4.171.507.389
3	Dit. Pengkutan dan Penatalaksanaan Kawasan Hutan	11.984.349.000	10.838.344.671	90	1.146.004.329	27.001.002.000	24.176.693.692	89.54	2.824.308.308	10.640.908.000	12.669.996.000	10.565.839.867	9.929	75.068.333	22.669.996.000	21.415.280.878	83.95	57.626.511	25.509.066.000	21.415.280.878	83.95	4.093.785.122
4	Dit. Inventarisasi dan Pemetaan SDA	4.630.325.000	4.522.982.549	98	107.342.451	3.466.891.000	3.277.425.592	94.54	189.465.408	4.872.124.000	5.249.103.000	4.851.174.919	9.957	20.949.081	6.735.200.000	5.988.309.531	88.92	50.376.186	6.735.200.000	5.988.309.531	88.92	746.290.469
5	Dit. Pengawasan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	5.748.694.000	5.683.278.186	99	65.415.814	6.867.946.000	6.439.332.442	93.76	428.613.558	9.470.080.000	8.163.418.000	9.453.958.667	9.983	16.121.333	49.646.652.000	42.466.989.708	85.54	11.340.724	49.646.652.000	42.466.989.708	85.54	7.179.662.292
6	Dit. Peningkatan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	4.364.998.000	4.203.303.856	96	161.694.144	5.987.759.000	5.917.941.171	98.83	69.817.829	11.121.619.000	5.927.259.000	11.113.709.297	9.993	7.909.703	37.721.344.000	28.920.899.025	76.67	1.477.460	37.721.344.000	28.920.899.025	76.67	8.800.444.975
	BPKH	313.392.574.000	298.212.430.408	95.16	15.180.143.592	305.598.636.000	275.691.241.719	90.21	29.907.394.281	418.082.385.000	414.016.329.190	414.016.329.190	99.03	4.065.055.810	648.099.332.000	611.982.001.071	94.43	1.022.395.951	648.099.332.000	611.982.001.071	94.43	36.077.330.929
1	BPKH Wilayah I Medan	14.515.985.000	12.386.527.539	85.33	2.128.857.461	18.219.082.000	15.890.404.973	87.22	2.328.687.027	38.142.281.000	37.593.576.720	37.593.576.720	9.956	548.704.120	79.948.002.000	70.293.386.273	87.92	87.666.401	79.948.002.000	70.293.386.273	87.92	9.654.615.727
2	BPKH Wilayah II Palembang	13.479.029.000	12.780.272.557	94.82	698.756.443	16.797.624.000	14.486.190.120	86.24	2.311.433.880	20.710.588.000	20.136.105.732	20.136.105.732	9.723	574.482.268	11.715.348.000	11.225.325.429	95.82	62.917.589	11.715.348.000	11.225.325.429	95.82	490.022.571
3	BPKH Wilayah III Pontianak	17.479.195.000	17.075.958.113	97.69	403.236.887	15.375.284.000	14.503.361.394	94.33	871.922.606	18.091.190.000	17.931.375.000	18.007.942.137	9.954	83.247.863	15.718.384.000	15.208.327.155	96.75	77.271.904	15.718.384.000	15.208.327.155	96.75	510.256.845
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	16.583.716.000	13.838.703.351	83.45	2.745.012.649	13.967.392.000	12.869.893.524	92.14	1.097.498.476	22.842.372.000	24.632.842.000	22.631.578.135	9.908	210.793.865	22.634.628.000	21.480.486.447	94.90	311.097.965	22.634.628.000	21.480.486.447	94.90	1.154.139.553
5	BPKH Wilayah V Banjarmasin	14.553.767.000	14.491.799.787	99.57	61.967.213	14.929.009.000	13.808.715.588	92.50	1.120.293.432	16.173.011.000	33.152.567.000	16.162.096.293	9.993	10.914.707	28.696.749.000	28.388.424.302	95.49	16.098.862	28.696.749.000	28.388.424.302	95.49	1.338.324.698
6	BPKH Wilayah VI Manado	19.380.925.000	17.804.265.082	91.86	1.576.659.918	12.452.729.000	11.615.359.243	93.28	837.369.757	14.685.995.000	10.850.584.000	14.604.448.222	9.944	81.546.778	29.696.749.000	28.388.424.302	95.49	50.242.137	52.808.626.000	50.751.088.258	96.10	2.057.537.742
7	BPKH Wilayah VII Makassar	20.324.724.000	19.879.990.233	97.81	444.733.767	16.098.772.000	15.230.231.345	94.60	888.540.655	22.749.018.000	10.850.584.000	10.849.391.263	9.999	2.780.925	32.582.894.000	30.740.762.256	94.35	1.192.737	32.582.894.000	30.740.762.256	94.35	1.841.931.744
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	10.944.881.000	10.628.173.985	97.11	316.507.015	10.643.214.000	9.967.791.663	93.65	675.422.337	12.514.488.000	8.803.289.000	12.357.280.397	9.874	157.187.603	20.636.532.000	18.415.866.011	89.24	93.733.449	20.636.532.000	18.415.866.011	89.24	2.220.675.989
9	BPKH Wilayah IX Ambon	16.996.124.000	16.289.035.172	95.84	707.088.828	12.602.016.000	11.631.501.769	92.20	970.514.231	15.545.572.000	12.843.131.490	15.436.181.603	9.930	103.390.397	36.818.880.000	35.635.161.016	97.33	29.892.510	36.818.880.000	35.635.161.016	97.33	983.718.964
10	BPKH Wilayah X Jayapura	15.808.518.000	14.619.288.835	92.48	1.189.229.165	42.891.459.000	30.353.300.900	70.77	12.538.158.100	29.439.894.000	16.132.077.000	29.344.186.600	9.968	95.677.400	27.486.151.000	26.841.045.026	97.62	6.685.514	27.486.151.000	26.841.045.026	97.62	655.105.974
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	13.538.153.000	12.816.473.920	94.67	721.679.080	12.822.599.000	11.467.752.652	9.085	1.154.846.348	19.587.743.000	10.524.632.000	19.427.048.807	9.919	158.696.193	33.690.105.000	29.387.279.755	87.17	15.476.530	33.690.105.000	29.387.279.755	87.17	4.322.825.245
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	11.037.814.000	10.120.994.216	91.69	916.819.784	7.990.633.000	6.545.034.110	82.31	545.498.890	8.057.129.000	9.319.720.000	8.021.439.706	9.956	35.689.294	26.332.016.000	25.469.246.282	96.72	15.394.559	26.332.016.000	25.469.246.282	96.72	882.769.718
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	11.207.461.000	11.021.806.702	98.34	185.654.298	8.475.310.000	8.340.663.763	98.41	134.646.237	9.694.576.000	6.445.944.000	9.631.511.045	9.935	63.064.955	13.990.192.000	13.171.795.350	94.56	9.329.410	13.990.192.000	13.171.795.350	94.56	758.986.650
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	12.506.972.000	11.543.013.946	92.29	963.958.054	8.860.699.000	8.047.777.786	9.082	813.121.214	27.404.295.000	6.279.773.000	26.021.726.893	9.495	1.382.598.107	23.273.242.000	22.037.305.364	94.69	88.996.015	23.273.242.000	22.037.305.364	94.69	1.235.636.636
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	14.469.540.000	13.981.739.073	96.63	487.800.927	8.060.023.000	7.769.074.331	9.639	290.948.669	7.939.673.000	6.895.226.000	7.888.829.584	9.936	50.843.416	9.162.805.000	8.646.180.868	94.47	14.851.578	9.162.805.000	8.646.180.868	94.47	506.424.132
16	BPKH Wilayah XVI Palu	17.371.168.000	17.313.845.738	99.67	57.322.262	15.801.111.000	15.564.400.965	9.970	46.710.035	31.944.436.000	9.319.922.000	31.822.921.275	9.962	121.514.725	15.157.054.000	14.157.759.379	93.41	24.349.915	15.157.054.000	14.157.759.379	93.41	999.995.621
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	16.578.827.000	15.405.841.389	92.93	1.172.985.611	9.820.837.000	8.728.486.813	8.888	1.092.350.187	19.943.547.000	19.924.172.598	19.924.172.598	9.990	19.374.492	28.178.972.000	26.926.729.504	95.56	16.122.804	28.178.972.000	26.926.729.504	95.56	1.252.842.496
18	BPKH Wilayah XVIII Aceh	6.962.236.000	6.861.459.774	98.69	91.776.226	7.666.102.000	7.638.840.845	9.964	27.261.155	11.602.922.000	8.175.513.000	11.501.567.513	9.913	101.354.487	36.726.840.000	32.850.003.548	91.95	3.775.655	36.726.840.000	32.850.003.548	91.95	2.876.836.452
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	11.357.655.000	10.744.789.662	94.61	612.865.338	9.866.986.000	9.332.287.363	9.745	243.680.637	12.423.975.000	33.730.414.000	33.729.837.737	100.00	681.163	76.925.982.000	76.108.900.518	98.94	681.163	76.925.982.000	76.108.900.518	98.94	817.081.482
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	9.250.784.000	8.964.561.843	96.91	286.222.157	8.244.843.000	7.866.175.205	9.541	378.667.795	10.084.738.000	7.372.375.000	10.082.478.620	9.998	2.259.360	14.309.274.000	13.737.274.083	96.00	6.776.315	14.309.274.000	13.737.274.083	96.00	571.999.917

NO	SATKER	TAHUN 2019					TAHUN 2020					TAHUN 2021					TAHUN 2022					TAHUN 2023				
		BAGIAN ANGGARAN 029					BAGIAN ANGGARAN 029					BAGIAN ANGGARAN 029					BAGIAN ANGGARAN 029					BAGIAN ANGGARAN 029				
		ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALI- SASI	SISA	
21	BPKH Wilayah XXI Palangka Raya	15.623.273.000	15.516.605.054	9,807	304.667.946	23.249.079.000	22.453.493.447	9,658	795.585.553	35.783.026.000	35.586.146.613	9,945	196.879.387	19.826.649.000	19.756.666.269	99,65	69.982.731	31.074.707.000	30.414.699.667	97,88	660.007.333	31.074.707.000	30.414.699.667	97,88	660.007.333	
22	BPKH Wilayah XXI Kendari	14.232.827.000	14.125.284.437	9,924	107.542.563	12.363.941.000	11.599.503.940	9,382	764.437.060	12.723.986.000	12.665.677.013	9,954	58.298.987	10.214.815.000	10.194.955.302	99,81	19.859.698	10.252.151.000	9.944.965.580	97,00	307.185.420	10.252.151.000	9.944.965.580	97,00	307.185.420	

Keterangan:

- Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp. 17.980.900.000, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negara donor (on budget treasury)

- Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 4 Maret 2015 yang dijadikan acuan untuk melakukan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka persiapan proses penyusunan dokumen anggaran DIPA APBN-P Tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sehubungan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S-791/AG/2015 tanggal 9 April 2015 perihal: Dijen Perencanaan dan Tata Lingkungan untuk dapat melaksanakan DIPA awal (DIPA APBN TA 2015) Saker dan Dijen Planologi Kehutanan di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Sehingga terhitung bulan April 2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d 10 Desember 2023



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan